



PEREKONOMIAN INDONESIA



Dr. A. Mahendra, SE., M.Si

Ir. Tohap Parulian, M.Si

Dr. Dede Ruslan, M.Si

Penyunting:
Agung Anggoro Seto

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dr. A. Mahendra, SE., M.Si

Ir. Tohap Parulian, M.Si

Dr. Dede Ruslan, M.Si

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. A. Mahendra, SE., M.Si
Ir. Tohap Parulian, M.Si
Dr. Dede Ruslan, M.Si

PEREKONOMIAN INDONESIA



Global Aksara Perc

Perekonomian Indonesia

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-5874-94-4

ix + 176 hal; 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Februari 2022

copyright © Februari 2022 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. A. Mahendra, SE., M.Si
Ir. Tohap Parulian, M.Si
Dr. Dede Ruslan, M.Si

Penyunting : Agung Anggoro Seto

Desain Sampul: Arum Nur Laili

Layouter : Ilil Ni'matul M

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers

Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,

No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapers@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku *Perekonomian Indonesia* yang merupakan edisi pertama. *Perekonomian Indonesia* merupakan salah satu mata kuliah pada Fakultas Ekonomi sehingga wajib dipelajari oleh semua mahasiswa pada Fakultas tersebut.

Harapan penulis, buku *Perekonomian Indonesia* ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah *Perekonomian Indonesia* serta dapat menjadi rujukan dalam penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Buku ini juga dapat dipakai secara luas oleh banyak kalangan, para eksekutif, kaum bisnis dan masyarakat pada umumnya yang memang tertarik untuk memahami secara cermat mengenai *Perekonomian Indonesia*.

Karena keterbatasan penulis yakin buku ini masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik dari pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi di dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini

Medan, 25-01-2022

Penulis,

Dr. A. Mahendra, SE., M.Si

Ir. Tohap Parulian, M.Si

Dr. Dede Ruslan, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v	
Daftar Isi.....	vi	
BAB I	GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN	
	INDONESIA	1
1.1	Pengertian Perekonomian Indonesia	1
1.2	Sejarah Ekonomi Indonesia	3
1.3	Pembangunan Ekonomi Nasional	10
1.4	Perencanaan Pembangunan Nasional	11
BAB II	SISTEM EKONOMI INDONESIA.....	13
2.1	Sistem Ekonomi.....	13
2.2	Sistem Perekonomian Indonesia	13
2.3	Ciri-Ciri Sistem Perekonomian Indonesia.....	16
2.4	Penerapan Sistem Perekonomian Indonesia	18
2.5	Konsep Ekonomi Kerakyatan	19
2.6	Konsep Operasional Ekonomi Kerakyatan	22
BAB III	KETENAGAKERJAAN DAN	
	PENGANGGURAN DI INDONESIA	27
3.1	Pengertian Ketenagakerjaan dan Pengangguran.....	27
3.2	Jenis-Jenis Ketenagakerjaan dan Pengangguran.....	29
3.3	Potensi dan Permasalahan Tenaga Kerja dan Pengangguran	32
3.4	Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Masalah Pengangguran	34
BAB IV	PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN	
	EKONOMI DAN STRUKTUR EKONOMI	
	INDONESIA	37

4.1	Pertumbuhan Ekonomi dan Kenaikan Produktivitas	37
4.2	Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi	40
4.3	Pendapatan Nasional	43
4.4	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19	46
BAB V	PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL	49
5.1	Pengertian Pembangunan Ekonomi	49
5.2	Indikator dan Ukuran Pembangunan	51
5.3	Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional	55
5.4	Industrialisasi di Indonesia	56
BAB VI	INVESTASI DI INDONESIA	59
6.1	Investasi di Indonesia	59
6.2	Pertumbuhan Investasi di Indonesia	62
6.3	Investasi Asing di Indonesia	66
BAB VII	PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL	71
7.1	Pengertian Perdagangan Internasional	71
7.2	Teori Perdagangan Internasional	73
7.3	Neraca Pembayaran Internasional	75
7.4	Sistem Moneter Internasional	77
BAB VIII	EKSPOR	79
8.1	Pengertian Ekspor	79
8.2	Perkembangan Ekspor di Indonesia	80
8.3	Faktor yang Mempengaruhi Ekspor di Indonesia	82
8.4	Kebijakan Ekspor di Indonesia	84
BAB IX	IMPOR	91
9.1	Pengertian Impor	91
9.2	Perkembangan Impor di Indonesia	92
9.3	Faktor Yang Mempengaruhi Impor di Indonesia	94
9.4	Dasar Hukum dan Kebijakan Impor di Indonesia	96

BAB X	KEBIJAKAN INDUSTRI	100
10.1	Pengertian Kebijakan Industri dan Analisis Kebijakan	100
10.2	Perkembangan Kebijakan Industri di Indonesia	101
10.3	Syarat Kebijakan Industri	109
10.4	Industri Revolusi 4.0	112
BAB XI	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN....	114
11.1	Latar Belakang.....	114
11.2	Pengertian dan Definisi Sektor Pertanian	116
11.3	Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	117
11.4	Cakupan Data.....	118
11.5	Perkembangan PDB Pertanian 2013-2019	120
11.6	Pengaruh Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan Terhadap Perekonomian Indonesia.....	121
11.7	Penelitian yang Relevan	122
BAB XII	KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL.....	124
12.1	Pengertian dan Instrumen Kebijakan Moneter.....	124
12.2	Fungsi Kebijakan Moneter	128
12.3	Definisi dan Tujuan Kebijakan Fiskal	128
12.4	Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	135
12.5	Instrumen Kebijakan Fiskal	137
BAB XIII	KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA	139
13.1	Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.....	139
13.2	Percepatan Pengembangan Infrastruktur di Indonesia.....	141
13.3	Peranan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.....	143

13.4 Masalah yang Dihadapi dan Solusi dalam Percepatan Pengembangan Infrastruktur di Indonesia	146
--	-----

BAB XIV PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI	150
14.1 Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa dan Negara Indonesia	151
14.2 Perwujudan Nyata Terjadinya Globalisasi Ekonomi	153
14.3 Dampak Globalisasi Terhadap Ekonomi	154
14.4 Analisa Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional	157
14.5 Kekuatan/Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi	158
14.6 Faktor Pendorong Kerjasama Antar Negara ASEAN	161
Daftar Pustaka	162
Biografi Penulis	175

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB I

1.1 Pengertian Perekonomian Indonesia

Sebelum kita membahas tentang gambaran perekonomian Indonesia, terlebih dahulu harus di ketahui pengertian dari perekonomian. **Ekonomi** adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya kedalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ekonomi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.

Pendapat Adam Smith, ekonomi adalah "Ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya" (Safri, 2018).

Adapun Paul A. Samuelson dalam buku Economics (1997) menyatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih dengan atau tanpa menggunakan

uang, untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka dapat memiliki penggunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi sekarang dan di masa depan.

Perekonomian atau Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi (Pratama, 2021)

Tata ekonomi Indonesia menurut UUD'45 perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama antara pemerintah dan rakyat. Sebagian besar kegiatan ekonomi dan produksi diusahakan warga masyarakat atas inisiatif dan tanggungjawab sendiri (usaha swasta), tetapi ada juga sejumlah hal yang diatur, dikuasai atau dijalankan sendiri oleh pemerintah (Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, UUD'45 pasal 33).

Menurut Dumairy, perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan.

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia - ekonomi terbesar di Asia Tenggara - memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk meningkatkan ekspor sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah yang dapat menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

1.2 Sejarah Ekonomi Indonesia

Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama ke orde baru bukan saja memberikan iklim politik yang lebih dinamis, tetapi juga kehidupan yang ekonomi yang lebih baik. Pengisian kemerdekaan yang semasa orde lama lebih bertumpu pada urusan politik, pada masa orde baru beralih ke urusan ekonomi. (Dumairy, 1997)

Ada beberapa babakan sejarah perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan diantaranya :

- Masa pemerintahan Ir. Soekarno (Orde Lama)
- Masa pemerintahan Soeharto (Orde baru)
- Masa pemerintahan BJ. Habibie (masa Transisi)
- Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman wahid (Reformasi)
- Masa pemerintahan Megawati (Gotong royong)
- Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia bersatu jilid I dan II)
- Masa pemerintahan Joko Widodo (Kabinet Kerja Jilid I)

Berikut akan diuraikan keadaan ekonomi dan kebijakan ekonomi ditiap-tiap masa pemerintahan Presiden yang pernah menjabat di Indonesia

a. Masa Orde Lama (1945-1965)

Kondisi politik bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan mengalami banyak pergolakan yang mengakibatkan buruknya perekonomian pada masa orde lama. Berikut adalah kondisi politik dan ekonomi masa orde lama (Triastuti & Wijianto, 2021):
Kondisi politik:

1. Indonesia masih menghadapi perang dengan belanda
2. Kurang tanggapnya pemerintah dalam mengatasi gejala politik dalam negeri dan pemeberontakan
3. Buruknya kondisi infrastruktur ekonomi, fisik dan non fisik
4. Manajemen ekonomi makro yang buruk dan stagflasi

Kondisi ekonomi :

1. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan
2. Besarnya pengeluaran dibandingkan pendapatan Negara

3. Kegiatan produksi disektor pertanian dan industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah
4. Tingginya laju inflasi akibat uang beredar yang sangat berlebihan
Kondisi perekonomian Indonesia terdiri atas beberapa periode diantaranya : (Mabil, 2017)
 1. Periode 1945 – 1950 : Struktur ekonomi masih peninggalan zaman kolonialisasi. Ketidakstabilan politik dan perekonomian
 2. Periode 1950 – 1959 : Masa peralihan struktur ekonomi: nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. De Javasche Bank (DJB) menjadi Bank Indonesia (BI, Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi PJKA. KNILM menjadi GIA.
 3. Periode 1959 – 1965: Perubahan struktur ekonomi.

b. Masa Orde Baru (1966-1998)

Yang menjadi misi dasar pemerintahan Orde Baru Suharto adalah pembangunan ekonomi; langkah pertama adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960an. Ini memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara Barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Suharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi (sebagian besar tamatan Amerika Serikat) untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Di akhir 1960an stabilitas harga diciptakan melalui sebuah kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan uang. Kemudian sebuah mekanisme pasar bebas dipulihkan dengan tindakan-tindakan membebaskan kontrol pasar, diikuti dengan implementasi Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968). Kedua undang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di negara ini dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968.

Pertumbuhan Ekonomi Cepat dan Intervensi Pemerintah yang Makin Kuat (1974-1982)

Sampai tahun 1982, pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas minimum 5% dijaga. Fakta lain yang juga penting adalah Indonesia diuntungkan secara signifikan dari *oil boom* yang terjadi di tahun 1970an. Karena *oil boom* ini, pendapatan ekspor Orde Baru dan pendapatan Pemerintah meningkat tajam. Barang-barang modal dan bahan-bahan mentah bisa diimpor karena pendapatan devisa yang makin membesar. Hal ini membangkitkan sektor manufaktur yang berkembang.

Namun, kemudian terjadi kerusuhan besar saat kunjungan Perdana Menteri Jepang di tahun 1974 karena anggapan bahwa ada terlalu banyak proyek-proyek investasi asing di negara ini. Pemerintah merasa terguncang karena kerusuhan ini (yang dikenal sebagai Peristiwa Malari) dan memperkenalkan aturan-aturan yang lebih ketat mengenai investasi asing dan menggantinya dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus yang menguntungkan penduduk pribumi. Meningkatnya pendapatan pemerintah yang didapat dari *oil boom* pertama berarti Pemerintah tidak lagi bergantung pada investasi-investasi asing, dan karenanya pendekatan intervensionis bisa dimulai.

Pertumbuhan Ekonomi Didorong Ekspor dan Deregulasi (1983-1996)

Pada awal 1980an, harga minyak mulai jatuh lagi dan reposisi mata uang di tahun 1985 menambah hutang luar negeri Indonesia. Pemerintah meningkatkan tindakan-tindakan untuk mendukung pertumbuhan yang didorong oleh ekspor (seperti pembebasan bea cukai impor dan penangulangan devaluasi rupiah). Sektor lain yang juga terpengaruh oleh tindakan-tindakan deregulasi yang mendalam adalah sektor keuangan Indonesia. Bank-bank swasta baru diizinkan untuk didirikan, bank-bank yang sudah ada bisa membuka cabang-cabang di seluruh negeri dan bank-bank asing bebas beroperasi di luar Jakarta. Reformasi finansial ini kemudian akan menjadi masalah yang memperkuat krisis di Indonesia pada akhir 1990an.

Namun sebelumnya, tindakan-tindakan ketat ini memiliki dampak positif pada perekonomian Indonesia. Ekspor produk-produk manufaktur mulai menjadi mesin perekonomian Indonesia. Antara 1988 dan 1991 produk domestik bruto (PDB) Indonesia bertumbuh rata-rata 9% setiap tahunnya, melambat menjadi 'hanya' rata-rata 7,3% pada periode 1991-1994 dan meningkat lagi di dua tahun selanjutnya

c. Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie

BJ Habibie bersinar sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. BJ Habibie menjabat wakil presiden 11 Maret - 21 Mei 1998. BJ Habibie menjabat Presiden ke 3 Republik Indonesia dari 21 Mei 1998- 20 Oktober 1999. Masa pemerintahannya dianggap sebagai masa transisi, karena pada masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang dihadapi membuatnya sulit meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik.

Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokrat, terbuka dan lain-lain. Ada nya jaminan sistem demokrasi seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut Upaya-upaya yang dilakukan BJ Habibie Dalam menyelamatkan Krisis Moneter Dalam Bidang Ekonomi yaitu:

1. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi.
2. Merekonstruksi Perekonomian Indonesia
3. Melikudasi bank-bank bermasalah
4. Membentuk badan penyehatan perbankan nasional
5. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp10.000
6. Mengesahkan UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat
7. Mengesahkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (Abdillah, 2018).

d. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman wahid

Abdurrahman wahid atau Gus Dur presiden ke 4 RI yang memerintah dari Bulan Oktober hingga Juli 2001. Pada masa pemerintahan Gus Dur kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Contohnya pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi Negara) mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomian.

Ada pun kebijakan yang dibuat Gus Dur dalam bidang ekonomi:

1. Melawan tekanan IMF
2. Perekonomian tumbuh positif ekonomi untuk pertama kali sejak reformasi
3. Ketimpangan turun.
4. Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 juli 2000 (Wijayanto, 2020)

e. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri

Salah satu kebijakan ekonomi, Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerja sama dengan IMF pada Desember 2003 yang dilanjut dengan privatisasi perusahaan Negara dan investasi bank guna menutup devisa anggaran Negara. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan instruksi Presiden No 5 tahun 2003 tentang kebijakan ekonomi. Yang dampaknya dinilai baik yaitu Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 menjadi Rp 9.100. Tingkat inflasi menuurun dari 131,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik (Persada,2017).



MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI REFORMASI PASCA PROGRAM IMF

Era Presiden Megawati Soekarnoputri ditandai dengan berakhirnya program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003

Pada 15 September 2003, pemerintah menerbitkan **Instruksi Presiden No. 5/2003** tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF pada Desember 2003 yang mencakup sejumlah sektor, beberapa di antaranya



Sumber: <https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-pasca-imf>

f. Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Meski naik-turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69 persen pada 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5 persen. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tepatnya 6,35 persen.

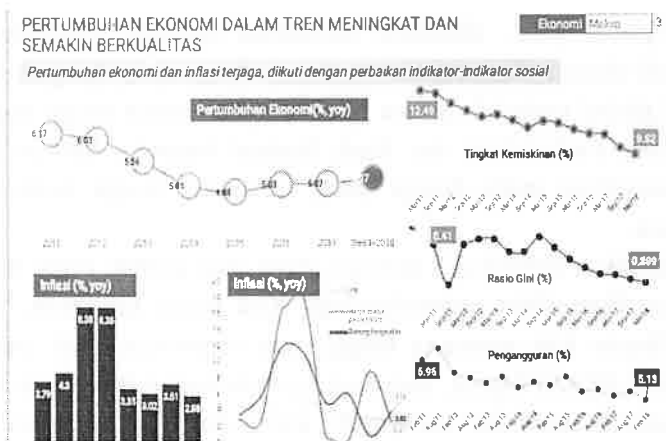
Lalu, pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen meski turun tipis ke angka 6,01 persen. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua

kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen. Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik.

"Saat Bank Sentral AS menarik dana dari publik, tidak injeksi lagi, harga komoditas melambat lagi. Kita mulai keteteran," kata Lana. "Ekspor kita memang tinggi, tapi impornya lebih tinggi," tambah dia. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik di dunia. Lalu, pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22 persen. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49 persen, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6 persen pada 2012 yaitu di level 6,23 persen. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan capaian 5,56 persen pada 2013 dan 5,01 persen pada 2014. (Kompas, 2018).

g. Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Masa pemerintahan Joko Widodo merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran 5 persen dan terus meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun sempat mengalami penurunan 4,88 persen di tahun 2015, peningkatan ekonomi naik di tahun 2016 dan terus naik hingga tahun ini semester I 2018 sebesar 5,17 persen. Selain itu, angka pengangguran juga terus menurun mencapai 5,13 persen dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Tingkat inflasi pada kisaran 3 persen yang menjaga daya beli masyarakat dan memberi ruang bagi dunia usaha. Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan juga menurun pada level satu digit 9,82 persen serta rasio Gini di level 0,389. (Humas-Sekretariat kabinet RI, 2018)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kemenko Perekonomian

1.3 Pembangunan Ekonomi Nasional

a. Pengertian Pembangunan Ekonomi Nasional

Bangsa Indonesia bertekad untuk membangun Negara R.I menjadi suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, dengan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk itu pola dasar dan arah pembangunan nasional dituangkan dalam GBHN dan dilaksanakan secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Repelita. Sasaran pembangunan ekonomi adalah struktur ekonomi yang seimbang, dimana kekuatan industri didukung oleh bidang pertanian (Gilarso 1986).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan menghitung adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara (Mulyati, 2020).

Konsep pembangunan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan (development) adalah suatu konsep yang lebih luas. Konsep ini mencakup modernisasi lembaga, baik bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, seperti pemerintah, kota, desa, cara berpikir tidak saja yang berkenaan dengan tujuan agar dapat mengkonsumsi secara rasional dan hidup lebih baik. Ke

semua itu membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan mendahului atau berbarengan dengan perubahan sosial (Sicat,1991).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas jangka panjang untuk memproduksi barang dan jasa. Kapasitas ini bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Secara konvensional, pertumbuhan diukur dengan kenaikan pendapatan nasional (PNB, GNP) per kapita (Sicat,1991).

b. Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator telah terjadinya pembangunan ekonomi adalah (Mulyati, 2020) :

- Terjadinya peningkatan pendapatan nasional
- Terjadinya peningkatan produk nasional (PNB)
- Terbukanya kesempatan kerja
- Perekonomian stabil
- Surplus neraca pembayaran luar negeri
- Distribusi pendapatan merata

c. Masalah Pembangunan Ekonomi

Berikut beberapa masalah pembangunan ekonomi :

- Kemiskinan
- Pengangguran
- Ketimpangan dalam distribusi pendapatan
- Tingginya angka pertumbuhan penduduk

1.4 Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan atau perencanaan ekonomi nasional adalah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi, mengarahkan dan dalam beberapa hal, mengendalikan perubahan-perubahan konsumsi, tabungan, penanaman modal atau perdagangan internasional dalam kurun waktu tertentu. Sasaran pokok perencanaan ekonomi adalah mendorong pembangunan ekonomi. Itulah alasannya mengapa rencana yang kita dapati di Negara-negara sedang berkembang sering disebut rencana pembangunan (Sicat,1991).

Ada beberapa jenis perencanaan:

- Rencana anggaran fiskal
- Rencana sektor pemerintah
- Perencanaan sasaran untuk sektor pemerintah dan sektor swasta
- Perencanaan yang didesentralisasi yang mencakup sektor swasta dan sektor pemerintah
- Perencanaan terpusat.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah (Mulyati, 2020).

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk setiap periode 5 (lima) tahun.
- c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan APBN.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk setiap periode 5 (lima) tahun.

SISTEM EKONOMI INDONESIA

BAB

II

2.1 Sistem Ekonomi

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (komponen dan unsur) yang bekerja secara bersama dengan melaksanakan sesuatu maksud. Jika dikaitkan dengan ekonomi sistem ekonomi dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut tergantung pada unsur dan komponen yang terlibat dalam perekonomian. Unsur-unsur yang terlibat dalam perekonomian antara lain manusia sebagai subjek, barang dan jasa sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur kehidupan perekonomian termasuk lembaga ekonomi cara kerja peraturan kebiasaan perilaku dan etika masyarakat. Sistem ekonomi lahir sekitar tahun 1960-an yang saat itu terdiri dari dua sistem ekonomi yang berlaku yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dasar yang membedakan antara ke-2 sistem tersebut adalah peranan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. (Machmud, 2016)

2.2 Sistem Perekonomian Indonesia

Dalam pidato yang diucapkan oleh wakil presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946 dikatakan bahwa dasar politik perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam undang-undang Dasar 1945 dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Dalam pidato itu Mohammad Hatta dalam kedudukannya sebagai wakil presiden menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong ialah koperasi. Seluruh perekonomian rakyat harus

berdasarkan koperasi. katanya lebih lanjut: tetapi tidak segala usaha dilakukan secara koperasi. dikatakan selanjutnya bahwa usaha-usaha yang dapat dikerjakan oleh orang seorang dengan tidak menguasai hidup orang banyak boleh lah terus dikerjakan oleh orang seorang itu.

Sementara itu, Sumitro djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan "*School of Advanced International studies*" Washington, D.C. tanggal 22 Februari 1949 juga menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah suatu macam ekonomi campuran: lapangan tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha partikelir. (Suroso, 1994)

Di Indonesia, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Landasaan idiil dari sistem ekonomi Pancasila tentu saja adalah Pancasila. Tidak hanya itu, sistem ekonomi Pancasila juga disebutkan dalam UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat 1-4. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. (Sereliciouz, 2020)

A. Pengertian Sistem Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan senilai kurang lebih USD 940,9 miliar (2016). Pada tahun 2014, sektor jasa adalah pemberi kerja yang paling menonjol di Indonesia, menyumbang 45 persen dari pekerja lokal (dibandingkan dengan hanya sepertiganya pada tahun 1990). Ini diikuti oleh sektor pertanian yang mempekerjakan 34 persen pekerja lokal (turun dari 56 persen pada tahun 1990) dan sektor industri (termasuk manufaktur) yang menyumbang 21 persen pekerja lokal (menjadi lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir). Perekonomian Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara tetangganya di Asia, seperti Singapura

dan Thailand. Secara khusus, perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh aktivitas domestik daripada ekspor, yang membantu meredamnya dari krisis global 2008-2009. Sebelum krisis ekonomi Asia melanda pada tahun 1997, PDB Indonesia berada di peringkat ke-22 dunia dengan nilai Rp624.337 miliar. Nilai ini setara dengan pendapatan tahunan per kapita sekitar AUD 705. Perekonomian berkontraksi pada tahun 1998, tetapi kembali tumbuh pada tahun 1999 didukung oleh peningkatan belanja pemerintah dan konsumen. Tahun-tahun pertumbuhan ekonomi berikutnya telah mengangkat Indonesia ke dalam 20 ekonomi teratas dunia, menjadikannya sebagai anggota kelompok negara G20.

Dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1); “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (ayat 2); “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (ayat 3). (sumber : UUD 45 pasal 33).

Ketiga ayat ini dimuat baik di UUD 45 sebelum diamandemen maupun di UUD 45 setelah diamandemen. Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun pada UUD 1945, setelah diamandemen, ditambah ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi

lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar, pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang maupun jasa melalui penawaran dan permintaan (Bennylin, 2011).

2.3 Ciri- ciri Sistem Perekonomian Indonesia

Gregory & Stuart dalam *The Global Economy and its Economic Systems* (2013) menjelaskan bahwa sistem ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- **Metode kontrol atas faktor atau alat produksi**

Metode-metode kontrol atas faktor-faktor dan alat-alat produksi ini termasuk kepemilikan dan hak-hak properti atas alat-alat produksi yang menimbulkan klaim terhadap hasil produksi. Alat-alat produksi dapat dimiliki secara pribadi oleh negara, pengguna atau dimiliki bersama.

- **Sistem pengambilan keputusan**

Sistem pengambilan keputusan ini menentukan siapa yang berhak membuat keputusan atas kegiatan ekonomi. Agen ekonomi dengan kekuatan pengambilan keputusan dapat menandatangani kontrak yang mengikat satu sama lain.

- **Mekanisme koordinasi**

Mekanisme koordinasi ini menentukan bagaimana informasi diperoleh dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dua bentuk koordinasi yang dominan adalah perencanaan dan pasar. Perencanaan dapat berupa desentralisasi atau tersentralisasi. Dan dua mekanisme koordinasi tersebut tidak saling eksklusif dan sering berdampingan.

- **Sistem insentif**

Sistem insentif ini mendorong dan memotivasi agen ekonomi untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Sistem insentif didasarkan pada imbalan materi (kompensasi atau kepentingan pribadi) atau bujukan moral. Bujukan moral misalnya gengsi sosial atau melalui pengambilan keputusan demokratis yang mengikat mereka yang terlibat. Sistem insentif dapat mendorong spesialisasi dan pembagian kerja.

- **Bentuk organisasi**

Ada dua bentuk dasar organisasi dalam sistem ekonomi yaitu pelaku (aktor) dan pembuat aturan (regulator). Pelaku ekonomi meliputi rumah tangga, kelompok kerja dan tim produksi, perusahaan, usaha patungan dan kartel. Organisasi pengatur ekonomi diwakili oleh negara dan otoritas pasar (swasta maupun publik).

- **Sistem distribusi**

Sistem distribusi mengalokasikan hasil dari kegiatan produksi yang didistribusikan sebagai pendapatan di antara organisasi ekonomi, individu dan kelompok dalam masyarakat. Seperti pemilik properti, pekerja atau negara (dari pajak).

- **Mekanisme pilihan publik**

Mekanisme pilihan publik untuk pembuatan hukum, menetapkan aturan, norma dan standar, dan memungut pajak. Biasanya, ini tanggung jawab negara, tetapi ada cara lain untuk pengambilan keputusan bersama yaitu melalui kamar dagang atau dewan pekerja.

Meski setiap sistem ekonomi punya ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, namun ciri yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 adalah :

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- Negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik.
- Masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. (UUD 1945 pasal 33)

2.4 Penerapan Sistem Perekonomian Indonesia

Penerapan sistem ekonomi di Indonesia menggunakan sistem ekonomi demokrasi, pancasila, dan kerakyatan.

Sistem ekonomi demokrasi: suatu sistem ekonomi dimana rakyat merupakan pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di negara tersebut. Sistem ekonomi pancasila: suatu sistem ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai pelaku utama, memperhatikan sektor koperasi, dan mengembangkan kekuatan moral masyarakat Sistem ekonomi kerakyatan: suatu sistem ekonomi dimana rakyat tetap berperan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonominya banyak didasarkan pada mekanisme pasar.

Ketiga sistem ini cocok dengan kepribadian Indonesia yang mempunyai dasar ideologi Pancasila. Jika sistem ekonomi tersebut dilaksanakan dengan baik dan jujur, Indonesia pasti akan menjadi negara yang mempunyai tingkat ekonomi yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang para pelaku ekonomi mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi tersebut, sehingga sistem ekonomi di Indonesia tidak terselenggara dengan baik. (Anggelinelia, 2019)

Tujuan Sistem Perekonomian Indonesia

- ✦ Meningkatkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- ✦ Meratakan suatu distribusi pendapatan di berbagai golongan.

- ✚ Meningkatkan sebuah pertumbuhan dan kestabilan ekonomi.
- ✚ Memperluas sebuah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- ✚ Menentukan berbagai jenis, jumlah, dan cara atau teknik menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat.
- ✚ Mengalokasikan Produk Nasional Bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, menggantikan stok modal, dan investasi.
- ✚ Mendistribusikan Pendapatan Nasional (PN) diantara para anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa.
- ✚ Memelihara dan juga meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi dengan luar negeri. (Guru Ekonomi, 2021)

2.5 Konsep Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan dan Penerapannya di Indonesia –

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi di negara itu. Saat ini di dunia berkembang banyak konsep tentang sistem ekonomi yang bisa diterapkan. Mohammad Hatta adalah seorang negarawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual di awal-awal kemerdekaan. Salah satunya adalah gagasan tentang ekonomi kerakyatan.

Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara. konsep ekonomi kerakyatan sangat dipengaruhi oleh tiga jenis tradisi. Dinamika politik internasional pada awal abad ke-20 seperti kebijakan politik etis Belanda, kekalahan Rusia atas Jepang, Revolusi Komunis, dan Depresi Besar Eropa juga turut mempengaruhi proses pemikiran Hatta dalam melahirkan gagasan ini. Semua peristiwa-peristiwa besar dunia ini akhirnya mendorong Hatta melahirkan sebuah pemikiran bahwa bukan “isme-isme” bangsa Eropa yang akan menolong Indonesia, tapi pemikiran atau “isme” yang digali dari kehidupan dan

kebudayaan Indonesia sendirilah yang akan melakukannya. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi “jalan tengah” yang digagas Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat itu. Kegagalan konsep ekonomi kerakyatan ini justru lahir dari perubahan regulasi yang memudahkan semangat egaliter koperasi. Regulasi yang akhirnya menempatkan koperasi hanya sekedar sebagai badan usaha membuatnya menjadi tidak bisa berkembang seperti koperasi negara lainnya, seperti Saemaul Undong di Korea Selatan, ataupun Federal Land Development Authority (FELDA) di Malaysia. Selain itu, konstelasi politik pada saat Hatta hidup juga tidak memungkinkan penerapan gagasan Hatta dijalankan dengan baik. Seperti telah tercatat sejarah, Hatta lebih dikenal sebagai seorang negarawan intelektual, tanpa peranan yang cukup berpengaruh dalam partai politik manapun pada saat itu. (Zon, 2016).

Menurut Para Ahli Pengertian Ekonomi Kerakyatan:

Menurut Mubyarto, dalam bukunya yang berjudul : Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil (Mubyarto, 1999).

Ekonomi Kerakyatan menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul: Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat. (Zulkarnain, 2006)

Penjelasan pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut

perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Dan pendekatan kedua ini juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi kerakyatan.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sekarang.

Prinsip dasar dari Sistem Ekonomi Kerakyatan

Prinsip dasar dari sistem ekonomi kerakyatan tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Pasal 33 Ayat 1, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*"
2. Pasal 33 Ayat 2, "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*"
3. Pasal 33 Ayat 3, "*Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*" (UUD 1945)

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Di dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap masyarakat dituntut untuk bisa berperan aktif di dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Sebaliknya, sistem ini pun akan menuntut

pemerintah negara agar mampu merealisasikan dan juga suasana yang lebih kondusif untuk perkembangan di dalam dunia bisnis (Ahmad, 2021).

Sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi rakyat tentu mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti dibawah ini:

1. Beracuan pada sistem pasar yang adil dengan mengaplikasikan konsep persaingan sehat
2. Memperhatikan pertumbuhan laju ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan secara berkelanjutan
4. Menjamin peluang yang sama dalam berusaha dan bekerja
5. Adanya sebuah perlindungan yang diberikan kepada hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. (linovHR, 2021)

2.6 Konsep Operasional Ekonomi Kerakyatan

Peninjauan kembali kebijakan BLM (*Grant*)

Dalam rangka mengembangkan usaha menengah menjadi usaha besar, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha mikro menjadi usaha kecil, salah satu kendala yang dihadapi adalah modal untuk investasi dan modal untuk kerja. Karena jangkauan pasar yang masih terbatas, teknologi yang digunakan belum efisien, dan manajemen usaha yang belum efisien, maka resiko kegagalannya cukup tinggi. Tingginya resiko gagal menyebabkan resiko investasinya juga besar. Tingginya resiko investasi dan rendahnya pemilikan *collateral*, menyebabkan lembaga keuangan bank kurang berminat memberi pinjaman kepada UKM. Jumlah dana yang diberikan bank kepada UKM jauh dibawah tingkat permintaan UKM. Kekurangan pasokan ini selanjutnya diisi oleh lembaga kredit non bank, seperti KOSIPA, dan pengijon, dengan tingkat bunga jauh di atas tingkat bunga pasar. Intervensi pemerintah, melalui dana bantuan langsung ke masyarakat, seperti dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan program sejenis, ternyata kurang efektif dan kurang efisien. Kelembagaan keuangan

mikro (*micro finance*) yang terbentuk dari program-program dimaksud, tingkat keberlanjutannya rendah, dan hampir tidak mampu memecahkan permasalahan tingkat suku bunga yang tinggi. Selain itu juga banyak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah dan membutuhkan biaya *delivery* yang tinggi.

Dari permintaan kredit yang cukup besar dari lembaga keuangan non bank, walaupun dengan tingkat bunga di atas bunga pasar, membuktikan bahwa yang dibutuhkan unit produksi rakyat sebenarnya bukan subsidi bunga dan bukan dana *block grant*, tetapi akses untuk mendapatkan pinjaman ke bank.

Peninjauan Kembali Kebijakan Subsidi Bunga

Asumsi bahwa UKM membutuhkan subsidi bunga untuk mendorong perkembangannya, ternyata tidak benar. Pemberian subsidi bunga ternyata justru mendorong permintaan uang bukan untuk produksi tetapi untuk konsumsi dan spekulasi. Meningkatnya permintaan uang karena subsidi bunga ini justru akan mendorong timbulnya inflasi yang tinggi. Tingkat bunga tinggi yang ditawarkan oleh *money lender* ternyata selalu mengalami *market clearing*. Artinya yang dibutuhkan Unit Produksi Rakyat, bukan subsidi bunga tetapi akses untuk mendapatkan pinjaman di lembaga keuangan bank. Untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan bank, yang dibutuhkan bank adalah garansi atau jaminan. Dengan demikian yang dibutuhkan oleh unit produksi rakyat sebenarnya adalah jaminan pemerintah kepada bank.

Kebijakan Fiskal

Alokasi Anggaran untuk Penjaminan Kredit untuk Unit Produksi Rakyat

Seperti telah dikemukakan, bahwa yang dibutuhkan Unit Produksi Rakyat (UPR bukan UKM) sebenarnya bukan subsidi bunga dan bukan dana *block grant*, tetapi akses untuk mendapatkan pinjaman ke bank. Dengan demikian, intervensi yang diperlukan dari pemerintah adalah adanya penjaminan kredit untuk UKM. Mengapa perlu penjaminan, sebab bank adalah *risk aversion*

sehingga tidak berminat memberikan kredit kepada UKM yang memang memiliki *default risk* tinggi. Tidak efektifnya kebijakan *credit rationing* dengan mewajibkan bank menyalurkan 20 persen kredit kepada UKM dengan subsidi bunga dari pemerintah, adalah argumentasi yang cukup kuat tentang perlunya penjaminan pemerintah untuk kredit UKM. Bunga atas deposito dana penjaminan ini selanjutnya untuk biaya fasilitasi UPR. Fasilitasi UPR ini dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. pelibatan LSM dalam proses fasilitasi dengan biaya dari bunga deposito ini sekaligus dapat digunakan sebagai pembinaan LSM agar tidak digunakan oleh kepentingan asing (lembaga donor). Sebab, ketergantungan yang begitu besar dari LSM terhadap lembaga donor, telah membawa sebagian besar LSM menjadi alat kepentingan politik dan kepentingan ekonomi asing. Strategi ini, selain tidak akan membebani anggaran belanja pemerintah yang terlalu besar, membantu penyehatan perbankan dalam negeri, juga bagian dari pembelajaran bagi UKM untuk terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan bank dan pembelajaran bagi UKM untuk mandiri dan efisien.

Kebijakan Perpajakan

Untuk mendorong UKM bergabung (baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri), maka UKM yang bergabung menjadi UPR diberi keringanan pajak. Demikian pula kepada perusahaan perkebunan inti rakyat yang bersedia menjual sahamnya kepada petani plasma, sehingga menjadi UPR, diberi keringanan pajak, baik pajak penjualan maupun pajak penghasilan.

Kebijakan Pertanian

Lahan dalam perekonomian merupakan faktor modal yang penting. Meningkatnya jumlah petani *landless* dalam 3 dekade terakhir, dan hilangnya spesifikasi pemilikan komunal atas sumber daya hutan, merupakan ancaman serius dalam membangun ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, perlindungan bagi masyarakat adat atas tanah ulayat, perlindungan petani melalui

sertifikasi tanah, perlu dilakukan. Kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan bagi masyarakat adat untuk memperoleh hak pemilikan atas tanah ulayat, akan membantu penguatan ekonomi rakyat. Perusahaan Hutan Rakyat (bukan HPH tetapi mirip HPH hanya pemilikan sahamnya adalah oleh masyarakat adat setempat), akan dapat dibangun bila pemerintah mengakui hak pemilikan hutan ulayat. Demikian juga Perusahaan Perkebunan Rakyat (bukan Perkebunan Inti Rakyat, tetapi mirip PIR hanya pemilikan sahamnya oleh masyarakat adat setempat), akan dapat dibangun bila pemerintah mengakui hak pemilikan hutan rakyat.

Kebijakan Sektor Riil

Kebijakan Upah

Dari model ekonomi *income* masyarakat, salah satu sumber pendapatan masyarakat adalah dari upah dan gaji atau W . Rendah tingginya upah dan gaji yang diterima, tergantung dari tingkat upah perjam/bulan (\bar{w}), lama jam kerja (t), dan jumlah anggota keluarga yang bekerja (H). Tinggi rendahnya tingkat upah dan gaji ditentukan oleh kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga sikap mental (etos kerja, profesionalitas, dan kedisiplinan). Lama jam kerja dan jumlah anggota keluarga yang bekerja ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja.

Kebijakan penetapan batas Upah Minimum Regional (UMR), seperti yang selama ini digunakan pemerintah dalam melindungi kaum pekerja, sebenarnya tidak memecahkan permasalahan ketenagakerjaan. Kebijakan UMR justru menghambat tumbuh dan perkembangannya UKM dan mendorong laju pengangguran. Intervensi pemerintah secara langsung dalam menentukan upah dan gaji pekerja, justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih serius, seperti pengangguran dan permasalahan sektor informal. Perbaikan gaji dan upah, seharusnya diserahkan melalui mekanisme pasar tenaga kerja.

Oleh sebab itu, dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan dari sisi ketenagakerjaan, harus ada kebijakan baik disisi *demand* maupun di sisi *supply*. Di sisi *supply*, intervensi yang

dibutuhkan dari pemerintah adalah peningkatan kualitas tenaga kerja. Sedang di sisi *demand*, intervensi yang diperlukan dari pemerintah adalah perluasan lapangan kerja. Perluasan lapangan kerja dapat dilakukan melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter, penumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif, dan industrialisasi di perdesaan. (Yatmo, 2001).

KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

BAB III

3.1 Pengertian Ketenagakerjaan dan Pengangguran

A. Pengertian ketenagakerjaan

1. Menurut Perundang Undangan

Pengertian ketenagakerjaan menurut undang undang no.13 tahun 2013 bukan hanya sebatas kegiatan pada masa kerja saja. Menurut peraturan tersebut ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik.

Dalam UU 1945 amandemen 2020, Ketenagakerjaan tertulis dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Menurut Para Ahli

Berikut ini ada beberapa pengertian ketenagakerjaan menurut para ahli :

a. Dr.A.Hamzah SH

Menurut Dr.A.Hamzah SH menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja dengan alat produksi utama sebagai proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran (Hamzah,1990).

b. Alam

Tenaga kerja adalah penduduk dengan usia antara 17 sampai 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan uang sendiri.

Pengertian mengenai ketenagakerjaan bagi Indonesia menurut para ahli yang mengemukakan memiliki pendapat masing-masing. Untuk lebih memahami tentang tujuan dibentuknya hukum ketenagakerjaan berikut ini :

Tujuan Dibentuknya Hukum Ketenagakerjaan:

Jika di Indonesia diatur oleh Hukum, maka ketenagakerjaan juga berhubungan dengan hukum sebagai tenaga kerja pada waktu sebelum, sesudah hingga selama orang tersebut bekerja. Hingga akhirnya mencapai tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan sistem tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarga berupa kesejahteraan.

B. Pengertian Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang.

Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Sedangkan Nanga berpendapat bahwa pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan serta tidak secara aktif mencari pekerjaan saat itu. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif (Amidan,2005).

3.2 Jenis-jenis Ketenagakerjaan dan Pengangguran.

A. Jenis Ketenagakerjaan

1. Tenaga Kerja Berdasarkan Kualitas

Jika melihat dari sisi kualitas maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya, guru, dokter, pengacara, polisi, dan lain sebagainya. Tenaga Kerja Terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum dapat bekerja. Contohnya, tukang pahat, tukang jahit, supir, dan montir. Tenaga Kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu, pekerjaan dapat dilakukan bagi yang memiliki kemauan. Contohnya, tukang sapu, tukang sampah, tukang parkir, kuli bangunan.

2. Tenaga Kerja Berdasarkan Sifat

Jika melihat dari sifatnya maka tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu : Tenaga Kerja Rohani adalah tenaga kerja yang cenderung lebih memanfaatkan kemampuan otaknya dalam bekerja. Tenaga kerja ini biasanya adalah orang yang bekerja di tempat yang relatif bersih dan nyaman seperti perkantoran. Contohnya, manajer perusahaan, direktur, maupun pejabat negara. Tenaga Kerja Jasmani adalah tenaga kerja yang dituntut untuk menggunakan tenaganya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, buruh suatu pabrik maupun buruh tani.

3. Tenaga Kerja Berdasarkan Hubungan dengan Produk

Berdasarkan hubungan dengan produk, maka jenis tenaga kerja ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Tenaga Kerja Langsung adalah mereka yang bekerja dan turun langsung dalam proses pembuatan atau produksi suatu produk. Biasanya, dalam sebuah perusahaan yang besar, jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan terbilang sangat banyak guna mempercepat proses produksi.

Contohnya, para pekerja seperti tukang jahit di perusahaan tekstil.

- b. Tenaga Kerja Tak Langsung yaitu orang yang cenderung memiliki tugas lebih ringan (secara fisik) karena tugasnya bukanlah membuat tetapi merencanakan dan mengawasi produksi. Mereka yang tergolong tenaga kerja tak langsung biasanya memiliki pendidikan yang tinggi. Contohnya, manager, supervisor, maupun direktur.

4. Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan pada jenis pekerjaan yang dilakukan, maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Tenaga Kerja Lapangan adalah tenaga kerja yang bekerjanya terjun langsung ke lapangan bahkan terkadang berhubungan langsung dengan pelanggan. Contohnya, marketing lapangan.
- b. Tenaga Kerja Pabrik yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik, biasanya di bagian produksi.
- c. Tenaga Kerja kantor adalah tenaga kerja yang bekerjanya di kantor, seperti tenaga administrasi dan keuangan. Mereka biasanya adalah orang-orang yang terpilih dengan kemampuan atau keahlian khusus (Abrol,2021).

B. Jenis jenis Pengangguran

Di Indonesia ada beberapa jenis pengangguran secara umum yakni:

1. Setengah Menganggur

Orang-orang yang termasuk dalam setengah menganggur adalah ketika tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal.

Biasanya pengangguran jenis ini juga memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.

2. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal akan tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab

utamanya. Tak hanya itu, pencari kerja yang berhenti karena mencari kesempatan yang lebih baik.

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi ketika adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Selain itu resesi yang panjang sering menciptakan jenis pengangguran struktural. Para pekerja yang menganggur terlalu lama perlahan akan kehilangan keterampilan mereka dan kondisi ini menyebabkan peningkatan pengangguran alami yang lebih tinggi.

4. Pengangguran Musiman

Sesuai dengan namanya, jenis pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim di suatu daerah atau negara. Misalnya saja petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen tetapi setelah itu mereka akan menganggur.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang cukup sering terjadi di era saat ini. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi.

6. Pengangguran Siklis

Jenis pengangguran ini disebabkan karena pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Ketika ekonomi sedang naik, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja, dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang bergerak ke bawah, pengangguran meningkat, ketika perusahaan membiarkan pekerja pergi, dan berhenti mempekerjakan mereka dengan cepat sebelum pensiun, seperti yang mereka lakukan dalam periode ekonomi yang kuat.

3.3 Potensi dan Permasalahan Tenaga Kerja dan Pengangguran

Masalah Pengangguran dan ketenagakerjaan merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua persalahan tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi.

A. Potensi Tenaga kerja dan Pengangguran di Indonesia

1. Bonus demografi

Bonus demografi dapat dikatakan sebagai sumberdaya atau juga menjadi tantangan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara. Yang dalam sejarah perkembangan suatu bangsa, bonus demografi hanya ada satu kali.

Jika mampu memanfaatkan maka akan tercipta jendela kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan. Namun juga sebaliknya jika tidak mampu memanfaatkan akan menjadi masalah dalam suatu negara. Berdasarkan data dari BPS di jelaskan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi dalam beberapa tahun kedepan yang puncaknya pada tahun 2025. Dimana pada tahun tersebut usia angkatan kerja atau tenaga kerja kita melimpah, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam memanfaatkanya.

2. Globalisasi

Dampak globalisasi perekonomian yang terjadi di seluruh negara di dunia. Globalisasi sendiri merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan antar negara diseluruh dunia yang menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Dengan adanya globalisasi batas

batas secara ekonomi menjadi semakin kabur dan sempit. Sementara arus globalisasi dalam bentuk TTA, WTO, NAFTA dan lainnya, akan semakin intensif.

3. Potensi unggulan daerah

Sumber daya alam yang masih melimpah di setiap daerah di Indonesia juga merupakan peluang dan modal dasar dalam percepatan pembangunan. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan optimal maka akan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan suatu bangsa.

B. Permasalahan Tenaga Kerja dan Pengangguran di Indonesia

1. Daya saing tenaga kerja

Dari berbagai survey yang dilakukan oleh BPS dapat disimpulkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia relatif masih rendah dibandingkan dengan daya saing negara tetangga. Rendahnya daya saing di sebabkan rendahnya mutu SDM sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi kerja dan kecocokan skill dengan kecocokan pekerjaan.

2. Pasar kerja tenaga kerja

Masih rendahnya peningkatan pasar kerja di bandingkan peningkatan jumlah tenaga kerja, meski pertambahan lapangan kerja selama 5 tahun terakhir cukup banyak dibandingkan pertambahan angkatan kerja. Kondisi menyebabkan kelebihan tenaga kerja (*labour surplus economy*). Disamping itu kondisi pasar kerja juga pada pasar yang kurang berkualitas sehingga produktivitas dari tenaga kerja juga masih rendah

3. Hubungan industrial

Masih belum terjalinnya hubungan Industrial antara pemerintah, pekerja dan perusahaan dengan baik. Mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja dan salah satu penyebab pengangguran sistem hubungan yang terbentuk antarapelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah. Permasalahannya hubungan industrial saat ini masih belum harmonis. Seperti : peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB),

lembaga kerja sama (LKS) bipartit, lembaga kerja sama (LKS) tripartit, peran SP/SB dan asosiasi pengusaha.

4. Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan juga masih sangat rendah di Indonesia. Ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran dalam hubungan kerja, jam kerja, kerja lembur dan upah antara tenaga kerja dan perusahaan.

5. Link and Match

Ketidak sesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja dalam mendapatkan pekerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian juga merupakan permasalahan dalam menciptakan pengangguran di Indonesia.

Link and Match merupakan konsep keterkaitan dan kesepadanan antara skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan kerja yang dibutuhkan. Link and Match masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia (Wijayanto & Olde, 2020).

3.4 Peran Pemerintah dalam Rangka Penanganan Masalah Pengangguran

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar. Salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. (Nissar, 2016).

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2.

Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu :

- 1) Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar.
Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
- 2) Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.
- 3) Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.
- 4) Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

- 5) Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.
- 6) Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisir menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.
- 7) Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. (Hia, 2013).

PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

BAB IV

4.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Kenaikan Produktivitas

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic grow*) didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas ini bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Secara konvensional pertumbuhan diukur dengan kenaikan pendapatan nasional (PNB. GNP) per kapita (Sicat & Arndt, 1991).

B. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi

Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2013):

1. Barang Modal

Agar ekonomi bertumbuh, stok barang modal harus ditambah. Karena itu, salah satu upaya pokok untuk meningkatkan investasi adalah menangi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat investasi. Yang harus diingat adalah pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar daripada nol. Sebab, jika investasi neto sama dengan nol, perekonomian hanya dapat memproduksi pada tingkat sebelumnya. Akan lebih baik lagi, jika penambahan kuantitas barang modal juga disertai peningkatan kualitas.

2. Tenaga Kerja

Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja akan terus meningkatkan output. hal itu sangat tergantung dari seberapa

cepat terjadinya *The Law of Diminishing Return* (TLDR). Sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan keterkaitannya dengan kemajuan teknologi produksi. Selama ada sinergi antara tenaga kerja dan teknologi, penambahan tenaga kerja akan memacu pertumbuhan ekonomi.

3. Teknologi

Hampir dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi, jika hanya dilihat dari peningkatan output. Namun, akan ada korban antara kemajuan teknologi dan kesempatan kerja. Lebih dari itu, kemajuan teknologi telah makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya bangsa-bangsa maju (Barat dan Jepang) serta dunia ketiga atau (NSB).

4. Uang

Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Uang akan sangat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, selama penggunaannya sangat efisien. Tingkat efisiensi penggunaan uang juga sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem perbankan.

5. Manajemen

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik, terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi tinggi. Ada perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi yang tinggi, namun berkat manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

6. Kewirausahaan (Entrepreneurship)

Kewirausahaan cukup didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil resiko guna memperoleh keuntungan. Keberanian itu bukan asal-asalan. Para pengusaha mempunyai

perkiraan yang cukup matang bahwa input yang dikombinasikan akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, atau menjadi barang dan jasa, yang akan dibutuhkan masyarakat. Kemampuan mengkombinasikan input ini dapat disebut dengan kemampuan inovasi.

7. Informasi

Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang (*perfect and simetric information*). Kegagalan pasar merupakan akibat tidak terpenuhinya asumsi ini. Tuntutan gerakan reformasi Indonesia berupa transparansi dan kebebasan informasi (pers), dilihat dari teori ekonomi, dapat dibenarkan. Sebab, makin banyak, makin benar dan makin seimbang arus informasi, para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik. Alokasi sumber daya ekonomi makin efisien. Dengan sumber daya yang sama, dihasilkan output yang lebih banyak. Informasi amat menunjang pertumbuhan ekonomi. (Primandari, 2018).

C. Pengertian Kenaikan Produktivitas

Pada tingkat perusahaan, produktivitas diartikan secara umum sebagai konsep yang bersistem yang berkaitan dengan perubahan input ke dalam output oleh sistem tersebut. Konsep dinamik ini dapat didefinisikan lebih spesifik sebagai output yang berhubungan dengan ke empat input sumberdaya perusahaan yang utama (Adam & Ebert).

D. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Produktivitas

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas menurut (Sumanth, 1984), yaitu :

1. Jumlah investasi,
2. Rasio modal investasi dengan tenaga kerja,
3. Penelitian dan pengembangan (*research and development*),
4. Kapasitas terpakai,
5. Peraturan pemerintah,
6. Umur pabrik beserta peralatan,

7. Biaya energi,
8. Semangat kerja.
9. Ketakutan hilangnya lapangan pekerjaan,
10. Management,
11. Etos/etika kerja,
12. Pengaruh relasi, -

4.2 Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi penting atau sebuah keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, karena jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun sehingga kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Jadi, dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat serta merata, dan harus disertai program pembangunan sosial (Amir, 2016).

B. Teori pertumbuhan ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Teori pertumbuhan ekonomi Historis
2. Teori pertumbuhan ekonomi Klasik
3. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik
4. Teori pertumbuhan ekonomi Kuznets

C. Perubahan Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi jangka panjang (PDB/PN) merubah struktur ekonomi dari pertanian menuju industri (sektor

non primer) terutama industri manufaktur dengan *increasing return to scale*. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pendapatan perkapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi/transformasi struktural merupakan serangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam *aggregate demand*, perdagangan LN, dan *aggregate supply* untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi struktural, dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), AS (produksi dan menggunakan faktor-faktor produksi yang diperlukan mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan) Perubahan struktur ekonomi yang demikian coraknya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Sifat manusia dalam kegiatan konsumsi, Perubahan Teknologi, Faktor-faktor dari sisi permintaan agregat (AD), Faktor-faktor dari sisi penawaran agregat (AS), Intervensi pemerintah di dalam kegiatan ekonomi dalam negeri, Sumber Internal (*domestik*) dan Sumber Eksternal (*dunia*). (Octafiani dkk, 2013).

D. Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid -19

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan naik turun di tahun 2020, terutama memasuki masa pandemi Covid-19. Faktor subjektifitas sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor penting yang berperan adalah rendahnya pendapatan per jiwa penduduk dan besarnya *carry over* angkatan kerja yang berlangsung di bawah tekanan kondisi eksternal yang sangat rawan, yakni tercermin pada tingginya beban utang luar negeri. Hal ini disebabkan terlalu tergantung pada produk impor yang menggerus produktifitas tenaga kerja dan pemberdayaan sumber daya alam menjadi sangat menurun. Pertumbuhan ekonomi semakin merosot tajam dengan adanya penyebaran virus Covid-19 mulai memasuki negara Indonesia di kuartal II 2020. Masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi

gerak perekonomian Indonesia yang cenderung menurun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif, pengambilan data terpusat di laporan media sosial yang akurat dari sumber informan terpercaya.

Pemaparan hasil penelitian bahwa pada kuartal I (periode bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020) tercatat pertumbuhan ekonomi di angka yang masih aman yaitu plus 2,97%, pada kuartal II (April 2020 sampai dengan Juni 2020) menunjukkan keterpurukan pertumbuhan ekonomi yakni minus 5,32%, terjadi perubahan cukup signifikan yakni sedikit meningkat tetapi masih minus terjadi di kuartal III (Juli 2020 sampai dengan September 2020) adalah sebesar minus 1% sampai dengan minus 2,9%. Kondisi minus pada kedua kuartal terakhir mengakibatkan keadaan perekonomian Indonesia jatuh dalam posisi resesi. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya penting untuk menanggulangi keadaan resesi ini adalah dengan melakukan deregulasi, penurunan suku bunga pinjaman, meningkatkan suku bunga atau margin simpanan masyarakat, penggalakan ekspor non migas, perluasan kesempatan kerja, proses restrukturisasi akibat situasi eksternal yang masih suram, peningkatan pajak, pengurangan produk impor, penanganan sektor informal.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang berkenaan dengan perubahan fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran Covid-19 mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni terlihat pada kuartal II 2020 di angka minus 5,32%, kuartal III masih berada di minus 1% sampai dengan minus 2,9%. Hal ini mengindikasikan negara Indonesia memasuki kondisi resesi.
2. Pemerintah dan masyarakat Indonesia saling bahu membahu dalam menanggulangi dampak pandemi ini, dengan memutus rantai penularan (menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi), langkah selanjutnya secara konsisten menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar mengatasi pandemi, adanya sinergi kuat antara

aparatus pemerintah dan masyarakat golongan mampu menyebar bantuan ekonomi ke masyarakat yang membutuhkan terutama lapisan bawah, kurang mampu dan tidak mampu.

3. Pelaksanaan evaluasi tindakan kondusif mengatasi penyebaran Covid-19 di setiap kuartal tahun 2020, terutama pada periode dengan pertumbuhan ekonomi yang masih minus. Pada kuartal IV diharapkan akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi kembali normal atau pada kisaran plus (Herlina, 2020).

4.3 Pendapatan Nasional

A. Defenisi Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Dari pengertian ini terdapat tiga hal penting. Pertama barang dan jasa yang dihitung dalam penghitungan pendapatan nasional adalah barang dan jasa akhir atau yang dikonsumsi oleh konsumen. Kedua, nilai output yang diproduksi tersebut dihitung berdasarkan harga Pasar atau harga yang berlaku pada saat penghitungan dilakukan Ketiga, dalam menghitung pendapatan nasional tidak dipermasalahkan asal faktor produksi yang menghasilkan produksi barang dan jasa asalkan masih berada dalam wilayah suatu negara. Jadi pendapatan nasional suatu negara mungkin saja dihasilkan dari faktor produksi milik Negara lain. (Mardiyatmo, 2010).

B. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Di Indonesia, data mengenai pendapatan nasional dikumpulkan dan dihitung serta disajikan oleh Biro Pusat Statistik. Sebelum menelusurinya lebih jauh, ada baiknya terlebih dahulu diketahui konsep-konsep pendapatan nasional yang diterapkan. Perhitungan pendapatan nasional Indonesia dimulai dengan produk domestik bruto. PDB itu sendiri sebagaimana diketahui dapat dihitung atau diukur dengan 3 macam pendekatan yaitu (1)

pendekatan produksi, (2) pendekatan pendapatan, (3) pendekatan pengeluaran (Dumairy, 1997).

Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yang dimaksud secara garis besar dipilih-pilih menjadi 11 sektor atau lapangan usaha (1) pertanian, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) industry pengolahan, (4) listrik, gas, dan air minum, (5) bangunan, (6) perdagangan, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) bank dan lembaga keuangan lainnya, (9) sewa rumah, (10) pemerintah, (11) jasa jasa.

Sedangkan menurut pendekatan pendapatan merupakan PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu. Balas jasa produksi yang dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Oleh sebab itu PDB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha (Dumairy, 1997).

Adapun menurut pendekatan pengeluaran. PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga yang tidak mencari keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domestik bruto; (3) konsumsi pemerintah; serta (4) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor), dalam jangka waktu setahun.

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah produk domestik bruto ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri. Yang dimaksud dengan pendapatan neto atas faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan atas faktor produksi warga negara Indonesia yang dihasilkan (diterima dari) di luar pengurangan pendapatan atas faktor produksi warga negara yang dihasilkan di Indonesia. Dari produk nasional bruto dapat dihitung produk nasional neto, yaitu produk nasional bruto dikurangi seluruh barang-barang unik

modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

PDB dan PNB serta PNN sebagaimana dijelaskan di atas merupakan PDB dan PNB serta PNN atas dasar harga pasar, karena di dalamnya masih tercakup unsur pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto adalah seluruh jumlah pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi jumlah subsidi yang diberikan pemerintah. Apabila produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tak langsung neto ini, maka diperoleh lah angka produk nasional neto atas biaya faktor produksi. PNN atas biaya faktor produksi inilah yang disebut dengan pendapatan nasional (*national income*) (Dumairy, 1997).

C. Analisa pendapatan Nasional

Pendapatan nasional tidak hanya sebatas penentuan besarnya pendapatan nasional, tetapi juga sumber-sumber pendapatan nasional. Analisa ini bergantung pada pendekatan yang digunakan menghitung pendapatan nasional. Misalnya, pada pendekatan produksi kita dapat menganalisa lapangan usaha mana yang paling berkontribusi dalam pendapatan nasional sebuah negara. Demikian halnya dengan pendekatan perhitungan yang lain.

Di Indonesia, penghitungan pendapatan nasional yang dilakukan Oleh pemerintah lebih menekankan penggunaan pendekatan produksi dan pengeluaran. Pendekatan pendapatan hampir tidak digunakan karena penghitungannya dirasa lebih sulit dibandingkan dua pendekatan yang lain. Itulah sebabnya, Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mengeluarkan penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa terhadap pendapatan nasional berdasarkan dua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran.

Analisa penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diawali dengan menentukan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penjumlahan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha (sektor) di suatu negara selama satu tahun, Tujuannya adalah untuk

mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor dalam mewujudkan pendapatan nasional (Ritonga, 2007).

4.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dalam periode tertentu. (Sukirno, 2000).

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Saat Pandemi Covid-19

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di tengah wabah coronavirus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kelambatan yang menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% (year on year) yang terjadi pada kuartal I per tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kuartal IV per tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Pada kondisi pandemi ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,84%, hal itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal IV per tahun 2019 yang dapat menembus angka 5,02%. Kinerja konsumsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga dapat menopang lebih dari 50% produk domestik bruto. (Fibrianti, 2021).

Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah

Dampak Covid-19 tidak hanya dalam bidang kesehatan dan sosial, tetapi dalam bidang ekonomi juga menimbulkan dampak

yang lebih komprehensif dari berbagai alternatif skenario penanganan pandemi Covid-19. 'Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', mengemukakan bahwa salah satu skenario penanganan Pandemi Covid-19 yaitu skenario intervensi kuat, di mana dari hasil analisis sederhana dikatakan bahwa intervensi kuat, untuk meminimalisasi penyebaran kasus coronavirus dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi yang lebih parah. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan dikutip dari penelitian (Hanoatubun, 2020).

Covid-19 telah dinyatakan WHO sebagai masalah global. Dengan adanya Pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41% sebagai dampak dari wabah coronavirus. Sehingga hal tersebut berakibat pula pada tingkat defisit anggaran negara yang mengalami kenaikan. APBN tahun 2020 mengalami peningkatan angka defisit sebesar 6,27% dari peroduk domestik bruto. Selain itu, Pandemi Covid-19 berdampak juga pada banyaknya karyawan yang dirumahkan sehingga menjadi pengangguran akibat terkena PHK dari kantor karyawan tersebut bekerja yang terjadi pada pekerja sektor formal dan informal. Mayoritas PHK terjadi pada sektor usaha skala mikro. PHK pada sektor informal hingga mencapai angka 56,7% dari total jumlah tenaga kerja. Pengangguran yang terjadi karena PHK juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah. Kemudian, dibutuhkan beberapa kebijakan pemerintah yang relevan untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi dan terjadinya kasus PHK pada saat Covid-19.

Beberapa kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan untuk mengurangi masalah yang timbul akibat Covid-19 yaitu bagi para pekerja yang terdampak PHK, pemerintah merilis Kartu Pra Kerja sejak akhir Maret. Pada awalnya, pemerintah akan merilis Kartu Pra Kerja pada Agustus mendatang. Sedangkan, perihal anggaran yang digunakan mencapai Rp. 10 triliun bagi 2 juta peserta di tahun ini. Selain itu, pemerintah telah mengucurkan kebijakan bagi perusahaan guna menjaga kestabilan perekonomian

Indonesia. Selain kartu pra kerja, ada juga menjaga ketersediaan bahan baku, pembebasan pajak pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu. (Elena, 2020).

PENGUNAAN EKONOMI REGIONAL

BAB

V

5.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam melakukan analisis pembangunan dan mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah pusat perhatian dari ilmu ekonomi makro baik secara teoritis maupun dalam aplikasinya. Pertumbuhan ekonomi tidak lain merupakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah tertentu (Panennungi & Xu, 2017).

Produk Domestik Bruto (PDB) sangat diperlukan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antarwaktu maupun antarnegara yang lebih tepatnya ketika dilihat tingkat pertumbuhannya. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan negaranya (Prasetyo & Firdaus).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) rill sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rill. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu periode tertentu tidak lepas dari perkembangan masing-masing sektor dan subsektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Menurut Sukirno (2010) dan Novianto dan Atmanti (2013) teori pertumbuhan neo klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu : modal, tenaga kerja dan teknologi.

Dewasa ini istilah pembangunan semakin berkembang dan mengandung banyak makna. Bukan hanya menyangkut pertumbuhan tetapi juga perubahan sosial. Sementara itu istilah pembangunan bukan hanya menimbulkan banyak harapan tetapi juga perdebatan dikalangan para ahli dan masyarakat. Pada hakekatnya kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukan dalam dua golongan. Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik bersifat deskriptif maupun yang bersifat lebih analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang dan implikasi sifat-sifat ini kepada kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan tersebut. Berdasarkan kedua sifat ini maka analisis ekonomi pembangunan dapatlah didefenisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara yang bersangkutan dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Pengalaman dalam usaha pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang pada akhirnya menimbulkan kesadaran bahwa kebijaksanaan pembangunan belum merupakan usaha yang sempurna apabila perumusannya hanya didasarjan kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomi semata-mata (Siahaan dkk, 2001).

5.2 Indikator dan Ukuran Pembangunan

A. Pendapatan Perkapita

Salah satu ukuran yang sering digunakan sebagai indikator pembangunan adalah pendapatan perkapita. Selain dapat membedakan antara daerah/wilayah maju dan daerah/wilayah yang sedang berkembang, pendapatan perkapita (walaupun sangat kasar) dianggap pula dapat memberikan gambaran tentang perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah atau antar daerah/wilayah. Suatu negara dianggap berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakatnya cukup tinggi, yakni dilihat dari produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh produk domestik regional bruto (PDRB). Oleh karena PDRB mengukur hasil keseluruhan dari suatu daerah/wilayah, padahal besar daerah/wilayah dalam arti (jumlah penduduknya) berlainan, maka digunakan ukuran per kapita PDRB. Dengan mengetahui produksi rata-rata setiap orang dapat lah dibandingkan PDRB perkapita daerah/wilayah yang satu dengan daerah/wilayah yang lain. Pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan tidak luput dari kelemahan. Segera menjadi jelas bahwa PDRB yang dihasilkan sebuah daerah/wilayah, tidak berarti PDRB dimiliki oleh semua penduduk nya secara merata, mungkin terjadi sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang melimpah sedangkan sebagian orang lainnya hidup dalam kemiskinan. Kalau kekayaan ini dirata-ratakan dalam per kapita PDRB atau per kapita PDRB akan diperoleh nilai yang tinggi kemiskinan akan tertutup oleh adanya kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat tadi (Siahaan dkk, 2001).

B. Indeks Pembangunan Sosial

Usaha lain dalam merumuskan indikator-indikator dan membandingkan tingkat kesejahteraan antara daerah/wilayah telah dilaksanakan oleh institut riset PBB untuk pembangunan sosial (*United Research Institute On Social Development, UNRISD*)

pada tahun 1970-an. Studi tersebut dilakukan untuk memilih indikator-indikator yang paling layak untuk mengukur tingkat kemajuan hasilnya adalah apa yang kini kita kenal dengan indeks pembangunan sosial (*social development index*). Terdapat 16 indikator utama terdiri dari 9 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi sebagai komponen dari indeks tersebut, yang dipilih berdasarkan interkorelasi nya yang tinggi untuk membentuk sebuah indeks pembangunan yang padu. Studi ini berkesimpulan bahwa pembangunan sosial di dunia ketiga telah berlangsung lebih cepat dan berhasil mencapai lebih banyak kemajuan ketimbang pembangunan ekonomi yakni sampai nilai pendapatan perkapita US 500 Dollar (berdasarkan harga-harga yang berlaku di tahun 1960)

Adapun ke-16 indikator tersebut adalah:

1. Tingkat harapan hidup
2. Presentasi penduduk yang hidup di pusat-pusat pemukiman yang dihuni oleh 20.000 jiwa atau lebih
3. Konsumsi protein hewani per kapita per hari
4. Tingkat capaian pendidikan dasar dan lanjutan
5. Rasio pendidikan keterampilan atau vokasional
6. Jumlah rata-rata penghuni per kamar
7. Sirkulasi surat kabar perseribu penduduk
8. Persentase penduduk yang secara ekonomis aktif dan punya akses terhadap aneka fasilitas sosial dasar seperti ketersediaan listrik, gas, air bersih, dan sebagainya
9. Produksi pertanian per tangga kerja pria dewasa
10. Persentase pekerja pria dewasa yang berada di sektor pertanian
11. Konsumsi listrik (KW) perkapita
12. Konsumsi baja (kg) per kapita.
13. Konsumsi energi setaraan per kg batubara per kg
14. Persentase sumbangan sektor manufaktur terhadap GDP
15. Perdagangan luar daerah/wilayah dan negeri perkapita (dalam US Dollar tahun 1960)
16. Persentase penerimaan gaji dan upah terhadap jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi.

C. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Menggunakan model beberapa provinsi di pulau jawa.

Tabel 5.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Kostan 2000
Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa tahun 2007-2011

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi					Rata-rata
	2007	2008	2009	2010	2011	
DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02	6,51	6,73	6,18
Jawa Barat	6,48	6,21	4,19	6,09	6,41	5,87
Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14	5,84	6,00	5,63
DIY	4,31	5,03	4,43	4,87	5,43	4,81
Jawa Timur	6,11	6,16	5,01	6,67	4,98	5,78
Banten	6,04	5,77	4,69	5,94	6,59	5,80

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, diolah

Dari tabel 5.1, peningkatan PDRB Jawa Tengah hanya memberikan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,63% dari rata-rata lima tahun terakhir. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah hanya berada di atas rata-rata pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 4,81%. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 6,18 persen diikuti oleh Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur masing-masing 5,87%, 5,80% dan 5,78%.

Pertumbuhan ekonomi yang mantap tentunya memerlukan kapital atau modal. Kapital atau modal tersebut adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing (PMA) maupun investor dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah. PMA maupun PMDN dari tahun pengamatan terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun, baik dilihat dari nilai realisasi investasi maupun persentasi laju investasinya. Pada tahun 2005 PMDN mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 202,9%, walaupun mengalami penurunan hingga -76,4% pada tahun 2007. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pertumbuhan PMDN terus mengalami pertumbuhan yaitu dari 12,1% pada tahun 2008 hingga 66,8% pada tahun 2011. Kondisi laju pertumbuhan PMA lebih

berfluktuasi jika dibandingkan dengan PMDN, dengan kecenderungan laju pertumbuhan yang menurun. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 PMA mengalami peningkatan dari -4,9% menjadi 29,2%, namun pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar -15,1%. Kenaikan laju PMA terjadi kembali pada tahun 2007 dari -15,1% menjadi 28,7% namun terus menurun hingga tahun 2011 sebesar -31,8%.

Diberlakukannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang mencakup tentang penerimaan daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk pendanaan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan Jawa Tengah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada. Nilai realisasi PAD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun jika dilihat dari persentase pertumbuhannya, PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang sangat mencolok dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2011 pertumbuhan PAD mencapai 39,7%. Selama periode pengamatan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,41% dengan pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2011 sebesar 39,7% dan yang paling rendah pada tahun 2004 sebesar 3,9%.

Jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan tinggi dan memiliki kemampuan akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan tingkat produksi output di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah angkatan kerja dari tahun pengamatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kenaikan pertumbuhan angkatan kerja selalu diikuti oleh penurunan di tahun berikutnya. Pertumbuhan angkatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 7,2% dan yang paling rendah pada tahun 2008 yaitu sebesar -5,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan

manusia belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan pembangunan ekonomi daerah (Novianto, 2013).

5.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

A. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Regional

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan korelasi antara fakta-fakta yang diamati, sehingga dapat menjadi kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi. Dengan makin majunya studi-studi pembangunan ekonomi, banyak teori telah diintroduksikan. Dalam pembangunan wilayah, banyak teori dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antarwilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Semua faktor di atas adalah penting, tetapi masih dianggap terpisah-pisah satu sama lain, dan belum menyatu sebagai komponen yang membentuk basis untuk penyusunan teori pembangunan wilayah regional secara komprehensif. Dalam pembangunan ekonomi wilayah (regional) dapat dikemukakan beberapa teori yang penting, yakni (i) pemikiran-pemikiran menurut beberapa aliran dalam ilmu ekonomi (misalnya Klasik, Neoklasik, Harrod-Domer, Keynes dan Pasca Keynes), teori basis ekspor, teori sektor, struktur industri dan pertumbuhan wilayah, dan teori kausasi kumulatif. Selanjutnya akan dibahas pula teori lokasi dan aglomerasi, teori tempat sentral, teori kutub pertumbuhan, dan teori pembangunan polarisasi.

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dipelopori oleh Adam Smith (yang dianggap sebagai bapak ekonomi) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan

teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, dampaknya mendorong penambahan investasi (pembentukan modal) dan persediaan modal (*capital stock*), yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan berarti meningkatnya kemakmuran (kesejahteraan) Penduduk. Peningkatan kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), yang selanjutnya akan menurunkan akumulasi modal. Doktrin atau semboyan aliran Klasik adalah 'laissez faire laissez passé' atau persaingan bebas, artinya pemerintah tidak campur tangan dalam perdagangan dan perekonomian. Pemikiran dan pandangan beberapa tokoh atau pengikut aliran Klasik dapat dikemukakan yaitu: Menurut Adam Smith (dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi) untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja meningkat (Ridwan, 2016).

5.4 Industrialisasi di Indonesia

Sejarah sektor industri Indonesia dapat di ringkas kan sebagai berikut:

1. Pada jaman kolonial, industri dikuasai oleh orang asing. Pada masa itu terdapat beberapa industri modern, tetapi kebanyakan industri industri kecil. Setelah Depresiasi 1929/1930, industri beralih ke perkebunan.
2. Pada masa perang dunia II, industri baik namun setelah Jepang memerintah Indonesia ada larangan impor bahan mentah. Barang barang Diangkut ke Jepang dan terjadi pemaksaan tenaga kerja, sehingga perusahaan asing hampir tidak ada

3. Pada tahun 1951, pemerintah meluncurkan kebijakan RUP atau rencana urgensi perekonomian. Undang undang ini mendorong industri kecil dan pribumi dan membatasi industri industri besar yang dimiliki Eropa dan Cina. Kebijakan RUP Mengakibatkan investasi asing berkurang sehingga pemerintah beratkan pengembangan industri yang dikelola pemerintah.
4. Pada tahun 1957 industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa tidur. Pada tahun 1960 industri tidak berkembang, akibat situasi politik dan kelangkaan modal. Tenaga ahli dan tenaga Terampil. Perekonomian sulit, pinjaman Diupayakan dari negara sosialis, inflasi meningkat sektor industri di dominasi industri berat, misalnya Cilegon dan lain lain.
5. Pada tahun 1967 dibentuk undang undang baru dalam bidang penanaman modal, undang undang untuk penanaman modal asing (PMA) yang dibuat tahun 1967 Dan undang undang untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 1978, misalnya, sumbangan sektor industri terhadap GNP (produk domestik bruto, PDB) adalah 10%. Sejak itu pamer sektor industri terus meningkat pada PJP I.

Industri substitusi impor ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan industri substitusi impor:

1. Kualitas barang yang dihasilkan jauh lebih rendah dari kualitas barang yang dihasilkan luar negeri
2. Produksi pada tahap awal industrialisasi dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk membeli mesin mesin, teknologi dan bahan bahan baku. Oleh karena modal dan tenaga kerja ahli harus didatangkan dari luar negeri maka biaya produksi menjadi lebih besar. Akibatnya barang yang diproduksi dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang luar negeri. Dalam situasi demikian, biasanya pemerintah memberi subsidi untuk industri ini.
3. Saingan dengan perusahaan dalam negeri industri teknologi teknologi modern ke dalam negeri secara besar besaran.

Teknologi modern akan menggeser teknologi lama sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memakai teknologi lama ini menjadi kalah bersaing dengan industri Substitusi impor (Siahaan dkk, 2001).

6.1 Investasi di Indonesia

Investasi adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan (return) di masa mendatang.

Sementara itu pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), arti investasi yakni penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.

Banyak contoh investasi antara lain saham, sukuk, deposito, obligasi, menabung, asuransi, dan reksa dana. Bentuk contoh investasi lainnya yakni pembelian tanah, emas dan perhiasan, hingga menjalankan bisnis.

Investasi sendiri bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan. Sederhananya, pengertian investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan-tujuan tertentu yang dimaksud seperti keinginan membuka usaha, menyekolahkan anak, membangun rumah, dan sebagainya (Idris,2021).

A. Tujuan Investasi

Tujuan investasi yakni memperoleh penghasilan dan atau peningkatan **investasi**, menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau meningkatkan nilainya., memperoleh konsumsi di

masa yang akan datang, dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Tujuan Investasi Menurut Para Ahli

1. Farid Harianto dan Siswanto Sudomo (1998: 2)

Tujuan investasi yakni memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi.

2. Gitman dan Joehnk (2005: 3)

Tujuan investasi yakni menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau meningkatkan nilainya.

3. Martalena dan Malinda (2011: 1)

Tujuan investasi yakni memperoleh konsumsi di masa yang akan datang.

4. Tandelilin (2010: 2)

Tujuan investasi yakni memperoleh keuntungan di masa datang.

5. PSAK No.13 (dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004)

Tujuan investasi yakni digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*acceration of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, dan ada hubungan perdagangan.

6. Mulyadi (2011)

Tujuan investasi adalah mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang.

B. Jenis investasi

Secara umum, ada dua jenis investasi yakni investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang keuntungannya diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun.

Sementara investasi jangka pendek, adalah investasi yang pengembaliannya bisa didapatkan dalam kurun waktu di atas 3 tahun. Jangka waktu investasi ini biasanya juga terkait dengan jumlah return.

Itu sebabnya, lazimnya investasi jangka panjang memberikan return yang lebih besar ketimbang investasi jangka pendek. Ini karena keuntungan investasi jangka pendek bisa didapatkan lebih cepat.

Namun demikian, melakukan investasi juga mengandung risiko. Risiko di sini adalah kehilangan dana atau aset lain ketika investasi tak sesuai harapan atau bahkan gagal.

C. Manfaat Investasi

1. Kebebasan finansial

Salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial atau *financial freedom*, di mana seseorang dianggap sudah seseorang bisa mendapatkan *passive income* dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Bagi mereka yang bekerja, *passive income* adalah pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempatnya bekerja. Dengan kata lain, kebebasan finansial bisa didapatkan ketika kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi meskipun seseorang memutuskan untuk tak lagi bekerja.

2. Melindungi aset dari inflasi Tujuan berikutnya investasi adalah melindungi aset dari inflasi. Inflasi yang terjadi terus menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga berkembang menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi.

3. Meningkatkan kekayaan

Sejatinya manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi seseorang yang bekerja, hasil return investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan.

4. Kebutuhan darurat

Banyak orang memilih investasi adalah karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Ini karena di masa mendatang, terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi

6.2 Pertumbuhan Investasi di Indonesia

A. Kuartal I

Seperti Ini Pertumbuhan Investasi Langsung di Indonesia selama Kuartal I-2021. Kendati pandemi belum berakhir, investasi langsung tetap mengalir selama awal tahun ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat direct investment untuk kuartal pertama 2021 senilai Rp 219,7 triliun. Angka itu menunjukkan pertumbuhan 4,3% jika diperbandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun sebelumnya. Dan jika diperbandingkan dengan hasil di kuartal IV-2020, nilai investasi langsung di kuartal pertama 2021 lebih tinggi 2,4%. Jika dirinci berdasarkan asalnya, direct investment tersebut berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 108 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 111,7 triliun. Baik nilai PMDN maupun PMA di kuartal pertama 2021 memperlihatkan kenaikan dibandingkan hasil yang dicatat di kuartal terakhir tahun lalu. Pertumbuhannya, secara berurutan, mencapai 4,2% dan 14%.

BKPM menggaris bawahi kontribusi PMA yang setara 50,8% dari total realisasi investasi di tiga bulan pertama tahun ini. “Itu menunjukkan tumbuhnya kepercayaan dunia atas iklim investasi serta potensi investasi di Indonesia,” demikian pernyataan badan tersebut, awal pekan ini. Singapura tercatat sebagai negara asal investasi langsung terbesar selama kuartal pertama tahun ini. Nilai direct investment yang mengalir dari negeri tetangga itu mencapai US\$ 2,6 miliar, atau setara dengan 34% dari realisasi investasi di periode tiga bulan pertama 2021.

China dan Korea Selatan masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga sebagai negara asal investasi langsung. Negeri Tembok Raksasa menempatkan direct investment senilai US\$ 1 miliar, atau setara 13,6%. Sedangkan investasi langsung dari Negeri Ginseng mencapai US\$ 0,9 miliar, atau setara 11,1%. Hong Kong berada di tempat keempat dengan nilai investasi langsung sebesar US\$ 0,8 miliar, atau setara 10,8% dari realisasi investasi di kuartal I. Sedang Swiss menempati urutan kelima dengan nilai investasi US\$ 0,5 miliar, atau setara 6,1%.

Proyek infrastruktur masih menjadi penampung terbesar bagi PMDN. Dalam catatan BKPM, PMDN terbesar di periode itu mengalir untuk proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik di Lampung dan Maluku, dan proyek pembangunan pelabuhan di Kalimantan Tengah.

Jika dirinci berdasarkan sektor usaha, perumahan, kawasan industri dan perkantoran mendapatkan bagian terbesar dari investasi langsung. Nilainya mencapai Rp 29,4 triliun, atau setara 13,4% dari realisasi direct investment selama kuartal pertama tahun 2021. Peringkat kedua hingga kelima, berikut nilai investasi dan porsinya tersaji di infografik.

Kendati nilainya lebih kecil dibandingkan PMA, PMDN mampu menyediakan lapangan kerja lebih banyak. BKPM mencatat, realisasi penyerapan tenaga kerja untuk triwulan I-2021 mencapai 311.793 orang. Perinciannya, proyek berstatus PMDN menyerap 165.630 orang pekerja. Sementara 146.163 orang lain berkerja di proyek berstatus PMA (Hadiwinata, 2021).

B. Kuartal II

Realisasi investasi mencatatkan kinerja yang sangat baik di tengah kondisi pandemi COVID-19. Melansir siaran pers Badan Kebijakan Fiskal (BKF), hal ini ditunjukkan dengan realisasi investasi langsung kuartal II 2021 mencapai Rp223 triliun atau tumbuh sebesar 16,2% (year on year). Realisasi terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,2 triliun atau tumbuh 12,7% (yoy), sementara Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 7.997,5 juta atau sebesar Rp116,8 triliun sesuai kurs APBN 2021 atau tumbuh sebesar 19,6% (yoy). Berdasarkan sektor usaha, realisasi PMA terbesar adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US\$ 1,8 miliar), Pertambangan (US\$ 0,9 miliar), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US\$ 0,9 miliar), Listrik, Gas, dan Air (US\$ 0,8 miliar), dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US\$ 0,7 miliar). Sedangkan realisasi PMDN terbesar adalah Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp20,5 triliun), Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp14,5

triliun), Listrik, Gas, dan Air (Rp11,7 triliun), Konstruksi (Rp9,9 triliun), dan Industri Makanan (Rp7,1 triliun).

Investasi yang cukup besar terjadi pada sektor padat karya seperti sektor perumahan dan sektor industri seperti industri manufaktur, logam dasar, dan makanan. Peningkatan investasi industri logam dasar terutama bersumber dari PMA atas pembangunan pabrik kendaraan listrik dan industri baterai yang sedang dikembangkan di Indonesia.

Dari sisi lokasi proyek, provinsi dengan realisasi PMA peringkat 5 besar adalah Jawa Barat (US\$ 1,6 miliar), DKI Jakarta (US\$ 1,0 miliar), Maluku Utara (US\$ 1,0 miliar), Sulawesi Tengah (US\$ 0,5 miliar), dan Riau (US\$ 0,4 miliar). Sedangkan peringkat 5 besar realisasi PMDN adalah di Jawa Timur (Rp13,9 triliun), Jawa Barat (Rp12,1 triliun), DKI Jakarta (Rp11,2 triliun), Banten (Rp10,2 triliun), dan Jawa Tengah (Rp7,8 triliun). Investasi akan terus bergerak ke arah luar Pulau Jawa, seiring dengan meningkatnya potensi industri hilirisasi yang didorong untuk mendekati sumber barang tambang seperti, minyak dan gas.

Berdasarkan sumber negara, peringkat 5 besar realisasi PMA berasal dari Singapura (US\$ 2,1 miliar) dengan kontribusi mencapai 26,4% dari total realisasi kuartal II 2021. Diikuti Hongkong, RRT (US\$ 1,4 miliar), Belanda (US\$ 1,1 miliar), Jepang (US\$ 0,7 miliar), dan R.R. Tiongkok (US\$ 0,6 miliar). Masuknya negara Eropa dan Amerika Serikat dalam 10 besar negara sumber investasi memberikan sinyal positif diversifikasi sumber investasi Indonesia selain dari negara-negara Asia.

Dari sisi administrasi, contohnya, integrasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS) akan dilakukan dalam waktu dekat untuk terus memangkas waktu pengurusan perizinan.

Peningkatan kinerja investasi ini sejalan dengan perbaikan iklim berusaha dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja berikut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Kemenkeu.go.id, 2021*)

C. Kuartal III

Penanaman modal asing (PMA) di industri makanan minuman (mamin) tumbuh ekspansif pada Januari–September 2021. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal asing (PMA) sektor mamin sebesar US\$2,08 miliar atau tumbuh 75,93 persen dibandingkan periode yang sama 2020 senilai US\$1,14 miliar.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan para investor di industri mamin lebih optimistis dibandingkan dengan tahun lalu karena perbaikan prospek ekonomi nasional.

Guna memperluas pasar ekspor di sektor industri mamin, Adhi meminta kepada pemerintah dapat memfasilitasi kerja sama dengan sejumlah negara mitra seperti Uni Emirat Arab (UEA). Apalagi, kata Adhi, negara-negara di UEA sudah banyak yang berinvestasi di Indonesia khususnya sektor industri mamin.

Melalui keikutsertaan Indonesia pada ajang pameran tingkat internasional seperti Expo 2020 Dubai ini, Gapmmi berharap, dapat mendongkrak kinerja ekspor produk industri mamin nasional dari hasil promosi yang ditampilkan.

Dia menuturkan terdapat 20 jenis produk mamin yang telah menembus pasar ekspor UEA, di antaranya makanan olahan sereal, kopi instan, dan jus.

Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di industri mamin mengalami penyusutan 14,91 persen menjadi Rp20,42 triliun dibandingkan dengan Januari–September 2020 sebesar Rp24 triliun.

Secara keseluruhan, investasi di industri manufaktur mencatatkan pertumbuhan 17,28 persen pada Januari–September 2021. Aliran investasi ke industri manufaktur pada sembilan bulan pertama tahun ini sebesar Rp236,8 triliun, naik dari periode yang sama 2020 senilai Rp201,9 triliun (Lestari, 2021).

6.3 Investasi Asing di Indonesia

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa instansinya berjibaku siang hingga malam untuk mengejar investasi Rp900 triliun sepanjang 2021. Hasilnya, kucuran modal yang masuk ke Indonesia makin berkualitas. Pada kuartal II/2021, realisasi penanaman modal asing (PMA) Rp116,8 triliun. Ini setara dengan 52,4 persen dari total investasi Rp223 triliun. Sedangkan sepanjang semester I/2021, PMA yang masuk ke Indonesia sebesar Rp228,5 triliun. Ini sama dengan 51,6 persen dari total investasi Rp442,7 triliun. investasi di luar Jawa sejak triwulan III/2020 selalu lebih tinggi. Ini adalah bukti kucuran modal yang masuk semakin berkualitas. Hal ini, disebabkan oleh para investor yang tidak lagi menjadi Jawa sebagai prioritas usaha. Pembangunan infrastruktur yang semakin merata membuahkan hasil (Prakoso, 2021).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi asing (Penanaman Modal Asing/PMA) mencapai Rp111,7 triliun pada kuartal I 2021. Jumlahnya lebih tinggi dari realisasi investasi lokal (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) sebesar Rp108 triliun.

"Ketika kuartal IV (2020), FDI (foreign direct investment) kita kalah dengan PMDN, tapi sekarang mulai melebihi PMDN. Ini menunjukkan kepercayaan dunia kepada Indonesia dan aktivitas PMA sudah mulai normal dan bisa lakukan adaptasi pada perkembangan pandemi covid-19," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Senin (26/4).

Bahlil menilai hal ini sekaligus menjawab bahwa Indonesia sudah kembali diminati oleh investor asing. Berdasarkan sektor industri, aliran investasi asing banyak masuk ke industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya mencapai US\$1,7 miliar atau setara 22,4 persen dari total PMA.

Selanjutnya, mengalir ke industri makanan US\$1 miliar atau 12,7 persen, transportasi, gudang, dan telekomunikasi US\$800 juta atau 11 persen, listrik, gas, dan air US\$600 juta atau 7,8 persen,

industri kendaraan bermotor dan alat transportasi US\$600 juta atau 7,8 persen, dan lainnya.

Berdasarkan lokasi, PMA membanjiri Jawa Barat US\$1,4 miliar atau 18,9 persen dari total investasi asing pada kuartal I 2021. Sisanya, berada di DKI Jakarta US\$1 miliar atau 13,1 persen, Sulawesi Tengah US\$600 juta atau 7,5 persen, Riau US\$600 juta atau 7,3 persen, Sulawesi Tenggara US\$500 juta atau 7,2 persen, dan lainnya.

Berdasarkan negara asal, investasi asing berasal dari Singapura mencapai US\$2,6 miliar atau 34 persen dari total. Lalu, dari China US\$1,03 miliar atau 13,6 persen, Korea Selatan US\$851,1 juta atau 11,1 persen, Hong Kong US\$822,1 juta atau 10,8 persen, Swiss US\$466,2 juta atau 6,1 persen dari total, dan lainnya.

Berdasarkan tenaga kerja, PMA menyerap 146.163 pekerja. Sementara itu, PMDN 165.630 pekerja, sehingga totalnya mencapai 311.793 pekerja pada kuartal I 2021. (*cnnindonesia.com, 2021*)

Menarik Investasi Asing

Managing Partner Dentons HPRP, Constant M Ponggawa, memaparkan, sedikitnya ada empat kendala yang menghambat investasi di Indonesia.

Pertama, peraturan daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat, kemudian banyak peraturan tumpang tindih, birokrasi rumit, dan butuh waktu lama, dan peraturan ketenagakerjaan yang kurang fleksibel. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menarik minat investor asing. Bagaimana kita jadi tuan rumah yang baik dan dari segi hukum dan peraturan membuat investor nyaman, Setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investasi di Tanah Air.

- a. kepastian hukum yang jelas.
- b. Kedua, stabilitas ekonomi dan politik.
- c. Ketiga, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi.
- d. fleksibilitas aturan ketenagakerjaan.

Para investor cuma mau satu, kepastian hukum. Kepastian hukum ini sangat penting supaya mereka tenang menjalankan usaha dan investasi di sini. Aspek lain, bagaimana pemerintah bisa memonitor langsung para investor besar yang berniat menanamkan modal di Indonesia.

Investasi Terbesar di Indonesia

Kementerian Investasi menyebut, lima negara dengan investasi terbesar di Indonesia sepanjang kuartal II-2021 adalah Singapura, Hong Kong, Belanda, Jepang, dan Tiongkok.

Singapura masih menjadi negara yang mendominasi investasi langsung dari asing (Penanaman Modal Asing/PMA) di Indonesia. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan, realisasi investasi Singapura pada kuartal II-2021 sebesar US\$ 2,1 juta dengan 3.821 proyek. Kemudian posisi kedua ditempati Hong Kong dengan nilai investasi US\$ 1,4 juta untuk 615 proyek.

"Jadi Singapura tetap masih di nomor satu, kemudian Hong Kong. Menariknya, Belanda bisa menggeser Jepang di posisi tiga," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/7).

Dia menjelaskan, pada kuartal II-2021, Belanda mampu berada di posisi ketiga dengan nilai investasi mencapai US\$ 1,1 juta dan jumlah proyek 614.

Di bawah Belanda, lanjut Bahlil, Jepang menempati posisi keempat dengan nilai investasi US\$ 700.000 ke dalam 1.501 proyek.

"Sementara di posisi kelima ada Tiongkok dengan nilai investasi sebesar US\$ 600.000 dengan 642 proyek," ujar dia.

Menurut Bahlil, meningkatnya peringkat Belanda sebagai investor Indonesia, menunjukkan kepercayaan dunia internasional khususnya dari Eropa.

Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit, kata dia, Belanda memang dijadikan sebagai hub investasi oleh beberapa negara.

"Belanda masuk tiga besar, ini artinya sebuah pesan positif bagi kepercayaan dunia internasional, khususnya Eropa kepada

Indonesia. Ketika terjadi Brexit, Belanda memang dijadikan hub oleh beberapa negara," jelas dia.

Sementara posisi investasi dari Jepang yang menurun, menurut Bahlil, juga berkaitan dengan langkah Negeri Sakura untuk menarik para pekerjanya dari Indonesia akibat lonjakan pandemi Covid-19. "Harus diakui, setiap perusahaan yang sedang menjalankan operasi, ketika sebagian tenaga ahli pulang pasti ada dinamika dalam percepatan pekerjaan" tutur dia.

Kendati demikian, Bahlil memastikan, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan pihak Jepang untuk membahasnya dan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. (Pangastuti,2021).

Manfaat Investasi Asing di Indonesia

1) Mendapatkan Banyak Modal Baru

Indonesia membutuhkan banyak dana baru untuk membangun beberapa sektor penting. Namun, tidak semua dana bisa dicukupi oleh pemodal yang ada di dalam negeri. Masuknya pemodal asing ke Indonesia untuk melakukan investasi akan membuat kebutuhan dana itu bisa segera tercukupi dan pembangunan bisa segera dilakukan. Selama ini, investasi asing di Indonesia selalu terhambat masalah perizinan yang rumit. Akhirnya alih-alih mau menanamkan modal di sini, pemodal lebih memilih masuk negara berkembang lain di kawasan Asia atau Afrika. Susahnya investasi di Indonesia akhirnya berakhir setelah pemerintah Indonesia mulai mempermudah masuknya modal. Bahkan, pemerintah mengundang pemodal itu masuk ke negeri ini untuk menemukan sektor yang ingin didanai.

2) Membuka Lapangan Pekerjaan

Investasi asing di Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya banyak. Dengan modal baru, sektor-sektor penting yang sedang dibangun akan membutuhkan banyak pekerja baru. Penduduk di sekitar proyek atau masyarakat di kota sekitar akan terserap untuk bekerja di sini. Banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia akan mengurangi angka

pengangguran. Penduduk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan tingkat perekonomian mereka bisa meningkat perlahan-lahan.

3) Kemajuan Bidang Tertentu

Pemodal yang menyuntikkan dana segarnya ke Indonesia juga membawa teknologi dan pengetahuan dari negaranya. Misal teknologi pengolahan air minum di suatu kota atau teknologi seluler yang cepat dan hemat data. Hal-hal seperti ini belum tentu dimiliki oleh Indonesia sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pemodal asing. Apa yang dimiliki oleh pemodal asing ini cepat atau lambat juga akan dikembangkan dan ditiru di Indonesia. Dengan teknologi yang baru, sektor-sektor penting di Indonesia bisa berkembang dan akhirnya bisa bersaing dengan negara lain.

4) Meningkatkan Pemasukan Negara

Investasi asing yang masuk ke Indonesia pasti berupa valuta asing. Nah, uang yang masuk akan otomatis dikenai pajak yang akan menambah devisa negara. Kalau modal asing yang masuk ke negeri ini terus meningkat, devisa yang didapatkan juga semakin besar.

5) Perlindungan Wilayah

Negara yang menjadi pusat investasi akan dilindungi oleh negara yang penduduknya menanamkan modal. Ambil contoh saja, saat ada ratusan investor Tiongkok menanamkan modal di Indonesia, negeri kita akan mendapatkan perlindungan baik itu politik atau kepentingan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena keuntungan yang didapatkan oleh pemodal akan menyumbangkan keuntungan juga bagi negeri asal pemodal. Kalau negeri yang ditanami modal diganggu atau mungkin terkena konflik regional, peluang investasi akan turun semakin besar. Dampaknya, pemasukan yang didapatkan akan menurun dan itu tidak baik untuk perekonomian nasional. (Kompasiana.,2017).

PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL

BAB VII

7.1 Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. (Setiawan & Lestari, 2011). Perdagangan internasional yaitu perdagangan yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan luar negeri merupakan aspek penting bagi perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional menjadi semakin penting tidak hanya dalam pembangunan negara yang berorientasi keluar akan tetapi juga dalam mencari pasar di negara lain bagi hasil-hasil produksi di dalam negeri serta pengadaan barang-barang modal guna mendukung perkembangan industri di dalam negeri. Perdagangan internasional diawali dengan pertukaran atau perdagangan tenaga kerja dengan barang dan jasa lainnya. Dasar dalam perdagangan internasional adalah adanya perdagangan barang dan jasa antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan ini terjadi apabila terdapat permintaan dan penawaran pada pasar internasional. Perdagangan internasional atau international trade sebagai aktivitas tukar menukar atau jual beli antar negara sebagai upaya mendapatkan manfaat atau keuntungan.

Perdagangan Internasional merupakan suatu kegiatan proses perdagangan barang-barang dari kesepakatan masing-masing negara secara bersama. Tujuan perdagangan internasional ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah

pendapatan dari suatu negara. Perdagangan Internasional akan melakukan transaksi jual beli dengan negara lain” .(Adolf, 2005).

Perdagangan internasional dapat terjadi karena dua faktor utama. Faktor pertama ialah negara-negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan mempunyai sumber daya yang berbeda satu sama lain. Faktor kedua ialah negara-negara yang terlibat aktivitas perdagangan sama-sama aktif memproduksi barang tertentu dengan jumlah yang besar dan kualitas yang baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan antara negara-negara. Perdagangan tersebut meliputi proses ekspor maupun impor yang sangat berpengaruh bagi pendapatan negara.(Basri & Munandar, 2010)

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan didalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks (Feriyanto, 2017)

Perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Contoh transaksi bisnis itu adalah ekspor-impor produk, pembelian bahan baku dari luar negeri, hingga investasi di negara lain. Kegiatan perdagangan internasional bisa dilakukan penduduk suatu negara dengan warga negara lain, individu-individu berlainan negara, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah satu negara dengan negara lain.(Diphayana, 2018).

Dampak Positif dan Negatif Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional berdampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak positif dari perdagangan internasional menurut Case (1996) adalah :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
2. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
3. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
4. Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
5. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja.
6. Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

Di samping itu, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif antara lain :

1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar.
2. Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
3. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas.
4. Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.

7.2 Teori Perdagangan Internasional

Konsep perdagangan internasional sudah muncul sejak abad ke tujuh belas dan delapan belas mengenai filosofi ekonomi yang disebut merkantilisme. Menurut teori tersebut bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah

dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor (Salvatore, 1997).

Terdapat beberapa teori terkait perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keunggulan Absolut

Menurut Adam Smith perdagangan dua negara didasarkan kepada keunggulan absolut (*Absolute advantage*), yaitu jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi sebuah komoditas, namun kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi komoditas lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dan memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan dengan komoditas lain yang memiliki kerugian absolut. Melalui proses ini, sumber daya di kedua negara dapat digunakan dengan cara yang paling efisien. Output yang diproduksi pun akan menjadi meningkat.

b. Teori Keunggulan Komparatif

Menurut David Ricardo meskipun suatu negara kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian absolut) dengan negara lain dalam memproduksi dua komoditas, namun masih tetap terdapat dasar untuk dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara tersebut harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih kecil, dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar.

c. Teori Proporsi Faktor Produksi

Menurut Heckscher Ohlin terdapat dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi.

d. Teori keunggulan kompetitif

Menurut Michael E. Porter dalam teori *The Competitive Advantage of Nation*, bahwa tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi (sumber daya alam yang tinggi dan

sumber daya manusia yang murah) yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi daya saing dalam perdagangan. Terdapat empat atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai sukses internasional, yaitu:

- 1) Kondisi faktor produksi,
- 2) Kondisi permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri,
- 3) Eksistensi industri pendukung,
- 4) Kondisi persaingan strategi dan struktur perusahaan dalam negeri (Salvatore, 1997).

7.3 Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran internasional (balance of payments) adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional antara seorang warga negara dengan negara lain (Nopirin, 2010). Tujuan utama dari neraca pembayaran adalah untuk memberitahu pemerintah mengenai posisi internasional negara dan membantunya merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Pemerintah juga secara berkala mengamati neraca pembayaran untuk membuat keputusan kebijakan. Informasi yang tertera pada neraca pembayaran negara juga sangat diperlukan oleh bank, perusahaan, dan seseorang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat didalam keuangan dan perdagangan internasional (Sukirno, 2010).

Komponen-komponen Neraca Pembayaran

Pada dasarnya, neraca pembayaran Terdiri dari 5 jenis neraca bagian yang sangat berkaitan dari mana raja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan adalah suatu daftar atau penerapan yang berkaitan dengan Perbandingan antar besaran nilai ekspor dengan nilai impor di dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun atau satu periode. Jika nilai ekspor melebihi nilai impor maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangannya.

Namun bila nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor maka negara tersebut mengalami defisit dalam neraca perdagangannya. Neraca perdagangan surplus bisa juga disebut sebagai neraca perdagangan aktif. Sedangkan neraca perdagangan defisit bisa disebut juga sebagai neraca perdagangan pasif.

2. Neraca Jasa

Neraca jasa adalah suatu neraca yang mencatat adanya transaksi jasa yang dilakukan dan dapat diterima pada suatu negara pada negara lainnya dalam jangka waktu satu periode atau 1 tahun. Contohnya seperti jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan jasa perbaikan dan masih banyak lagi.

3. Neraca Hasil Modal

Neraca modal adalah suatu neraca yang mencatat seluruh pembayaran dan juga penerimaan dividen, bunga gaji tenaga asing dan juga berbagai hadiah yang diberikan dari sahabat negara

4. Neraca Lalu Lintas Modal

Neraca lalu lintas modal adalah suatu neraca mencatat setiap kredit atau pinjaman dari luar negeri dan juga seluruh kredit atau pinjaman yang diberikan dari negara lain atau negara tetangga. Dalam neraca ini juga akan dicatat jual beli efek penambahan modal asing Pembayaran utang luar negeri dan juga bantuan luar negeri.

5. Neraca Lalu Lintas Moneter

Neraca lalu lintas moneter adalah suatu neraca yang mencatat dan juga memperlihatkan adanya perkembangan ataupun perubahan cadangan Devisa di dalam suatu negara. Cadangan ini bisa terdiri dari emas atau devisa.

Jenis-Jenis Neraca Pembayaran

- Neraca pembayaran defisit, defisit adalah neraca pembayaran yang menunjukkan adanya jumlah transaksi pembayaran dari luar negeri atau transaksi debit yang lebih besar daripada transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit
- Neraca pembayaran surplus adalah neraca pembayaran yang menunjukkan adanya transaksi debit yang lebih kecil

- Neraca pembayaran seimbang adalah neraca pembayaran yang menunjukkan adanya transaksi debet yang sama dengan transaksi kredit

7.4 Sistem Moneter Internasional

Dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat dimana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa. Para ahli beranggapan bahwa uang dan Sistem Moneter Internasional merupakan unsur yang bersifat netral baik ekonomis atau politis, namun anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Norma dan konvensi yang mengatur Sistem Moneter Internasional dengan ini mempunyai efek distributif yang penting bagi power suatu negara dan kesejahteraan dalam kehidupan negara tersebut. Suatu Sistem Moneter Internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing dan interdependensi global. Kemampuan Sistem Moneter Internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia, sebaliknya runtuhnya Sistem Moneter Internasional barat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. (Shapiro, 1992).

Salvatore (2013) dalam tulisannya yang berjudul *The International Monetary System: Past, Present and Future* menjelaskan, bahwa sistem moneter internasional merupakan suatu aturan, fasilitas serta organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam sistem transaksi ataupun pembayaran dalam level internasional. Ia menjelaskan bahwa sistem moneter internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian,

yakni fixed exchange rate dan floating exchange rate. Pembagian dua jenis sistem moneter tersebut diklasifikasikan berdasarkan sistem nilai tukar penetapan standar serta aturan mengenai cadangan aset yang ada dalam suatu). Dalam hal ini ia berpendapat bahwa selain dua jenis klasifikasi yang telah disebutkan, terdapat pula sistem yang menggabungkan antara fixed exchange rate dan floating exchange rate. Selain itu, sistem moneter internasional yang ada juga harus memenuhi klasifikasi dalam mengatur arus perdagangan sekaligus investasi dalam skala global agar keuntungan yang diperoleh dalam sistem perekonomian dapat didistribusikan secara adil dan merata ke negara-negara yang ada dalam sistem internasional.

8.1 Pengertian Ekspor

Dalam penelitian Silaban & Rejeki (2020) Ekspor menurut keputusan menteri perdagangan dan perindustrian Nomor 182/MPP/KEP/4/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor, menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara. Adapun daerah kepabeanan sendiri diartikan sebagai wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan udara serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. (Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.)

Menurut (Risa,2018) Perdagangan (Trading) luar negeri atau ekspor adalah kegiatan perdagangan antar Negara, dimana diantara keduanya akan timbul saling tukar- menukar produk barang. Pengiriman barang ke suatu Negara oleh satu Negara karena ada permintaan dari pembeli di Negara tersebut atau tidak dinamakan perdagangan ekspor.

Kemudian pada penelitian Agustina & Reny (2014) dalam Statistik Perdagangan Indonesia, ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara dialasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan Landas

Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kebebasan.

Dalam penelitian Farina & Husaini. (2017) pada buku Sukirno (2010) ada beberapa manfaat dari melakukan ekspor adalah:

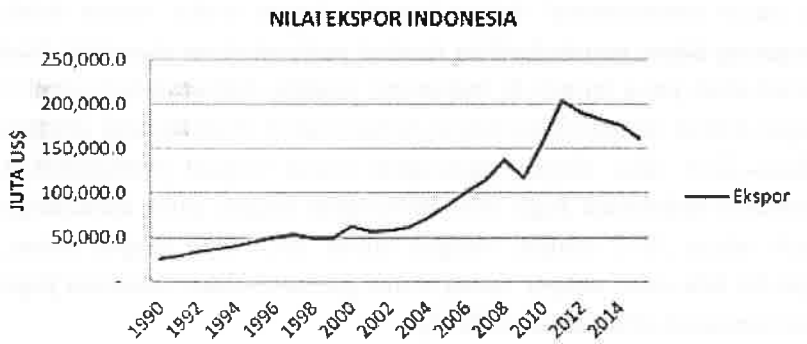
- a. Memperluas Pasar Kegiatan ekspor merupakan cara untuk memasarkan produk-produk dalam negeri ke luar negeri. Adanya kegiatan ekspor, produk yang dihasilkan di dalam negeri tidak hanya dikonsumsi oleh penduduk dalam negeri.
- b. Menambah Devisa Negara Kegiatan ekspor memungkinkan eksportir dalam negeri memasarkan produknya ke luar negeri. Transaksi ekspor ini dapat menambah devisa Negara yang merupakan salah satu sumber penerimaan Negara.
- c. Memperluas Lapangan Kerja Kegiatan ekspor akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan semakin banyaknya ekspor maka produksi yang dihasilkan akan semakin banyak.

8.2 Perkembangan Ekspor di Indonesia

Dalam penelitian Sihombing dkk (2021) Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki keanekaragaman dan melimpahnya sumber daya alam yang terdiri dari banyak komoditas, dan memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan transaksi ekonomi dengan negara lainnya. Tingkat keberhasilan suatu negara dalam kegiatan perekonomiannya dapat di lihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut.

Ekspor sangat banyak diminati bagi pengusaha-pengusaha Indonesia. Tetapi ekspor juga memiliki banyak kendala, seperti banyaknya para pengusaha lebih memilih mengekspor barang mentah dari pada barang jadi karena mengkespor barang mentah sudah memiliki harga yang cukup tinggi. Indonesia hampir setiap tahunnya mengalami surplus dari ekspor. Ketika Indonesia mengalami surplus itu dikarenakan kenaikan harga barang yang akan di ekspor bukan karena pertambahan nilai tambah. Pertumbuhan nilai ekspor non migas setiap tahunnya meningkat

disebabkan kenaikan jumlah ekspor dan harga di pasar internasional. Tetapi ekspor non migas juga mengalami kendala untuk meningkatkan ekspor non migas yaitu melemahnya permintaan ekspor non migas Indonesia di pasar internasional. Terdapat juga beberapa permasalahan yang menjadi kendala nagai ekspor migas Indonesia yaitu, banyaknya persaingan usaha, terbatasnya informasi tentang peraturan pasar ekspor, terbatasnya distribusi di daerah pedesaan, dan terbatasnya infrastruktur. Terdapat lima sektor non migas yang pertumbuhannya di atas lima persen yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian industri logam, industri karet dan industri kulit



Gambar : Nilai Ekspor Indonesia tahun 1990 - 2014 (Jutaan US\$)

Gambar diatas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang sangat mengandalkan ekspor dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ekspor dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami peningkatan. Walaupun secara grafik nilai ekspor mengalami peningkatan namun di tahun 2012 ekspor di Indonesia mengalami penurunan yaitu dari 203,496.6 (Juta US\$) di tahun 2011 menurun menjadi 190,020.3 (Juta US\$) di tahun 2012 dan terus mengalamin penurunan sampai tahun 2015 sebesar 176,292.7 (Juta US\$).

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa nilai ekspor berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teorindoi klasik yang dikemukakan oleh Teori Schumpeter menekankan tentang

pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan.

Dengan mengembangkan produksi barang dan jasa sampai ke pasar internasional dalam bentuk ekspor maka secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebutlah yang terjadi di Indonesia apabila dilihat dalam tabel 3 dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 nilai ekspor meningkat maka tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ikut meningkat begitu pula sebaliknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 nilai ekspor turun, apabila bila nilai ekspor turun maka pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun (Primandari, 2017).

8.3 Faktor yang Mempengaruhi Ekspor di Indonesia

Dalam Penelitian (Nisa, 2019) Perdagangan internasional terjadi karena adanya kebutuhan akan sumberdaya yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara. Negara tersebut memenuhi kebutuhan sumber daya melalui transaksi perdagangan dengan negara lain yang mampu memproduksi sumber daya terkait secara efisien. Kegiatan perdagangan internasional terdiri atas kegiatan ekspor dan impor. Kedua kegiatan tersebut memiliki kontribusi terhadap devisa yang diperoleh negara-negara yang terlibat didalamnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbukayang melakukan aktivitas ekspor dan impor.

Kemudian pada penelitian (Sutedi, 2014) Corak perdagangan Indonesia yang berkembang dari waktu ke waktu dibagi menjadi sektor migas dan nonmigas. Ekspor sektor migas terdiri atas minyak bumi dan hasil minyak, LNG (Liquid Natural

Gas), LPG (Liquid Petroleum Gas) dan sebagainya. Ekspor komoditas nonmigas itu sendiri terutama terpusat pada tiga kelompok yaitu barang manufaktur, komoditas pertanian, dan komoditas pertambangan. Kelompok barang manufaktur adalah tekstil, kayu, produk kayu, kertas, produk elektronik, minyak kelapa sawit, kerajinan tangan, dan produk-kimia. Komoditas pertanian antara lain meliputi hewan dan hasil hewan (contoh ikan tuna, sapi, dan udang), serta tumbuhan (contoh karet alam, coklat, lada, kopi, tembakau, cengkeh, rempah-rempah, dan kopra). Sementara itu, yang tergolong dalam komoditas pertambangan nonmigas adalah tembaga, emas, timah, nikel, aluminium, dan hasil tambang lainnya.

(Sutedi, 2014) menyebut bahwa Perkembangan perdagangan ekspor impor dunia tidak terbatas pada nilai perdagangan dan komoditas yang diperdagangkan, tetapi juga daya saing suatu produk. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan daya saing suatu komoditi ekspor yaitu:

1. Faktor langsung terdiri atas:

a. Mutu komoditi

Ringkasnya, mutu komoditi pada dasarnya ditentukan oleh komposisi antara seni (art), nilai teknis, dan selera pemakainya. Mutu komoditi antara lain ditentukan oleh:

- 1) Desain atau bentuk dari komoditi bersangkutan atau spesifikasi teknis dari komoditi tertentu.
- 2) Fungsi atau kegunaan komoditi tersebut bagi konsumen.
- 3) Durability atau daya tahan dalam pemakaian.

b. Biaya produksi dan penentuan harga jual.

Harga jual pada umumnya ditentukan oleh salah satu dari pilihan berikut:

- 1) Biaya produksi ditambah mark—up (margin keuntungan).
- 2) Disesuaikan dengan tingkat harga pasar yang sedang berlaku (*current market price*)
- 3) Harga dumping.

2. Faktor tidak langsung terdiri atas:

a. Kondisi sarana pendukung ekspor seperti:

- 1) fasilitas perbankan
 - 2) fasilitas transportasi
 - 3) fasilitas birokrasi pemerintahan
 - 4) fasilitas surveyor
 - 5) fasilitas bea cukai dan lain-lain
- b. Insentif atau subsidi pemerintah untuk ekspor
- c. Kendala tarif dan nontarif
- d. Tingkat efisiensi dan disiplin nasional
- e. Kondisi ekonomi global seperti:
- 1) Resesi dunia
 - 2) Proteksionisme
 - 3) Restrukturisasi perusahaan (modernisasi)
 - 4) Re-group global (kerja sama global)

8.4 Kebijakan Ekspor di Indonesia

Dalam Jurnal Ngatikoh & Faqih (2020) Tingkat keberhasilan suatu negara dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonominya yang dapat dinilai dari beberapa aspek di antaranya nilai ekspor dan impor yang memiliki pengaruh terhadap neraca perdagangan negara. Dikatakan berhasil apabila kemampuan dan kekuatan industrinya didukung oleh kemampuan ekonomi yang kuat dan tangguh. Untuk mewujudkan komitmen yang diperlukan tersebut dari pemerintah dalam rangka mendorong suksesnya pembangunan dengan memberikan dampak positif agar pertumbuhan ekonominya dapat berkembang pesat dan stabil, salah satu kebijakan dalam kaitan perdagangan internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan meningkatkan pendapatan secara nasional, masyarakat menjadi sejahtera dalam hal ekonomi. Dalam dekade terakhir ini sudah banyak studi menyatakan bahwa ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai sektor pembangunan dalam negeri serta dapat digunakan untuk membiayai impor. Masalahnya muncul ketika hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral sehingga menimbulkan masalah yang dapat mengganggu

perdagangan internasional agar dapat berjalan lancar, sehingga untuk mengatasi masalah perlu segera dicari jalan keluarnya, hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas masyarakat.

Ketentuan Ekspor (Risa, 2018)

Perdagangan antar Negara tersebut patuh atau tunduk kepada ketentuan dari masing-masing Negara sendiri. Seperti halnya eksportir di Indonesia dalam melaksanakan perdagangan ekspornya patuh kepada ketentuan atau peraturan internal ekspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam praktiknya ketentuan yang mengatur perdagangan ekspor adalah sebagai berikut.

- 1) Ketentuan internal adalah ketentuan transaksi ekspor yang dikeluarkan oleh intern pemerintah Indonesia melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (BI).
- 2) Ketentuan transaksi ekspor yang dikeluarkan oleh instansi tersebut diatas dilihat dari pihak bank pelaksana dalam hal ini pihak PT Bank Nasional Indonesia (PT BNI), merupakan ketentuan eksternal.
- 3) Kebijakan ekspor yang digariskan oleh bank-bank pelaksana dalam hal ini adalah PT BNI sendiri.

Ketentuan ekspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Departemen Perdagangan yaitu : **Pertama** : Menetapkan komoditi yang dilarang ekspor dan yang diperbolehkan/ diperkenankan ekspor. **Kedua** : Komoditi yang dapat diekspor dibagi menjadi : (1) Komoditi yang diawasi ekspornya. Contoh : Alat senjata dan perlengkapan angkatan bersenjata. (2) Komoditi ekspor yang diterapkan pengawasan mutunya. Hal ini menunjukkan sertifikat mutu of quality. (3) Komoditas yang diatur tata niaganya, dimana komoditi ekspor hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar. (4) Komoditi barang ekspor yang wajib diperiksa surveyor , dimana bahan bakunya berasal dari laur negeri atau barang ekspor tersebut terkena pajak ekspor. **Ketiga** : Negara tujuan ekspor. Pada dasarnya perdagangan ekspor dapat dilaksanakan ke semua Negara yang telah mempunyai hubungan dagang.

Ketentuan oleh Departemen Keuangan, antara lain :
Penetapan pajak ekspor setiap komoditas ekspor tertentu.
Besarnya pajak ekspor tersebut ditinjau setiap 3 (tiga) bulan.
Penetapan bunga diskonto atas hasil ekspor, Penetapan kurs
jual beli devisa dan Uang kertas Asing.

Perjanjian Dasar Ekspor (Sutedi, 2014)

Ekspor impor sebagai suatu rangkaian perbuatan perusahaan dalam jual beli barang tertentu senantiasa diawali dengan perjanjian. Perjanjian ini merupakan hasil kegiatan sebelum dilakukan oleh eksportir dan importer yaitu penawaran dan permintaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam *Sales contract*.

Tahap-tahap yang menyertai pelaksanaan perjanjian ekspor impor, yaitu :

1) Prakontraktual atau tahap awal perjanjian

Saat terjadi penawaran produk oleh penjual (eksportir), biasanya disertai dengan harga barang, mutu barang, jumlah barang, serta syarat-syarat lain yang biasa disebut *an inquiry for a quotation*. Apabila penawaran tersebut disetujui oleh pembeli (pembeli), kedua belah pihak mengikatkan diri untuk melakukan “perjanjian jual beli”, dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

2) Kontraktual atau tahap terjadinya perjanjian.

Kontraktual merupakan realisasi dari tahap awal perjuangan, yang kemudian dituangkan secara rinci dan tertulis tentang segala sesuatu yang dianggap penting dalam transaksi ekspor & impor.

3) Postkontraktual

Postkontraktual merupakan realisasi dari perjanjian, yaitu pelaksanaan kontrak.

Cara pembayaran transaksi ekspor (Risa, 2018)

Dalam transaksi Ekspor dikenal beberapa tata cara pembayaran sebagai berikut:

1) Advance Payment (Pembayaran di Muka)

Cara pembayaran ini pihak importer (buyer) telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak eksportir (seller) atas barang yang dijual sebelum barang tersebut dikirimkan kepada pihak importer. Dengan demikian importer membeli kredit (buyer credit) kepada eksportir.)

2) Open Account (Pembayaran Kemudian)

Cara pembayaran open account adalah merupakan kebalikan advance payment dimana pihak eksportir mengirim barangnya terlebih dahulu sebelum adanya pembayaran dari pihak importer dan pembayaran dilaksanakan kemudian. Dengan cara pembayaran seperti ini pihak eksportir memberikan fasilitas kredit (Seller credit) kepada pihak importer. Segera setelah eksportir mengapalkan barangnya dan mengirimkan dokumen pengapalan Bill Of lading (B/L) beserta Commercial Invoice tercantum tanggal berapa importer harus melakukan pembayaran mendahului tanggal tersebut diberikan diskonto.

3) Collection Basis (Inkaso).

Cara pembayaran secara collection basis atau inkaso merupakan teknik pembayaran seperti cara pembayaran open account (pembayaran kemudian) hanya bedanya dalam cara pembayaran secara collection basis, Eksportir memiliki dokumen autentik dan kepastian pembayaran atas barang yang dikirimkan kepada importer, pembayaran dengan collection basis ada dua jenis yaitu :

- Documents Against Payment (D/P)
- Documents Against Acceptance (D/A)

Pengelompokan Barang Ekspor di Indonesia

Menurut peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007. Disebutkan bahwa barang-barang ekspor diklasifikasikan menjadi empat kelompok, berikut ini :

1. Jenis barang yang diatur tata niaga ekspornya

Jenis barang ini hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar saja. Sedangkan eksportir terdaftar adalah perusahaan atau

perorangan yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Barang Diatur ekspornya ini meliputi :

- Produk Perkebunan : kopi digongsang/tidak digongsang, olahan
- Produk Kehutanan : produk dari rotan ataupun kayu
- Produk Industri : *asetat anhidrida, asam fenilasetat, efedrin, aseton, butanol*
- Produk Pertambangan : intan, timah, emas

2. Jenis barang yang diawasi ekspornya

Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk (eksportir khusus). Suatu barang diawasi ekspornya karena pertimbangan untuk menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri agar tidak mengganggu konsumsi dalam negeri.

Barang Diawasi ekspornya ini meliputi:

- Produk Peternakan : bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau, kulit Buaya, *wet blue*, binatang liar dan tumbuhan (*appendix II cites*)
- Produk Perikanan : ikan napoleon, wirasse, benih ikan bandeng.
- Produk Perkebunan : inti kelapa sawit (*palm kernel*), padi dan beras ,gula tebuatau bit dalam bentuk padat.
- Produk Pertambangan : gas, kokas/minyak petroleum, bijih logam Mulia, perak, emas, timah, minyak & gas bumi
- Produk industry : sisa dan *scrap* dari besi, baja stainless, tembaga, kuningan, aluminium, pupuk urea

Jenis barang yang dilarang eksportnya

Mengenai barang apa saja yang dilarang untuk diekspor diatur dalam Permendag Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (“Permendag 44/2012”). Berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) Permendag 44/2012**, Menteri Perdagangan menetapkan barang-barang tertentu yang dilarang untuk diekspor dengan alasan:

- 1) Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
- 2) Melindungi hak atas kekayaan intelektual;
- 3) Melindungi kehidupan manusia dan kesehatan;
- 4) Merusak lingkungan hidup dan ekosistem; dan/atau
- 5) Berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.

Suatu barang yang dilarang eksportnya karena pertimbangan :

- 1) Menjaga kelestarian alam
 - 2) Tidak memenuhi standar mutu
 - 3) Menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil atau pengrajin
 - 4) Peningkatan nilai tambah
 - 5) Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya
- Barang Dilarang eksportnya ini meliputi:

- 1) Produk Pertanian: anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias botia, udang galah ukuran 8 cm dan udang *panaadae*
- 2) Produk Kehutanan: kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api atau trem dari kayu dan kayu gergajian
- 3) Produk Kelautan: pasir laut
- 4) Produk Pertambangan: bijih timah dan konsentratnya, abu dan residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya dan lainnya, terutama yang mengandung timah dan batu mulia. (Totoaminoto,2019)

3. Jenis barang yang bebas

Barang yang bebas ekspor mempunyai ciri ciri berikut :

1. Mempunyai surplus produksi atau kelebihan jumlah produksi.

2. Mempunyai keunggulan tertentu seperti langka, murah, mutu baik, atau unik jika dibandingkan dengan komoditi serupa yang diproduksi Negara lain.
3. Komoditi disengaja diproduksi untuk tujuan ekspor.
4. Komoditi itu perlu perizinan dari pemerintah untuk ekspor.

9.1 Pengertian Impor

Dalam penelitian Silaban (2020), secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean (UURI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Pasal 1).

Menurut Susilo (2000) impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain (dalam negeri). Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara.

Kemudian menurut Berata (2014:7), Secara sederhana pengertian impor adalah Kegiatan memasukan barang dari luar negeri atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean kedalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Dalam Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015 pasal 4 mengelompokkan barang impor menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Barang bebas Impor
2. Barang dibatasi Impor
3. Barang dilarang Impor

Sarpini (2001) menyebutkan 5 metode pembayaran dalam perdagangan internasional, dalam hal ini impor, yaitu;

Pembayaran di Muka (Cash in Advance), Pembayaran Kemudian (Open Account), Konsinyasi, Inkaso (Collection Basis), Letter of Credit

9.2 Perkembangan Impor di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi masih minim dan kemampuan mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi dan jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga Indonesia melakukan kebijakan impor untuk barang setengah jadi menjadi barang jadi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan jumlah penduduk yang sangat besar. (Febrianty 2016)

Purba (2021) mengatakan bahwa konsumsi akan barang-barang di luar negeri dan minimnya produksi yang dilakukan di Indonesia, merupakan salah satu timbulnya masalah baru yang harus dihadapi Indonesia. Harga barang impor yang meningkat pesat namun cadangan devisa dalam negeri mengalami penurunan serta kurs rupiah terhadap Indonesia yang melemah menyebabkan pemerintah Indonesia semakin sulit untuk melakukan impor sesuai dengan permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.



Gambar : Perkembangan Impor tahun 2000-2019 (juta USD)

Dari data statistik diatas, impor Indonesia terlihat bahwa dari tahun 2000 sampai dengan 2019 secara umum meningkat. Walaupun terlihat mengalami penurunan pada tahun 2001 dengan total 30.962,1 juta USD, namun ditahun selanjutnya impor mengalami kenaikan menjadi 31.288,9 juta USD. Hal itu dikarenakan adanya perbaikan kondisi perekonomian makro Indonesia. Ditahun 2002 sampai dengan tahun 2008, impor Indonesia mengalami kenaikan secara terus-menerus dan terlihat menurun secara drastis hingga mencapai 96.829,20 juta USD pada tahun 2009 yang sebelumnya berada diposisi 129.197,30 juta USD. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia terkena dampak dari krisis permintaan dunia yang disebabkan oleh merosotnya pendapatan di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Ditahun selanjutnya mengalami peningkatan ditahun-tahun berikutnya, walaupun ditahun 2013 kembali mengalami penurunan secara berturut-turut sampai tahun 2016. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 186,628,70 juta USD dikarenakan akibat dari melemahnya permintaan dunia yang disebabkan krisis di Uni Eropa dan belum stabilnya perekonomian di Amerika Serikat. Dapat dilihat juga pada tahun 2017 dan 2018, impor mengalami kenaikan menjadi 188.711,30 juta USD. Hal itu disebabkan oleh naiknya impor nonmigas sebesar 457 juta USD atau sekitar 3.65%, walaupun impor migas turun 418 juta USD atau sekitar 16,31%. Penurunan impor migas dipicu oleh turunnya seluruh komponen migas yaitu minyak mentah, hasil minyak serta gas, serta adanya perang dagang Amerika Serikat dan China yang memicu pelemahan ekonomi dunia yang berimplikasi pada Indonesia. Dan ditahun 2019, impor Indonesia mengalami penurunan 5,62% dari 188.711,30 juta USD menjadi 170.727,40 juta USD. Hal tersebut terjadi karena semua golongan penggunaan barang, baik barang konsumsi, bahan baku atau barang penolong dan barang modal sama-sama mengalami penurunan dibanding periode tahun sebelumnya, masing-masing 4,51 persen, 11,07 persen, dan 5,13 persen. (Purba, 2021).

Kemudian, dalam penelitian Yuliadi (2008) triwulan II 2004 total impor barang dan jasa senilai Rp.133.371,3 juta meningkat

cukup tajam dibandingkan waktu yang sama tahun 2003 sebesar Rp.113.621,5 juta. Jika ditinjau dari komoditas yang diimpor nilai impor bahan baku dan penolong pada bulan April 2004 tercatat sebesar 2.804,9 juta \$US meningkat dibandingkan waktu yang sama tahun 2003 sebesar 2.086,2 juta \$US. Jenis bahan baku dan penolong yang paling besar diimpor adalah bahan bakar dan pelumas yang utama nilai impor April 2004 sebesar 442,7 juta \$US sedangkan untuk yang olahan nilainya 378 juta \$US. Kemudian disusul jenis komoditas suku cadang dan perlengkapannya untuk alat angkut yang nilainya 220 juta \$US dan untuk barang modal sebesar 210,1 juta \$US pada April 2004. Sementara untuk komoditas bahan baku industri nilainya sebesar 183,6 juta \$US dan yang olahan sebesar 1.170,2 juta \$US meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya 200,3 juta \$US untuk yang utama dan yang olahan sebesar 929,7 juta \$US. Jenis komoditas yang paling kecil nilai impornya adalah makanan dan minuman untuk industri yang nilainya sebesar 154,5 juta \$US meningkat dibandingkan tahun 2003 sebesar 62 juta \$US.

9.3 Faktor yang Mempengaruhi Impor di Indonesia

Dalam Rahayu (2018), Teori perdagangan internasional sejak lama diyakini oleh dunia sebagai pemberi sumbangan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi sebuah Negara. Terlebih dalam impor juga tidak lepas dari yang dinamakan harga. Karena harga juga mempengaruhi komoditas impor yang akan dijual kepada konsumen. Tetapi disisi lain Indonesia masih mengimpor barang atau jasa, dikarenakan pesatnya laju peningkatan konsumsi tidak sebanding dengan laju peningkatan produksi secara nasional.

Mahalnya harga dalam negeri dan murahnya harga impor diduga mengakibatkan produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Semakin tingginya impor juga diduga didukung oleh GDP. Perkembangan GDP meningkat, riil di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat sejalan dengan meningkatnya volume impor.

Selain GDP, kurs juga diduga memiliki keterkaitan dengan impor. Kemampuan impor suatu negara juga ditentukan dari nilai kurs mata uang yang berlaku pada saat itu. Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam perekonomian terbuka, karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, mengingat pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel makro ekonomi lainnya. Kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil. (Artianto, 2021)

Ketidastabilan nilai tukar ini mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan Internasional. Indonesia sebagai negara yang banyak mengimpor bahan baku industri mengalami dampak dan ketidakstabilan kurs ini, yang dapat dilihat dari melonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga barang-barang milik Indonesia mengalami peningkatan. Dengan melemahnya rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang dalam negeri (Febrianty, 2016)

Hasil penelitian Namira (2017: 197) menunjukkan bahwa variabel produksi, konsumsi, stok, harga domestik, harga internasional, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap impor di Indonesia.

Menurut teori Perdagangan Internasional yang dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, jika diterapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fika (2014) dengan adanya tingkat produktivitas yang berbeda dari negara-negara lain maka menyebabkan perbedaan jumlah produksi di masing-masing negara. Sehingga pemerintah dapat mengimpor dari negara yang tingkat produksinya tinggi agar dapat memenuhi konsumsi dalam negeri.

Kemudian ia juga memaparkan dalam penelitiannya bahwa Indonesia dapat mengimpor untuk menutupi kekurangan akan

konsumsi didalam negeri karena kenaikan tingkat konsumsi dalam negeri tidak diimbangi dengan produksi yang mencukupi.

Dan apabila harga lokal semakin tinggi maka masyarakat akan memilih barang impor yang harganya lebih murah. Beralihnya masyarakat memilih barang atau produk impor ini yang akan meningkatkan impor di Indonesia. Mahalnya harga lokal dikarenakan tingginya biaya produksi barang atau produk lokal sehingga para produsen menjual produk lokal dengan harga yang mahal guna menutupi biaya produksi dan memperoleh keuntungan.

9.4 Dasar Hukum dan Kebijakan Impor di Indonesia

Dalam Sihabudin (2015) Dasar hukum tentang IMPOR di Indonesia terdapat pada:

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 30/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
- Peraturan Perdagangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-Dag/ Per/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor,
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/ Kep/7/1997 mengenai Barang yang diatur tata niaga impornya

Salah satu kebijakan impor Indonesia adalah mengenai produk hortikultura, kebijakan ini dirumuskan untuk meningkatkan perlindungan pasar dalam negeri dari produk produk hortikultura yang berisiko terhadap kepentingan nasional.

Bahwa adanya kebijakan tata niaga impor selain untuk melindungi produsen dalam negeri dari kegiatan dumping atau karena meningkatnya produk impor, juga untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas keamanan dan kesehatan konsumen. Namun demikian, kebijakan impor juga harus memperhatikan kebutuhan

dalam negeri. Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengharapkan pemerintah untuk segera memperbaharui tata niaga impor pangan nasional karena adanya ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan sehingga rentan dengan spekulasi dan kartel dalam kegiatan impor pangan.

Kebijakan perdagangan internasional (Aprita 2020)

1. Proteksi adalah kebijakan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara, antara lain :

a. Larangan impor

Melarang impor produk tertentu yang juga diproduksi di dalam negeri, terutama untuk barang-barang yang memiliki daya asing lemah

b. Tarif impor

Mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap barang-barang tersebut.

c. Kuota

membatasi masuknya jumlah barang tertentu ke dalam negeri

d. Subsidi

memberi subsidi kepada produsen untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri

e. Premi

memberikan premi kepada produsen yang mampu mencapai jumlah produksi tertentu dengan kualitas yang baik sehingga memiliki daya asing.

2. Perdagangan bebas

Merupakan kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas, itu hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut

3. Politik Dumping

Merupakan kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar.

Kebijakan Impor sebagai Instrument Pengamanan Perdagangan (Sihabudin 2015)

Dalam jurnal Sihabudin (2015) dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrument strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Artinya dengan dikeluarkannya kebijakan impor dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menertibkan arus barang guna mengamankan produk dalam negeri karena melonjaknya produk barang-barang impor di pasar domestik. Untuk itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 23 A dinyatakan:

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

- a. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- b. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Tindak Pidana Penyelundupan dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku dalam Undang-Undang Kepabeanan (Wardhani 2018)

Tindak Pidana Penyelundupan (Smuggling atau Smokkle) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabeaan yang ditetapkan oleh undang undang.

Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau

impor, yang menimbulkan kerugian bagi Negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Mengenai kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup, yang berupa:

- a. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- b. Pungutan Negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Tidak terpenuhinya hal-hal di atas oleh Negara maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara

KEBIJAKAN INDUSTRI

BAB

X

10.1 Pengertian Kebijakan Industri dan Analisis Kebijakan

Kebijakan didefinisikan sebagai suatu daftar tujuan cita-cita (*goals*) yang memiliki urutan prioritas atau pernyataan umum tentang maksud dan tujuan (Starling, 1988). Menurut Pal (1997), "kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sekelompok masalah yang kompleks. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan (*action*) atau diamnya (*in-action*) otoritas publik (pemerintah) untuk memecahkan suatu masalah". Pada sub-bab ini akan dikemukakan beberapa literatur yang akan memberikan gambaran tentang definisi dari kebijakan industri dan analisis kebijakan.

A. Kebijakan Industri

Kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumberdaya pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu (dan, jika diperlukan untuk perusahaan tertentu) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas faktor masukan adalah salah satu bentuk regulasi pemerintah untuk mencapai kebijakan makro ekonomi yang pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan daya saing sektor industri atau perusahaan tersebut.

B. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan meliputi; konflik kebijakan-kebijakan, konsistensi internal, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, konsekuensi politis, masalah-masalah dalam implementasi,

penentuan prioritas, jadwal pelaksanaan program, dan evaluasi. Analisis kebijakan mencoba memberikan informasi tentang konsekuensi konsekuensi dari setiap tindakan (action) yang diusulkan (Starling 1988)

C. Hubungan antara Pembuatan Kebijakan dengan Analisis

Kebijakan Analisis kebijakan tidak dapat dimengerti sepenuhnya tanpa pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan. Straling memberikan sebuah kerangka/model tentang hubungan antara pembuatan kebijakan dengan analisis kebijakan . Kerangka tersebut menunjukkan hal-hal khusus di dalam proses pembuatan kebijakan di mana berbagai konsep analitis, proporsi, dan teknik dapat memberikan arahan bagi pemikiran, pemilihan, serta perilaku administratif dari pembuat kebijakan.

Hubungan antara Analisis dan Proses Pembuatan Kebijakan :

- 1) Identifikasi Masalah
- 2) Formulasi Kebijakan
- 3) Adopsi
- 4) Implementasi

10.2 Perkembangan kebijakan industri di Indonesia

(Rohaila,2011) Sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998, Indonesia sempat mendapat julukan calon Macan Asia, karena perubahan struktur ekonominya yang signifikan dari sebuah negara agraris menjadi negara industri baru, dengan industri manufaktur sebagaimotor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah waktu itu berhasil menciptakan proses pembangunan ekonomi yang pesat, membuat Indonesia sebagai negara industri yang menjanjikan di Asia Tenggara. Strategi yang dilakukan pemerintah waktu itu adalah mengundang investor asing, khususnya investasi jangka panjang/langsung (PMA), yang diharapkan bisa mendorong pembangunan industri manufaktur. Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) ini awalnya didukung oleh kebijakan substitusi impor dan kemudian pada tahun 1980-an diubah menjadi kebijakan promosi ekspor. Maka pada tahun 1980an PMA diarahkan ke industri-industri yang berorientasi

ekspor. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan industri nasional, khususnya manufaktur pada era Soeharto tidak bisa lepas dari PMA, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs). Pada era ini banyak industri bermunculan, baik dalam bentuk patungan antara perusahaan lokal dengan MNCs, maupun sepenuhnya MNCs. Banyak lahir pula perusahaan lokal sebagai pemasok input pada MNCs, walaupun masih relatif lemah dibanding negara lain. Ketergantungan pada PMA dapat menimbulkan kerugian bagi perkembangan industri nasional jangka panjang. Ini sama halnya dengan ketergantungan negara pada pinjaman luar negeri (foreign loan) untuk mendanai pembangunan dalam negeri, yang akan berakibat semakin lemahnya negara tersebut dalam jangka panjang. Tulisan ini memaparkan tentang keuntungan dan kerugian yang bisa terjadi terhadap industri nasional dengan kehadiran atau dominasi penanaman modal asing (PMA). Karena keterbatasan data, sebagian besar pembahasan didasarkan pada survei literatur.

A. Perkembangan Industri Nasional dalam 10 Tahun Terakhir.

Dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan industri ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu: diversifikasi dan pendalaman struktur industri. Aspek pertama (struktur horizontal), pertanyaannya yaitu: industri hilir apa saja yang ada di Indonesia? atau berapa macam produk yang dihasilkan oleh industri nasional? Pada tabel 1 dan tabel 2 kita bisa memahami bahwa tingkat diversifikasi menurut jenis barang yang dihasilkan oleh industri nasional cukup tinggi. Jika data pada tabel dua digit yang digunakan. Variasinya bisa lebih besar lagi. Misalnya kelompok tekstil terdapat bermacam produk kain, atau dalam kelompok pakaian jadi ada kemeja, celana, jaket, kancing, benang, T shirt, resleting, dan lain sebagainya.

Proses pembangunan ekonomi jangka panjang biasanya membawa suatu perubahan struktur ekonomi atau suatu transisi ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis non pertanian. Sehingga pembangunan ekonomi berjalan searah dengan perkembangan industri. Hipotesis yang bisa dibuat adalah suatu

korelasipositif antara tingkat pendapatan per kapita (indikator utama kemajuan pembangunan ekonomi) dan tingkat diversifikasi produk (indikator perkembangan industri) tersebut.

Diversifikasi juga dapat didasarkan menurut kategori barang, yang secara umum ada tiga kategori: 1) konsumsi (produk akhir): makanan, minuman, tembakau, pakaian jadi, radio, TV, dsb. 2) perantara (produk setengah jadi): produk dari karet, k, kimia bukan tujuan konsumsi, dan 3) modal: seperti mesin dan alattransportasi. Tabel 1 dan 2 menunjukkan Indonesia tidak hanya membuat barangbarang konsumsi saja tetapi juga barang-barang untuk keperluan produksi. Hipotesisnya: suatu korelasi positif antara tingkat pendapatan per kapita dan total output dari industri barang modal (sebagai persentase dari total output dari sektor industri pengolahan)

Diversifikasi menurut kategori barang juga memberikan indikasi lain yaitu kemampuan teknologi dari industri nasional. Teknologi yang terkandung di dalam barang modal secara umum lebih kompleks atau canggih dibanding barang konsumsi. Meskipun pada setiap kategori barang tersebut terdapat sub-sub kategori menurut jenis dan derajat kompleksitas dari teknologi yang terkandung di dalamnya. Contohnya tekstil mengandung teknologi yang lebih sederhana dibanding dengan alat-alat elektronik rumah tangga.

Dalam aspek ke dua (struktur vertikal) pertanyaannya yaitu: apakah barangbarang jadi yang di buat Indonesia mengandung lebih banyak kandungan lokal atautakah impor?. Atau apakah setiap barang yang dibuat di Indonesia memiliki struktur industri vertikal dari hulu ke hilir? Industri otomotif (industri hilir), mempunyai Keterkaitan produk ke belakang tidak saja dengan industri tengah yang membuat komponen otomotif, tetapi juga dengan kelompok industri hulu seperti industri baja. Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kedalaman struktur industri nasional adalah rasio dari nilai input yang diimpor terhadap nilai output yang dihasilkan (tingkat ketergantungan impor) dari masing-masing industri yang ada di Indonesia. Hipotesisnya yaitu: semakin maju industri nasional semakin dalam struktur industrinya.

Meskipun keterbatasan data untuk menunjukkan kemajuan industri nasional dari dua aspek pandang tersebut, namun suatu kejelasan bahwa awal orde baru hingga sekarang tingkat diversifikasi industri nasional mengalami peningkatan yang pesat. Kendati belum menandakan industri nasional berkembang secara mandiri. Keberadaan PMA menimbulkan munculnya industri-industri hilir, termasuk industri otomotif pada awal tahun 1970-an dengan PT Astra Internasional (PMA Jepang). Banyak industri hilir

Di Indonesia sebenarnya proses perakitan dari produk-produk merek luar negeri, bukan produksi dalam arti yang sesungguhnya, seperti produk Lokomotif Kereta Api Nusantara.

MNCs lebih tertarik pada industri hilir dari pada industri tengah atau industri hulu, karena industri hilir lebih menguntungkan, di mana pembelinya lebih potensial dari pada pembeli barang-barang antara dan modal. Mereka sudah memiliki merek-merek yang dikenal dunia, dan masuk ke Indonesia karena tenaga kerja murah dan pasar yang menjanjikan (luas), atau karena bahan baku/sumber daya produksi (SDP) banyak tersedia dan murah, dari pada ekspor dari negara asal mereka. Banyak MNCs memanfaatkan Indonesia sebagai basis ekspor ke negara-negara sekitar. Sebaliknya pertumbuhan industri tengah dan hulu masih relatif rendah dibanding laju pertumbuhan industri hilir. Ini merupakan hasil dari kesalahan pada awal industrialisasi Orde Baru yang lebih fokus pada industri hilir dengan penekanan pada perakitan yang didukung oleh kebijakan substitusi impor. Sebenarnya kebijakan tersebut diperkuat dengan kebijakan kandungan lokal. Tetapi hingga saat ini Indonesia belum berhasil membangun pola industri seperti di Jepang, yang industrinya memiliki keterkaitan kuat mulai dari hulu sampai hilir (Tambunan, 2010).

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Skala Menengah dan Besar di Industri Nasional Dirinci Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Sektor Industri (KBLI) 2 digit

KKBLI		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Makanan dan Minuman	4.559	4.552	4.414	4.638	4.721	6.615	6.495	6.316
2.	Pengolahan Tambakau	810	814	788	810	858	1.286	1.245	1.482
3.	Tekstil	1.901	1.892	1.847	1.889	1.834	2.609	3.067	2.701
4.	Pakaian Jadi	2.123	2.028	1.883	1.908	1.922	3.256	3.142	2.349
5.	Kulit dan Produk dari kulit (alas kaki)	564	533	612	493	491	813	783	737
6.	Kayu dan Produk dari kayu, bambu, dan sejenisnya (sepeil ayamara)	1.668	1.629	1.450	1.411	1.325	1.782	1.703	1.702
7.	Kertas dan Produk dari kertas dan sejenisnya	388	340	375	391	413	526	485	457
8.	Pencetakan, media rekaman	537	593	545	551	545	897	972	727
9.	Barang dari batubara, minyakgas, bb, nuklir	48	40	54	48	52	73	59	55
10.	Kimia dan produk dari kimia	1.089	1.014	1.003	1.017	1.011	1.179	1.141	1.253
11.	Karet, produk dari karet, plastik	1.416	1.463	1.422	1.482	1.477	1.847	1.792	1.881
12.	Barang-bahan bukan logam	1.657	1.614	1.518	1.507	1.523	2.047	1.955	1.965
13.	Logam Dasar	239	223	209	231	211	278	319	261
14.	Barang dari logam, kecuali mesin -peralatannya	908	932	896	880	880	1.020	1.003	854
15.	Mesin dan perengkapannya	529	474	390	407	407	477	467	383
16.	Mesin dan peralatan kantor, akuntansi dsb	9	9	8	7	7	10	13	10
17.	Mesin listrik lain dan peralatannya	235	244	247	248	252	279	267	290
18.	Radio, TV, Peralatan komunikasi dan perik.	141	166	206	220	191	227	230	273
19.	Peralatan kedokteran, navigasi, optik, alat ukur, jam dan lonceng	89	52	49	46	47	61	57	62
20.	Kendaraan bermotor	216	270	256	262	262	336	320	366
21.	Alat angkutan, selain kendaraan roda empat/lebih	354	329	334	322	297	380	345	431
22.	Mebel dan industri pengolahan lainnya	1.914	1.898	1.855	1.851	1.865	3.135	1.967	3.196
23.	Dalu ulang	24	28	63	66	55	137	120	54
	Jumlah	21.396	21.147	20.324	20.685	20.728	29.468	28.970	27.808

Secara garis besar industri nasional hingga saat ini masih mengalami banyak kendala untuk mengembangkan industri tengah dan industri hulu yang berdaya saing tinggi, di satu sisi, dan pada sisi lain untuk bisa lebih mandiri di dalam perkembangan industri hilir (tidak lagi sebagai tukang jahit MNCs), di sisi lain. Diantaranya; kurangnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas, lemahnya penguasaan teknologi. Rendahnya tingkat kewirausahaan, dan kurangnya perhatian pemerintah yang secara tegas dan konsisten mendukung perkembangan industri nasional.

Tabel 2. Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Industri Menurut Kelompok Indus (%)

Kelompok Industri	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Makanan, Minuman, Tembakau	20,5	3,1	6,7	11,3	32,7	16,9	26,2
Tekstil, kulit & alas kaki	29,1	4,3	2,7	0,5	47,1	3,9	27,0
Kayu & produk hutan	5,4	-3,8	-4,6	-8,5	-8,6	23,2	-12,5
Kertas & percetakan	36,8	15,9	7,9	0,03	27,7	7,7	17,4
Pupuk, kimia, karet, plastik, & produk ² nya	11,9	19,3	9,0	16,8	34,0	29,7	21,6
Semen & bahan galian non logam	0,7	2,5	21,7	15,5	-1,6	27,1	51,2
Mesin/listrik/non listrik & peralatannya	53,0	-6,1	43,9	20,4	21,1	8,4	2,2
Alat transportasi	50,6	-0,5	16,8	32,4	13,8	21,3	-6,3
Logam dasar dan produk-produknya	-0,1	3,6	11,8	5,0	41,8	20,8	7,2
Meubel dan industri pengolahan lainnya	14,7	10,3	7,2	5,1	70,2	13,2	25,2
Semua industri pengolahan non-miqas	16,3	5,4	9,8	10,5	29,7	16,3	19,3

Sumber: BPS

B. Alasan Masuknya PMA Di Dalam Industri Nasional

Ada dua isu penting yaitu: motivasi utama dan pertimbangan yang digunakan oleh sebuah perusahaan PMA dalam memilih negara tujuan yang banyak dibahas dalam berbagai literatur (studi manajemen, teori perdagangan internasional, dan teori investasi internasional). Literatur yang sangat terkenal dari Dunning (1997, 1993).

Menurut Dunning alasan utama melakukan investasi di luar negeri adalah:

1. Mencari sumber daya produksi (SDP) yang tidak dimiliki di negerinya. Kalau toh memiliki harga sangat mahal dibanding di luar negeri.
2. Mencari pasar yang tidak dapat dilakukan dengan biaya murah lewat ekspor karena ada tarif impor yang tinggi di negara tujuan, atau biaya transportasi yang tinggi.
3. Mencari efisiensi: memanfaatkan keuntungan dari perbedaan dalam ketersediaan dan biaya SDP di negara yang berbeda, atau mengambil keuntungan dari skala ekonomis dan skop serta perbedaan dalam selera konsumen serta kemampuan

suplai di berbagai negara (Beva & Estrin, 2000; Campos & Kinoshita, 2003)

4. Mencari aset strategis yang hanya bisa didapat di negara lain.

Misal PMA Eropa mencari basis teknologi baru di bidang penerbangan atau computer di USA. Jepang membuka perusahaan pakaian di Solo/Yogya untuk membuat pakaian bermotif batik, karena Jepang tidak menguasai tekniknya. Franco, dkk menyebut asset-aset seperti ini sebagai asset-aset non pasar, yang tidak mudah bisa dijual-belian secara bebas. Jika ada pertanyaan negara mana yang dipilih? Jawabnya: negara yang paling menguntungkan/memenuhi harapan PMA. Jika pertimbangannya mencari SDP (sumber daya produksi), maka Indonesia termasuk tujuan favorit, terutama pertambangan, pertanian, tenaga kerja murah. Tapi bagi tenaga kerja Indonesia yang murah saat ini menghadapi tantangan serius dari pesaing lain seperti India dan Cina, karena saat ini semakin banyak barang yang berbasis ilmu pengetahuan. Sementara kualitas tenaga kerja Indonesia lebih buruk dari kedua negara tersebut. Maka tak mengherankan jikalau India sangat laku sebagai salah satu pusat pengembangan computer dan jasa berbasis informasi teknologi (IT), dan bukan Indonesia. Dalam hal pasar, Indonesia, bersama India dan Cina adalah negara yang menjadi incaran bagi ekspor dan PMA, karena: 1) jumlah penduduknya yang sangat besar, 2) pendapatan per kapita yang meningkat, 3) sifat konsumtif masyarakat Indonesia, 4) produk modern yang berbau luar negeri sangat laku, 5) produk makanan yang berkualitas. Hal ini mendorong perusahaan asing yang memproduksi barang-barang tersebut akan memilih Indonesia sebagai salah satu basis produksi mereka. Di era globalisasi saat ini pasar domestik sudah tidak dominan lagi, karena kemajuan transportasi yang semakin murah dan informasi yang semakin mudah. Maka saat ini yang lebih penting adalah ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Sehingga bagi Indonesia harus berbuat lebih banyak untuk menarik PMA, dan tidak mengandalkan jumlah penduduk yang besar. Boleh jadi MNCs yang ingin melayani pasar Indonesia beroperasi di Singapura (pabrik minyak kelapa sawit).

Dalam efisiensi, MNCs akan mencari lokasi di mana mereka bisa mengombinasikan antara asetnya yang bisa bergerak dengan aset lain yang dibutuhkan, tetapi yang mempunyai mobilitas tinggi. Konsekuensinya perbedaan biaya produksi, kondisi infrastruktur, kemudahan melakukan bisnis, ketersediaan SDM berkualitas. Dan birokrasi pemerintah yang efisien menjadi sangat menentukan suatu lokasi menjadi pilihan MNCs. Kesamaan kepemilikan SDA dengan Negara lain, Indonesia harus mengembangkan keistimewaan ekstra dalam memiliki SDA dibanding negara lain yang juga memiliki SDA. Misalnya pemerintah memberikan jaminan keamanan, kepastian hukum, infrastruktur yang baik, aksesibilitas sepenuhnya terhadap SDA, agar MNCs merasa nyaman beroperasi di Indonesia. Dalam mencari aset strategis, seperti keahlian tradisional dalam membuat batik ukir, Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu negara penting tujuan PMA. Letak geografis yang strategis di Asia Tenggara. Indonesia juga harus bersaing dengan Singapura dan Malaysia, dan tampaknya Indonesia semakin terkalahkan oleh kedua negara tersebut. Sementara dalam pengembangan teknologi modern, Indonesia akan semakin tergeser oleh posisi Cina, Thailand, Malaysia dan India. Pertimbangan ini PMA akan mencari universitas/lembaga R & D yang memiliki basis pengembangan teknologi dan inovasi (Jepang, Korea selatan, Cina, Malaysia, Taiwan, India). Motivasi lain perusahaan asing masuk di Indonesia yaitu membeli perusahaan lokal yang collapses karena kekurangan modal sehingga asetnya dibeli dengan harga yang murah.

Kebijakan perdagangan di negara tujuan juga mempengaruhi keputusan MNCs dalam menentukan lokasi produksinya negara yang memiliki kebijakan perdagangan bebas jauh lebih menarik bagi MNCs dibanding negara yang melaksanakan kebijakan protektif yang berorientasi ke dalam negeri. Sebenarnya Indonesia telah melaksanakan kebijakan perdagangan internasional yang liberalistik, namun saat ini juga harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan internasional (Cina, Singapura).

C. Pengembangan Kawasan Industri Great Britain

Pengembangan kawasan industri di Inggris Raya sudah terjadi sejak Revolusi Industri terjadi. Namun sejak perang dunia kedua (setelah tahun 1945), pengembangan Kawasan Industri di Inggris Raya menjadi capaian sendiri bagi Pemerintah Inggris Raya pada saat itu (Bale, 1977). Menurut Norcliffe (1975, dalam Bale, 1977) pemilihan lokasi dari suatu pengembangan Kawasan Industri adalah berdasarkan beberapa faktor, yakni:

- 1) Ketersediaan Infrastruktur;
- 2) *Economies Of Scale*, baik dalam kawasan ataupun di luar kawasan;
- 3) Pola Keterkaitan dan Hubungan dari Kawasan Industri tersebut.

10.3 Syarat Kebijakan Industri

Menurut Rodrik (2004) kebijakan industri yang mampu mengatasi kegagalan tersebut secara umum mengikuti syarat sebagai berikut:

1. Insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus ditujukan kepada kegiatan baru. Menurut Rodrik (2004) salah satu tujuan dari kebijakan industri adalah untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi suatu negara dan menciptakan suatu keunggulan komparatif baru. Oleh karena itu kebijakan industri harus difokuskan untuk kegiatan yang menciptakan produk baru atau kegiatan produksi yang menggunakan teknologi yang baru.
2. Indikator yang jelas untuk menentukan kegiatan yang gagal dan sukses. Hal ini diperlukan agar Pemerintah tidak terus memberikan insentif kepada kegiatan yang seharusnya gagal dan agar perusahaan tidak terus meminta insentif kepada Pemerintah. Indikator yang dikeluarkan jangan berfokus kepada output dari kegiatan tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah kenaikan produktivitas dari kegiatan yang diberi insentif. Selain itu, Pemerintah juga bisa melakukan benchmarking kepada negara lain yang berhasil mengembangkan kegiatan yang sejenis.

3. Fasilitas yang diberikan Pemerintah harus berfokus kepada aktivitas, bukan sektor. Pemerintah tidak memiliki informasi yang sempurna mengenai kondisi seluruh sektor perekonomian di negaranya, sehingga jika Pemerintah harus memberikan fasilitas hanya berfokus kepada sektor tertentu hal tersebut dapat menyebabkan biaya kegagalan yang cukup besar jika sektor tersebut gagal.

Fasilitas yang diberikan haruslah berfokus kepada aktivitas yang tidak hanya mendorong perkembangan satu sektor tertentu, melainkan beberapa sektor. Contoh dari fasilitas tersebut adalah pembangunan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja. Aktivitas yang diberi subsidi oleh Pemerintah haruslah aktivitas yang memiliki potensi spillover terhadap aktivitas lainnya di perekonomian. Contoh spillover yang dimaksudkan adalah menarik investasi di aktivitas yang lain saling berkomplementer atau menciptakan informasi atau teknologi spillover.

4. Lembaga yang menjalankan kebijakan industri tersebut haruslah lembaga yang memiliki kompetensi yang tinggi. Jenis lembaga tersebut menentukan jenis insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah. Misalkan Pemerintah memiliki dua alternatif insentif untuk industri, yakni melalui kredit atau pajak. Jika lembaga keuangan di negara tersebut lebih kompeten, maka lebih baik memberikan insentif bagi sektor industri melalui alokasi kredit. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi potensi kegagalan institusi dari kebijakan industri ini.
5. Pengawasan yang ketat dengan outcome yang jelas dari lembaga yang menjalankan kebijakan industri tersebut. Pengawasan tersebut juga sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan politik tertinggi di negara tersebut. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada korupsi – yang sangat mungkin terjadi- dalam penerapan kebijakan industri tersebut.
6. Menjalankan komunikasi yang baik dan intens dengan sektor swasta. Lembaga yang menjalankan kebijakan industri tersebut memang harus independen untuk mencegah konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Namun, hal tersebut tidak

berarti tidak ada komunikasi dengan pihak swasta. Salah satu syarat sukses kebijakan industri adalah komunikasi yang baik dengan sektor swasta.

7. Jika kebijakan industri yang benar sudah dilakukan, kesalahan dalam memilih aktivitas pasti akan terjadi. Suatu aktivitas yang diberi insentif oleh Pemerintah diharapkan akan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian. Namun, tidak semua aktivitas akan memberikan hasil yang diharapkan dan hal tersebut merupakan hal yang wajar. Kesalahan dalam memilih aktivitas memang akan terjadi, dan hal tersebut bukan berarti suatu kebijakan salah. Dari kegagalan tersebut Pemerintah akan mampu menemukan aktivitas yang benar-benar sesuai dengan perekonomian di negara tersebut dan pada akhirnya mampu mengembangkan perekonomian secara keseluruhan.
8. Kebijakan industri harus mampu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Lembaga yang melaksanakan implementasi kebijakan industri tersebut harus mampu terus merevisi dan memperbarui kebijakan industri yang akan dilakukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu tugas kunci dari kebijakan industri adalah bagaimana suatu kebijakan industri akan berakhir sementara kebijakan baru diimplementasikan. Beberapa hal juga harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan industri, antara lain : (1) Pemerintah bukanlah aktor ekonomi yang mengetahui segala hal, sehingga setiap kebijakan industri yang dikeluarkan harus berdasarkan kondisi yang diketahui oleh Pemerintah secara pasti; (2) penerapan kebijakan industri sangat mudah terjadi korupsi dan rent-seeking, sehingga lembaga yang menerapkan kebijakan tersebut harus mampu mencari titik keseimbangan antara tingkat independennya dengan seberapa intens komunikasi dengan sektor swasta yang harus dilakukan (Rodrik, 2004); (3) Memasuki abad ke-21, perusahaan-perusahaan manufaktur semakin tidak terintegrasi secara vertikal dan semakin berspesialisasi di teknologi, sehingga kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan faktor globalisasi yang terjadi (Lall, 2003)

10.4 Industri Revolusi 4.0

Hermann et al (2016) menambahkan, ada empat desain prinsip industri 4.0. Pertama, interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP). Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi : (1) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat (2) kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Secara sederhana, prinsip industri 4.0 menurut Hermann et al (2016) dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Prinsip Industri 4.0 (Sumber: Hermann et al, 2016)

Tantangan industri 4.0 sebagai berikut;

- 1) masalah keamanan teknologi informasi;
- 2) keandalan dan stabilitas mesin produksi
- 3) kurangnya keterampilan yang memadai;

- 4) keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan; dan
- 5) hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.

Irianto (2017) menyederhanakan tantangan industri 4.0 yaitu;

(1) kesiapan industri;(2) tenaga kerja terpercaya; (3) kemudahan pengaturan sosial budaya; dan (4) diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yaitu; (1) inovasi ekosistem; (2) basis industri yang kompetitif; (3) investasi pada teknologi; dan (4) integrasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kewirausahaan.

Menurut Trilling dan Fadel (2009), pembelajaran abad 21 berorientasi pada gaya hidup digital, alat berpikir, penelitian pembelajaran dan cara kerja pengetahuan (lihat gambar 3). Tiga dari empat orientasi pembelajaran abad 21 sangat dekat dengan pendidikan kejuruan yaitu cara kerja pengetahuan, penguatan alat berpikir, dan gaya hidup digital. Cara kerja pengetahuan merupakan kemampuan berkolaborasi dalam tim dengan lokasi yang berbeda dan dengan alat yang berbeda, penguatan alat berpikir merupakan kemampuan menggunakan teknologi, alat digital, dan layanan, dan gaya hidup digital merupakan kemampuan untuk menggunakan dan menyesuaikan dengan era digital.

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAB XI

11.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia tidak pernah terlepas dari sektor-sektor yang mencerminkan kebutuhan dan pendukung aktivitas kebutuhan. Salah satu sektor yang mendukung perekonomian Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Pentingnya peranan tersebut menyebabkan kegiatan di bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan fokus utama sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Machmud, 2016).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan *General Comment 12* dari *The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)* hak atas pangan (*the right to food*) telah diakui secara internasional sebagai salah satu hak dasar umat manusia. Penyediaan pangan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya bagi seluruh penduduknya sehingga dapat memenuhi standar hidup yang layak, merupakan kewajiban negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai

komponen dasar untuk mewujudkan manusia yang berkualitas (Dewan Ketahanan Pangan, 2015).

UU Pangan selanjutnya mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Karena itu, UU Pangan bukan hanya berbicara tentang pemenuhan pangan seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan dengan harga yang wajar (food security), namun juga memperjelas cara pencapaiannya, yaitu dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat (food resiliency); dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan berdaulat (food sovereignty). Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Salah satu hak tersebut adalah tekad untuk kemandirian pangan, yaitu membangun kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi tepenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (Dewan Ketahanan Pangan, 2015).

Lingkup penyelenggaraan pangan yang diatur dalam UU Pangan mencerminkan luasnya cakupan pembangunan pangan nasional. Penyelenggaraan pangan diantaranya meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, dan peran serta masyarakat. Sinergi

pembangunan pangan difokuskan untuk (Dewan Ketahanan Pangan, 2015) :

- a. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- b. Menyediakan pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan mutu, gizi, dan keamanan bagi konsumsi masyarakat;
- b. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Mempermudah dan/atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
- d. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, bergizi, bagi konsumsi masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
- g. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

11.2 Pengertian dan Definisi Sektor Pertanian

Ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran dan konsumsi hasil-hasil pertanian. Pertanian merupakan industri primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air dan mineral serta modal dalam berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia (Ratag, 2016).

Menurut Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 8 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan

dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat (UU RI No 41 Tahun 2009).

11.3 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Undang-undang No.18 tahun 2012 mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (Badan Ketahanan Pangan, 2020).

Kerangka konseptual ketahanan pangan dalam penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti : produksi dan persediaan sendiri, pembelian barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau social, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memask, kondisi kebersihan, kebiasaan

pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, Pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga (Badan Ketahanan Pangan, 2020).

11.4 Cakupan Data

Di Indonesia sektor pertanian dalam arti luas dipilah-pilah menjadi lima subsektor diantaranya (Dumairy, 1996) :

1. Tanaman pangan

Tanaman pangan sering disebut subsektor pertanian rakyat yang mencakup komoditas bahan makanan seperti : padi, jagung, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayuran dan buah-buahan

2. Perkebunan

Dibedakan atas dua yaitu :

- a. perkebunan rakyat yaitu perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat dalam skala kecil-kecilan dengan teknologi yang sederhana. Hasil tanamannya berupa : karet, koprak, teh, kopi, tembakau, cengkeh, kapas, coklat dan rempah-rempah.
- b. Perkebunan besar yaitu kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan yang berbadan hukum. Hasil tanamannya berupa : karet, the, kopi, kelapa sawit, coklat, kina, tebu dan berbagai serat.

3. Kehutanan

Hasil hutan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu :

- a. penebangan kayu menghasilkan kayu glondongan, kayu bakar, arang dan bamboo
- b. hasil hutan lain menghasilkan rotan, getah kayu, kulit kayu serta akar-akar dan umbi-umbian

4. Peternakan

Subsektor ini meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil seperti telur, susu segar, wool dan hasil pemotongan hewan.

5. Perikanan

Subsektor ini meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah dan keramba.

Cakupan dalam penyusunan PDB sektor pertanian, industri pengolahan berbasis pertanian dan perdagangan berbasis pertanian mulai Februari 2014 dengan tahun dasar 2010 ini berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2009 dengan rincian sektor sebagai berikut :

Sektor	Sub Sektor
Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Tanaman Pangan2. Tanaman Hortikultura3. Tanaman Perkebunan4. Peternakan
Industri Pengolahan	<ol style="list-style-type: none">1. Industri Makanan dan Minuman2. Industri Pengolahan Tembakau3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi4. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional5. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
Perdagangan Besar dan Eceran	<ol style="list-style-type: none">1. Perdagangan Besar dan Eceran Tanaman Pangan2. Perdagangan Besar dan Eceran Tanaman Hortikultura3. Perdagangan Besar dan Eceran Tanaman Perkebunan4. Perdagangan Besar dan Eceran Peternakan dan hasil-hasilnya5. Perdagangan Besar dan Eceran Industri

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian Tahun 2015

11.5 Perkembangan PDB Pertanian 2013-2019

Tahun	PDB Sektor Pertanian
2013	Rp. 847,8 Triliun
2014	Rp. 880,4 Triliun
2015	Rp. 906,8 Triliun
2016	Rp. 936,4 Triliun
2017	Rp. 969,8 Triliun
2018	Rp. 1.005,4 Triliun

Sumber : Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Pemerintah selama lima tahun terakhir telah menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pertanian terbukti mampu mendongkrak dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan Raihan PDB pertanian 2018 melebihi target yang ditetapkan. Dalam kurun waktu 2013-2018, PDB sektor pertanian secara konsisten menunjukkan tren positif berdasarkan harga konstan 2010 (BPS), pada tahun 2013 PDB Sektor Pertanian sebesar Rp. 847,8 Triliun dan terus meningkat masing-masing menjadi Rp.880,4 Triliun pada 2014 dan Rp.906,8 Triliun pada tahun 2015. Pada 2016 dan 2017, PDB sektor pertanian Kembali meningkat menjadi Rp.936,4 Triliun dan Rp.969,8 Triliun. Hal yang sama juga terjadi pada 2018, dimana PDB Sektor Pertanian meningkat Rp. 1.005,4 Triliun. Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis, hal ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat. Pada tahun 2014, sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) berkontribusi sekitar 13,14 persen terhadap ekonomi nasional dan

pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,53 persen (Kementerian Pertanian Republik Indonesia).

11.6 Pengaruh Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap Perekonomian Indonesia

Pembangunan Pertanian tidak terlepas dari pengembangan Kawasan pedesaan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Lahan, potensi tenaga kerja dan basis ekonomi lokal pedesaan menjadi faktor utama pengembangan pertanian. Dari kondisi tersebut perlu disusun sebuah kerangka dasar pembangunan pertanian yang kokoh dan tangguh, artinya pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet dan mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga serta teknologi sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian harus berdasarkan asas 'keberlanjutan' yakni mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi (Wibowo, 2004).

Pertanian sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah dan perekonomian, dengan pertanian harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan dan sebagai sarana untuk berusaha. Peranan pertanian atau agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pengembangan lapangan usaha pertanian jangka panjang difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, seperti pengembangan agroindustry. Salah satu lapangan usaha pertanian yang berorientasi ekspor dan mampu memberikan nilai tambah adalah sektor perkebunan. Nilai PDB sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Jika diperhatikan dengan baik, peranan sektor pertanian masih dapat ditingkatkan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Indonesia. Secara empirik, keunggulan dan peranan pertanian atau agribisnis tersebut cukup jelas, yang pertama dilihat adalah peranan penting agribisnis (dalam bentuk

sumbangan atau pangsa relatif terhadap nilai tambah industri non-migas dan ekspor non-migas), yang cukup tinggi (Kusumaningrum, 2019).

11.7 Penelitian yang Relevan

1. Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah (Faqih, 2009).
 - a. Ada pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Tidak ada pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi pertanian.
 - c. Tidak ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi pertanian.
2. Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Salimah, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) variabel sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan diantara sektor-sektor lainnya dan dapat menyumbangkan penghasilan kepada pendapatan daerah untuk kegiatan masyarakat yang bersumber dari lahan usaha mereka. Sektor pertanian sangat bermanfaat bagi perekonomian khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yakni dapat memberikan peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan roda perekonomian dan berpengaruh dalam pengembangan usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran.

3. Analisis Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Periode 2011-2017 (Anggraini, 2019).

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada uji T, sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Periode 2011-2017. Sektor pertanian yang signifikan menunjukkan hubungan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai sektor pertanian yang negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya sektor pertanian sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena sektor pertanian merupakan sektor unggulan dengan pendapatan terbesar PDRB Kabupaten Lampung Tengah, namun setiap kenaikan sektor pertanian akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini karena kegiatan ekonomi masyarakat masih menjadi petani dan kurangnya produktifitas pengolahan lahan dalam hasil panen.

4. Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016 (Astuti, 2018).

Sektor pertanian dari segi produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2005-2016. Hal ini karena beberapa sebab diantaranya yang pertama, potensi pertanian tanaman padi di Provinsi NTB masih cukup besar mengingat luas wilayah dan potensi sumberdaya di daerah ini juga cukup besar mengingat luas wilayah dan potensi sumberdaya di daerah ini juga cukup besar. Kedua tercatat bahwa bahan pangan yang mendominasi pertumbuhan ekonomi di NTB karena kondisi usaha petani terus meningkatkan tingkat produksi bahan pangan mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk. Ketiga selain bahan pangan usaha petani selanjutnya adalah perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan juga mampu memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan peternak.

KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

BAB XII

12.1 Pengertian dan Instrumen Kebijakan Moneter

A. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang berfungsi mengatur jumlah pasokan uang dalam suatu negara untuk mencapai ekonomi yang stabil. Kebijakan ini bisa dilakukan melalui banyak hal, misalnya penyesuaian suku bunga, pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah, hingga menyesuaikan jumlah uang yang beredar di pasar. Pihak yang punya wewenang untuk mengeluarkan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kebijakan moneter adalah salah satu tugas mereka sebagai badan yang punya visi untuk mendorong inklusi keuangan nasional (Alifah, 2019).

Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dalam moneter antara lain sebagai berikut :

- Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang
- Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
- Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral
- Mencegah terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara umum

(Ananda, 2019).

B. Instrumen Kebijakan Moneter

Seperti diketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya sebagai berikut.

➤ Kebijakan Diskonto (Discount Rate)

Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi dimana bank-bank umum meminjamkan dana kepada bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi.

➤ Operasi Pasar Terbuka

Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Saat bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga.

➤ Kebijakan Rasio Cadangan Wajib

Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan.

➤ Penetapan Suku Bunga Acuan

Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya.

Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan.

➤ **Imbauan Moral**

Terakhir instrumen kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman

C. Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. **Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy)**

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)

2. **Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy)**

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

(Winando,2021).

D. Dampak Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Nasional

Berbicara tentang kebijakan moneter, apa itu yang dimaksud kebijakan moneter sendiri dan apa pengaruhnya bagi perekonomian? Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.

Dengan kata lain, kebijakan moneter sendiri merupakan suatu kegiatan pengendalian uang yang beredar dalam perekonomian dan salah satu bagian internal dari kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter. Oleh karena itu, pemerintah perlu merespons dengan baik dan cepat dalam mengatasi masalah perekonomian yang menyangkut kehidupan bermasyarakat bermasyarakat kecenderungan hasrat masyarakat dalam menukarkan uang dengan barang yang lebih bermanfaat dan memberi nilai tambah.

Efek ini dapat mempengaruhi semua sektor riil, yaitu berupa peningkatan produksi untuk memenuhi peningkatan konsumsi. Seorang monetaris, Milton Friedman meyakini bahwa ekspansi moneter dalam jangka panjang tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja tetapi hanya akan meningkatkan inflasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dan paham mengenai dampak yang akan ditimbulkan dimasa yang akan datang jika efek substitusi dilakukan jika tidak cermat dalam mengambil tindakan yang memicu terjadinya inflasi, menukarkan uang ke dalam bentuk asset keuangan.

Aset keuangan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja tetapi dampaknya justru mendorong perpindahan kapital ke luar negeri atau *Capital Flight* yang nantinya akan merugikan neraca pembayaran. Maksudnya, tingkat harga yang lebih rendah akan menurunkan suku bunga, sedangkan suku bunga yang lebih rendah akan mendorong pengeluaran untuk investasi. Apabila tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat suku bunga, maka investor akan memindahkan sebagian dana mereka ke luar negeri. Sehingga butuh waktu *recovery* yang tidak sebentar untuk

memulihkan ekonomi kita di era new normal seperti saat ini banyak Langkah atau aturan yang mesti di ambil pemerintah mau tidak mau untuk menangani masalah covid ini.

12.2 Fungsi Kebijakan Moneter

1. Mengendalikan laju inflasi

Kebijakan moneter dapat digunakan untuk menekan tingkat inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga secara terus-menerus yang berkaitan dengan pasokan uang yang berlebih sehingga nilai uang menurun harganya. Tingkat inflasi yang rendah berarti sehat bagi perekonomian negara, sementara tingkat inflasi tinggi bisa membahayakan.

2. Mengelola angka pengangguran

Kebijakan moneter juga dapat mengelola angka pengangguran dalam suatu negara. Misalnya saja, kebijakan ekspansif meningkatkan pasokan uang, kemudian merangsang investasi atau bisnis dan pada akhirnya meningkatkan lapangan pekerjaan.

3. Memelihara nilai tukar

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki kemampuan untuk memengaruhi nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan atau menarik uang cetak di pasaran. Bila terjadi penambahan pasokan uang, maka nilai tukar akan naik, sementara bila ada pengurangan pasokan uang, nilai tukar akan turun. (Alifah : 2019)

12.3 Defenisi dan Tujuan Kebijakan Fiskal

A. Defenisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang berada dalam otoritas pemerintah. Kebijakan fiskal mirip dengan kebijakan moneter yaitu untuk mengatur jumlah uag yang beredar, perbedaannya adalah kebijakan fiskal lebih menekankan kepada pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiskal Policy)

Fiskal (Latin: Fiscus) adalah berasal dari pribadi pemegang keuangan pertama di zaman Kekaisaran Romawi. Arti secara harfiah bisa diartikan sebagai “tas” atau “keranjang” (inggris: fisc) yang artinya perbendaharaan kerajaan atau perbendaharaan negara. Pengertian Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang berupaya untuk menjaga dan memperbaiki kondisi perekonomian dengan melakukan perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan Fiskal menjadi salah satu kebijakan ekonomi makro yang berada dalam otoritas utamanya pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diatur dengan menyebutkan bahwa “presiden memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaan keuangan beserta kekayaan negara”. Jadi pemerintah mengatur semua unsur APBN dengan Kebijakan fiskal yang meliputi pembelanjaan Negara atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah penanganan masalah tentang inflasi pada perekonomian nasional dengan cara mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara yang demikian ini disebut dengan pengelolaan anggaran. (Ma'ruf, 2021).

B. Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mempengaruhi alannya perekonomian dengan sasaran untuk:

- ✚ Meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi,
- ✚ Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,
- ✚ Menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.

Ketiga tujuan tersebut dicapai dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr) dan jumlah pajak (Tx) yang diterima

pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

1. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Kebijakan fiskal berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara yang meliputi: bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata dan yang lainnya. Disamping itu untuk pengeluaran negara contohnya: pembangunan sarana dan prasarana umum, belanja persenjataan, proyek pemerintah, pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sangat berperan penting menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2. Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran

Pengangguran adalah masalah yang cukup besar pada suatu negara, pelaksanaan kebijakan fiskal akan diaplikasikan dan di prioritaskan untuk upaya pencegahan timbulnya pengangguran. Tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang maksimal menjadi kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh sehingga berakibat pada bertambahnya orang yang menganggur. Kesempatan kerja penuh (full employment) adalah keadaan dimana semua pemilik faktor produksi bisa memperkerjakan seseorang pada tingkat dan harga (upah) yang berlaku dapat mendapatkan pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut. Konsep kesempatan kerja biasanya dihubungkan dengan kesempatan kerja manusia, sebabnya pengangguran tenaga kerja mempunyai pengaruh sosial yang luas.

3. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak.

Hilangnya harapan mendapatkan keuntungan bisa dialami perusahaan sektor swasta jika terjadi penurunan harga-harga umum yang tajam. Sebaliknya, harga yang terus meningkat juga akan mengakibatkan inflasi. Di sisi lain, inflasi dapat memberikan keuntungan pada beberapa kelompok orang dan

menciptakan kesempatan kerja penuh, namun juga berdampak negatif pada orang-orang yang berpenghasilan rendah atau tetap.

Inflasi yang deras akan mendorong lemahnya sektor swasta, penyebabnya karena investor akan cenderung berinvestasi untuk barang tahan lama, contohnya rumah dan tanah. Masalah inflasi yang tidak kunjung stabil akan membuat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

(Ma'ruf, 2021).

C. Faktor Mempengaruhi Kebijakan Fiskal

APBN, termasuk jumlah besaran dan komposisinya, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam negeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal).

Faktor internal tersebut antara lain adalah:

1. Arah dan strategi politik dan pembangunan yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan bernegara yang berimplikasi pada kebijakan keuangan negara. Tujuan bernegara tercantum dalam UUD 1945. Terjemahan tujuan tersebut dijabarkan dalam arah dan strategi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (25 tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menentukan prioritas, arah kebijakan nasional yang pada akhirnya menentukan komposisi belanja negara (APBN).
2. Perkembangan dan kinerja perekonomian nasional yang menggambarkan potensi, kapasitas dan struktur penerimaan negara. Penerimaan pajak suatu negara akan meningkat dengan berkembangnya perekonomian dan sering diukur dengan rasio penerimaan pajak terhadap perekonomian yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.
3. Kemampuan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian belanja negara. Hal ini berkaitan dengan politik anggaran

dan masalah serta kualitas birokrasi. Belanja negara yang dilandasi suatu pilihan politik tertentu akan menyebabkan pola dan alokasi anggaran yang berbeda-beda. Belanja negara cenderung terus meningkat setiap tahun, namun apabila dialokasikan pada prioritas belanja yang tidak tepat misalnya untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan rakyat dan perekonomian, maka akan berdampak sangat kecil/minimal terhadap kesejahteraan rakyat. Belanja yang besar dapat juga digero-goti oleh birokrasi baik dalam bentuk kebocoran maupun ketidak-efisienan, sehingga tidak akan menghasilkan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat keseluruhan.

4. Kemampuan pengelolaan pembiayaan anggaran. Bila suatu negara memiliki APBN yang surplus, maka masalah pembiayaan adalah bagaimana dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan surplus anggaran terutama untuk tujuan antisipasi kebutuhan negara di masa depan. Di negara-negara maju, kebutuhan negara masa depan dikaitkan dengan kondisi demografi (penduduk) yang semakin didominasi oleh kelompok usia tua, sehingga diperkirakan akan memakan anggaran pelayanan kesehatan dan menjaga kesejahteraan hari tua yang semakin tinggi. Sedang bila negara mengalami APBN defisit, maka tantangan terbesar adalah bagaimana mendapatkan pembiayaan anggaran yang paling beresiko kecil termasuk jatuh tempo utang yang berdurasi panjang dan berbiaya (beban bunga utang) rendah. Hal ini sangat ditentukan oleh akses pembiayaan (utang) baik dari berasal dari dalam negeri (pasar obligasi/surat utang domestik) maupun internasional. Akses tersebut ditentukan oleh tingkat perkembangan pasar surat berharga (obligasi), peringkat (rating), dan tingkat resiko dari negara tersebut. Risiko suatu negara ditentukan oleh seluruh kualitas APBN, baik dari segi jumlah, komposisi penerimaan, tingkat utang dan jatuh tempo, dan keseluruhan aspek pengelolaan resiko dan beban baik yang langsung maupun yang bersifat kemungkinan (kontinjensi). Negara yang memiliki tingkat hutang tinggi, serta kondisi politik yang cenderung

tidak stabil dan terus mengakibatkan belanjane negara yang berlebihan dan tidak hati-hati, serta memiliki kualitas birokrasi yangburuk, akan dipersepsikan memiliki resiko gagal (tidak mampu) mengelola anggaran dan utangnya. Dengan demikian peringkat utang negara ini menjadiburuk (non-investment grade), dan berakibat pada akses untuk mendapatpembiayaan menjadi sulit atau sangat mahal, sehingga makin mempersulit kondisi dan porspek perbaikan pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

5. Faktor-faktor non-ekonomi seperti terjadinya bencana alam, perubahan iklim, gejolak politik atau sosial, gangguan keamanan dan terorisme, sertaterjadinya perang. Faktor-faktor tersebut selain akan menyebabkan pendapatannegara menurun karena aktivitas perekonomian akan sangat terganggu ataubahkan berhenti, juga akan menyebabkan belanja negara melonjak untukpenanganan masalah. Dengan demikian APBN akan mengalami beban ganda.

Sementara itu, faktor eksternal penting yang juga turut berdampak padaperkembangan APBN Indonesia di antaranya meliputi perkembangan kondisiekonomi global, pergerakan nilai tukar rupiah dan antar-mata uang asing(khususnya mata uang kuat dunia yang menjadi mitra dagang utama dankerjasama ekonomi dengan Indonesia), harga minyak mentah di pasarinternasional, serta tingkat bunga internasional. Selanjutnya, karena isi, komposisi, dan nilai dalam APBN sangatdipengaruhi oleh struktur dan kemajuan perekonomian suatu negara, makaperkembangan APBN sebenarnya mencerminkan secara langsung kondisi dankeadaan ekonomi suatu negara. Salah satu indikator untuk melihat perkembangan APBN dari tahun ketahun adalah dari segi defisit/surplus anggaran. Data menunjukkan bahwapada sebagian besar periode pemerintahan orde baru APBN sebenarnya mengalami defisit, kecuali pada kurun waktu lima tahun menjelang krisis (1998) APBN Indonesia sempat mengalami surplus. Defisit tertinggi terjadi pada tahun 1975/1976 sekitar 3,2% terhadap PDB dan tahun 1986/1987 sekitar 3,3% terhadap PDB. Sedangkan defisit terendah terjadi pada tahun 1978/1979

sekitar 0,09% terhadap PDB. Pada kurun waktu lima tahun sebelum krisis, APBN mengalami surplus rata-rata 2,0% terhadap PDB. Pada saat krisis berlangsung, APBN kembali menjadi defisit karena APBN menanggung beban sangat berat biaya pemulihan dan penyehatan sektor perbankan dan untuk menciptakan stimulus fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi. Namun demikian, defisit anggaran sejak tahun 1998/2000 terus menurun, yaitu dari 4% terhadap PDB menjadi hanya 1,2% terhadap PDB tahun 2004. (Abror, 2021)

D. Macam-macam Komponen Kebijakan Fiskal

Ada empat komponen utama dari Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Perpajakan

Sebelumnya kita telah membahas secara detail tentang kebijakan perpajakan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pemerintah mendapat pemasukan dari pajak langsung dan tidak langsung. Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak progresif. Lebih lanjut, keputusan perpajakan sangat penting bagi ekonomi karena dua alasan:

- ✦ Tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya akan mengurangi daya beli orang dan akan menyebabkan penurunan investasi dan produksi.
- ✦ Tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya akan membuat orang-orang membelanjakan uangnya dan ini akan menyebabkan inflasi.

Dengan demikian, pemerintah harus membuat keseimbangan dan menerapkan tarif pajak yang benar untuk perekonomian.

2. Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan pengeluaran pemerintah berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Pengeluaran ini dilakukan pada bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll. Dan pengeluaran negarapun untuk membayar utang, bunga internal dan eksternal atas utang-utang. Anggaran pemerintah adalah instrumen paling penting yang mewujudkan

kebijakan pengeluaran pemerintah. Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembiayaan defisit yaitu mengisi kesenjangan antara belanja Pemerintah dan pendapatan.

3. Kebijakan Investasi dan Disinvestasi

Tingkat optimal investasi domestik maupun asing diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, Arus modal internasional atau FDI telah meningkat secara dramatis dan telah menjadi alat untuk mengintegrasikan ekonomi domestik dengan ekonomi global.

4. Pengelolaan Utang / Surplus

Jika pemerintah menerima lebih dari yang dihabiskan, itu disebut surplus. Namun jika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka itu disebut defisit. Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari sumber-sumber domestik atau asing. Opsi lain yang dapat diambil adalah mencetak uang untuk pembiayaan defisit (Priharto, 2018).

12.4 Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah (Chaerani, 2018).

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output perekonomian menurut Solow dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tabungan nasional). Secara tidak langsung kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara

dapat mengubah output dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang. Penurunan pajak T maupun peningkatan belanja G memiliki *Multiplier Effect* (efek penggandaan) terhadap pendapatan (output perekonomian) suatu negara. Alasannya ialah pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Kenaikan belanja pemerintah menyebabkan meningkatnya pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Jika MPC 0,6, penurunan pajak T sebesar Rp1,00 akan meningkatkan pendapatan ekuilibrium Y sebesar Rp1,50 (Tanda negatif mengindikasikan pendapatan yang bergerak kearah berlawanan dari pajak). Itulah mengapa kebijakan fiskal berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi (Chaerani, 2018).

Di Indonesia, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2013 hingga 2017, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dari penerapan kebijakan defisit. Kebijakan ini disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah G yang melebihi pendapatan. Peningkatan tersebut salah satunya bertujuan menstimulasi perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sejumlah alasan, diantaranya kinerja pertumbuhan PDB masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi ekonomi global, khususnya di negara-negara maju seperti Jepang dan kawasan Eropa. Selain itu, terdapat fluktuasi perubahan asumsi ekonomi makro yang turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi, peningkatan belanja pemerintah G akan menambah output perekonomian suatu negara secara langsung. Namun demikian, peningkatan itu tidak serta-merta akan terus terjadi seiring bertambahnya belanja pemerintah

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor lain yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, misalnya perekonomian global yang tidak stabil dan fluktuasi asumsi ekonomi makro. (Chaerani, 2018).

12.5 Instrumen Kebijakan Fiskal

(Tania, 2020) Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran, menurunkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan meningkatnya pengeluaran, pemerintah dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga mendorong perekonomian sektor yang bersangkutan. Dengan turunnya tarif pajak penghasilan, maka besarnya pendapatan bersih (disposable income) akan semakin meningkat yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal ekspansif cocok digunakan ketika ekonomi sedang lesu, karena kebijakan ini mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari resesi ekonomi (contoh: pengangguran, menurunnya investasi). Apabila kebijakan ekspansif diterapkan di ekonomi yang sedang memuncak, kebijakan ini berpotensi mempercepat inflasi dan meningkatkan tingkat suku bunga.

Di sisi lain, dalam kebijakan fiskal kontraktif, pemerintah akan mengurangi pengeluaran, meningkatkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan menurunnya pengeluaran, pemerintah tidak dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin menurun. Dengan meningkatnya tarif pajak, maka disposable income akan semakin sedikit dan masyarakat akan mengurangi konsumsi.

Pada umumnya, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan fiskal (baik ekspansif maupun kontraktif), perusahaan harus meningkatkan jumlah fiscal defisit dan meminjam uang untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Di periode waktu tertentu, terdapat penawaran terbatas untuk dana pinjaman (loanable funds) untuk pemerintah dan masyarakat. Apabila

pemerintah meminjam uang dalam jumlah yang banyak, maka dana pinjaman yang tersedia (supply) akan menurun. Di sisi lain, permintaan (demands) akan dana pinjaman akan terus meningkat. Sesuai dengan teori permintaan, dengan asumsi tidak ada penawaran (supply) tambahan, bertambahnya permintaan akan meningkatkan harga dana pinjaman, yang direfleksikan dengan tingkat bunga pinjaman (interest rates).

INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL



KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

BAB XIII

13.1 Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Sebuah negara yang maju maupun berkembang tentu tidak terlepas dari infrastruktur ataupun pembangunan infrastrukturnya dimana infrastruktur yang maju dan memiliki kualitas tentu dapat membantu perkembangan ekonomi atau perekonomian suatu negara. Terlebih negara Indonesia sampai saat ini terus berupaya meningkatkan percepatan pembangunan infrastrukturnya. Pada umumnya kita semua pasti sudah pernah menikmati atau menggunakan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah jalan tol yang menghubungkan antar kota maupun provinsi, jalan raya di kota maupun di desa, kelompok transportasi publik seperti bandara, kereta api, pelabuhan, serta masih banyak lagi infrastuktur lain baik dalam bidang ekonomi, politik dan lain-lain yang telah dibangun di Indonesia.

A. Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Untuk menghadapi tantangan ke depan yang lebih besar, pemerintah melakukan penguatan kebijakan terhadap tiga hal dalam upaya percepatan infrastruktur (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2019:10) :

1. Pertama adalah Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* sebagai tools berbasis data spasial dalam melakukan

sinkronisasi pembangunan untuk menghindari adanya tumpang tindih.

2. Kedua, pembentukan KPPIP sebagai *Special Delivery Unit* penyediaan proyek infrastruktur yang terdiri bukan hanya para Aparat Sipil Negara (ASN) tetapi juga dari profesional dan para ahli di bidangnya, yang menjadi menopang pemerintah sebagai pengambilan keputusan untuk mempercepat penyediaan proyek.
3. Yang terakhir adalah penerapan kebijakan terkait peningkatan partisipasi swasta, yaitu upaya perbaikan sistem regulasi yang mengatur investasi dari pihak swasta untuk menindaklanjuti besarnya kebutuhan investasi swasta sesuai dengan naskah teknokratik RPJMN 2020-2024 yang mencapai 42% dari total investasi.

B. Makna Percepatan dalam Penyediaan Infrastruktur di Indonesia

Penggunaan istilah percepatan dalam program pemerintah Indonesia bukan merupakan sesuatu yang hal yang baru lagi. Program percepatan di Indonesia sudah banyak dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi dalam berbagai bidang mulai dari pemberantasan korupsi pada tahun 2004, penanggulangan kemiskinan tahun 2010, pembangunan desa tahun 2017, dan lain sebagainya. Kebijakan percepatan dinilai sebagai suatu tindakan afirmatif untuk mengejar situasi ketertinggalan Indonesia di berbagai bidang.

Beranekaragam komite percepatan infrastruktur yang dibentuk diatas menunjukkan bahwa kebijakan akselerasi infrastruktur sudah dimulai jauh sebelum masa pemerintahan saat ini. Dari tahun 2001 pemerintah sudah berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan serta penyediaan infrastruktur dengan membentuk Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) didasari Keputusan Presiden nomor 81 tahun 2001. Kemudian berubah nama di Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2005. Meski demikian, baru di masa pemerintahan Jokowi pembangunan infrastruktur seakan marak

serta gencar dilakukan. Di masa akhir pemerintahan Bapak SBY, berubah nama, bentuk, dan wewenang didalam Perpres nomor 75 tahun 2014 yang kemudian diperkuat kembali tugas serta manfaatnya pada era pemerintahan Joko Widodo melalui Perpres nomor 122 tahun 2016. (Wahyu Utomo. KPPIP, 2018:04).

13.2 Percepatan Pengembangan Infrastruktur di Indonesia

Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia. (KPPIP, 2017).

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, pemerintah mencanangkan empat pilar utama Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia yang diluncurkan bersamaan dengan digelarnya *Infrastructure Summit* 2005. (Susantono & Berawi, 2012). Keempat pilar utama tersebut meliputi:

1. Pilar pertama adalah reformasi peraturan perundangan. Reformasi ini bertujuan untuk membuka peluang swasta secara langsung dalam pembangunan infrastruktur. Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Penerbangan, dan Undang-Undang Perkeretaapian dan semua turunannya direvisi sehingga membuka kemungkinan tidak hanya swasta tetapi juga masyarakat dan pemerintah daerah dapat ikut serta

dalam pembangunan infrastruktur.

2. Pilar kedua adalah penyusunan daftar proyek yang akan dipercepat pembangunannya, baik yang dibiayai oleh APBN maupun oleh skema KPS. Untuk proyek KPS, disusun KPS *Book* yang berisi informasi terkait proyek yang akan ditawarkan kepada pihak swasta. Beberapa proyek dipilih menjadi model proyek yang diharapkan dapat menjadi acuan proyek-proyek sejenis. Selain itu juga disusun kerangka pengelolaan risiko yang memberikan jenis penjaminan yang sesuai dalam pembangunan infrastruktur.
3. Pilar ketiga adalah pembentukan forum komunikasi yang erat antar pemangku kepentingan. Forum ini adalah gagasan awal terbentuknya Indonesia Infrastructure Forum yang menjadi wadah diskusi para pemangku kepentingan bidang infrastruktur, terutama dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Forum ini mengadakan pertemuan reguler dengan tujuan menjembatani informasi, interaksi, dan pewujudan aksi bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Forum ini sedianya merupakan organisasi komplementer Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KPPI) yang beranggotakan para menteri dan kepala lembaga terkait.
4. Pilar keempat adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Pada beberapa kementerian, dilahirkan badan pengatur sektor yang berfungsi sebagai regulator bagi sektor terkait. Sebagai contoh adalah di bidang jalan tol, yang diatur oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan di bidang air minum, dengan dibentuknya Badan Pengatur Sistem Penyediaan Air Minum.

Pemerintah mengoptimalkan alokasi anggaran pada proyek pembangunan infrastruktur guna mendorong pusat-pusat pertumbuhan wilayah (*growth center*). Pembangunan infrastruktur tersebut difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang telah ditetapkan sebagai basis perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR secara terpadu untuk

meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Salah satu pembangunan tersebut adalah pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan melalui pembangunan jalan paralel perbatasan untuk mendukung perekonomian masyarakat di beranda depan negara. Selain itu, pembangunan di perbatasan juga akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat keamanan dan pertahanan negara, disamping meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat setempat diharapkan agar investor tertarik untuk mendanai proyek. (Berita Publikasi Kemenkeu, 2017:07).

13.3 Peranan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).” – (Siagian, 1998).

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di semua negara, begitu pula di Indonesia, contohnya seperti tersedia jalan untuk lalu-lalang transportasi baik roda dua/lebih. Hal tersebut akan sangat membantu perkembangan aktivitas masyarakat di suatu wilayah, kegiatan bisnis atau usaha di suatu wilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah tersebut. (Bappeda, 2014:11)

A. Pemerintah

Peran pemerintah adalah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, seperti yang dijelaskan dalam konsep *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik). (Riyadi, 2004) mengemukakan sebuah koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyetarakan dan

penyelarasan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. (Imitihan dkk 2017).

Pemerintah senantiasa berupaya menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik dalam menjalankan tugas negara untuk masyarakat terutama dengan tersedianya infrastruktur. Penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah bagi warga negaranya karena infrastruktur juga disebut sebagai fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, bukan hanya dipandang sebagai fasilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk membangun infrastruktur yang penting bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pola antara lain (Danendra, 2010) :

- Proyek Pemerintah Pusat/Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pembangunannya dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/swasta. Sumber dananya bisa melalui Rupiah murni, atau berupa pinjaman/hibah luar negeri (lembaga multilateral/bilateral/kredit ekspor), biasanya disertai dengan rupiah pendamping.
- Proyek BUMN/BUMD, yang dibiayai oleh anggaran perusahaan sesuai dengan RKAP yang disetujui oleh Meneg BUMN/Pemda.
- Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (Konsesi), yang dibiayai oleh modal investor swasta, pinjaman perbankan/pasar modal domestik dan luar negeri. Peran Pemerintah hanya memberikan dukungan untuk proyek yang kurang menarik minat swasta, tetapi mempunyai kelayakan ekonomi yang tinggi.

B. Swasta

Peran swasta pada percepatan pengembangan infrastruktur negara sangat dibutuhkan dalam hal dana maupun untuk membantu pemerintah melancarkan proses pembangunan. Keterlibatan swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga kerja profesional setidaknya membantu pemerintah sebagai

pihak utama pelaksana pembangunan. Kerjasama antar pihak pemerintah dan swasta yang dilakukan haruslah memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan memiliki kontrak sah untuk jangka waktu tertentu. Tentunya, hal tersebut memiliki model proses yang menggambarkan bagaimana kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam melaksanakan kaidah-kaidah yang berkembang di wilayahnya. (Diarsa, 2019).

Public Private Partnership menurut *Asian Development Bank* (2008) memaparkan bahwa proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dapat dilakukan dalam beberapa cara yang juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya, namun harus dilaksanakan berdasarkan jenis proyek, manfaat kegiatan, dan jangka waktu pembangunan infrastruktur agar dapat menentukan jenis *Public Private Partnership* sesuai kebutuhan. Proses tersebut yaitu melalui *service contract*, *management contract*, *lease contract*, *concession*, *Build Operate Transfer (BOT)*, dan *Joint Venture Agreement*. (Putra, 2018).

C. Masyarakat

Apabila peran masyarakat terabaikan dan bukan menjadi salah satu pelaku utama dalam kegiatan pengembangan infrastruktur di Indonesia, pemerintah tidak dapat menjadi perencana, pengevaluasi, ataupun sebagai pelaksana utama dalam menjalankan kegiatan tersebut. Prinsip demokrasi sendiri yang sudah tertanam di dalam jiwa masyarakat Indonesia sudah jelas bahwa pemerintahan harus berasal dari, untuk dan oleh rakyat. Namun, seringkali keterlibatan masyarakat menjadi yang terakhir dalam proses pengembangan infrastruktur sehingga terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat yang selalu tidak tepat sasaran, akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berkembang.

Dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan pengulangan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti terlibat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik

tetapi juga dalam proses hubungan sosial antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat yang dapat berupa sumbangan mobilisasi sumber-sumber biaya pembangunan kegiatan yang produktif, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan di wilayah masyarakat tersebut, dan lainnya (Asariansyah, 2013).

Tjokroamidjojo, 1995 mengungkapkan bahwa bagian-bagian daerah ataupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan setiap kesempatan dan pembinaan tertentu.

13.4 Masalah yang Dihadapi dan Solusi dalam Percepatan Pengembangan Infrastruktur di Indonesia

Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia saat ini adalah mengatasi persoalan ketimpangan percepatan dan pengembangan infrastruktur yang terjadi antar wilayah di Indonesia. Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berperan signifikan dalam pengembangan wilayah karena dapat dilihat bahwa perkembangan infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiring dengan perkembangan ekonominya. Hal ini karena perkembangan ekonomi telah menuntut ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktivitas ekonomi akan semakin meningkat akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi. Dengan demikian perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling tergantung satu sama lain. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yang terjadi juga akan berperan terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan antarwilayah. (Sukwika, 2018)..

Ketimpangan pembangunan infrastruktur yang terjadi juga akan berdampak terhadap kesenjangan perkembangan perekonomian yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan antarwilayah. Ketimpangan pembangunan infrastruktur umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam, faktor

demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah dan juga konsentrasi kegiatan ekonomi yang berbeda, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur hanya berfokus terhadap wilayah tertentu karena mempunyai potensi peningkatan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Dalam rangka percepatan pengembangan infrastruktur di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu perlunya dilakukan peningkatan kualitas perencanaan yang mendekati kebutuhan riil, hal ini diperlukan untuk mengurangi deviasi antar perencanaan dan kebutuhan dana sehingga akan meningkatkan kredibilitas dan efisiensi penggunaan dana APBN. Adanya tata kelola yang baik juga merupakan langkah yang harus dilakukan dalam rangka percepatan pengembangan infrastruktur. (Tarigan dkk, 2017).

Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia dengan menyusun skala prioritas pembangunan khususnya yang memiliki daya dukung seperti akses untuk pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan yang dapat meningkatkan kemajuan perekonomian. Langkah-langkah yang juga dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta seperti memperkuat dan membuka peluang kerjasama bagi kontraktor yang akan mempertemukan industri jasa konstruksi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia (Susantono & Berawi, 2012).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu dengan cara meningkatkan total anggaran ke daerah-daerah dan juga mengalihkan anggaran yang kurang produktif untuk anggaran percepatan pembangunan infrastruktur secara signifikan untuk dapat digunakan bagi pembangunan infrastruktur di setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi tingkat kesenjangan infrastruktur antar wilayah sehingga dengan memadainya infrastruktur yang ada maka akan dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah (Susantono & Berawi, 2012).

CONTOH KASUS:

Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

(Panjaitan, 2019)

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya infrastruktur yang baik berakibat baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terciptanya lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita semakin meningkat. Pertumbuhan inklusif merupakan bagian besar dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan global mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pertumbuhan ekonomi sejatinya harus inheren dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan yang pro-poor merupakan modal utama bagi tercapainya pertumbuhan inklusif. Perekonomian Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari indikator pertumbuhan ekonomi yang senantiasa positif, dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan sejak tahun 2010 senilai 331.08 triliun rupiah menjadi 463.78 triliun rupiah di tahun 2016. Pencapaian pertumbuhan tersebut hendaknya menciptakan peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif (*Inclusive Growth*).

Tujuan penelitian adalah melihat bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sumatera Utara, dengan melihat indikator ekonomi dan infrastruktur ekonomi yang ada di Provinsi Sumatera Utara apakah sudah memberikan dampak inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode twostage least square (2SLS). Data dikumpulkan dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (2013-2017). Model persamaan simultan digunakan untuk melihat hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel

ekonomi yang terangkum dalam satu sistem persamaan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan simultan antara empat indikator dan keterkaitan antara variabel. Pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak yang positif terhadap peluang penduduk untuk bekerja serta menurunkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara . Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tidak inklusif karena pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Berdasarkan estimasi model persamaan simultan, diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sudah mampu mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan memperburuk ketimpangan. Saran untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebaiknya mengalihkan bantuan yang bersifat konsumtif ke produktif dengan mengadakan program pelatihan kerja bagi orang miskin, serta melakukan pembinaan dan bantuan modal bagi UMKM. Dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan ketersediaan lapangan kerja dengan pendapatan yang layak sehingga ii orang miskin tidak hanya mendapatkan pekerjaan tetapi juga memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan taraf hidup.

PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

BAB XIV

Globalisasi ekonomi, bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Jauh sebelum *nation-state*, perdagangan dan migrasi lintas benua sudah berlangsung sejak lama. Kurang lebih sejak lima abad yang lalu perusahaan – perusahaan di Negara-Negara yang perekonomiannya sudah maju telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia (Khor, 2002).

Disadari bersama bahwa globalisasi dapat memengaruhi segala sendi kehidupan bangsa di seluruh belahan dunia. Mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, HAM, dan lain sebagainya. Pada umumnya masyarakat di seluruh belahan dunia menyambut dengan terbuka produk globalisasi yang masuk ke Negeranya. Globalisasi telah menjadi kebutuhan tersirat dalam hidup setiap manusia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang sangat kompleks, menuntut globalisasi memecah diri secara lebih spesifik kepada berbagai aspek kehidupan manusia), faktor pendorong munculnya globalisasi di berbagai Negara adalah perkembangan IPTEK dan integrasi ekonomi Menurut (Sukmayani dkk, 2008).

Pada dasarnya, masyarakat menerima bawaan globalisasi, sebab globalisasi menawarkan kemudahan hidup melalui produk pengembangan IPTEK dan pemenuhan kebutuhan hidup melalui perguliran sistem ekonomi. Menyadari hal tersebut, Negara-negara dengan perkembangan IPTEK yang pesat ingin menguasai perekonomian di Negara lainnya dengan prinsip kapitalisnya (Soyomukti, 2008).

Ekonomi secara etimologi berarti usaha mengatur rumah tangga. Ekonomi menjadi kemasam yang rapi bagi motif ketergantungan antar manusia dengan tujuan mengatur pemenuhan kebutuhan hidupnya. Seiring berkembangnya IPTEK, ekonomi pun bertransformasi menjadi sebuah ilmu. "Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia sebagai individu dan kelompok, berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam usaha mencapai kemakmuran". (Hutabarat, 1997).

Definisi tersebut menggiring pemahaman kita bahwa, manusia senantiasa berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Persoalan ekonomi selalu menjadi fokus pemerintah di setiap Negara. Sebab pertumbuhan ekonomi yang baik dipercaya dapat melahirkan kesejahteraan warganya. Tren globalisasi di bidang ekonomi saat ini dapat dianggap hasil dari integrasi negara maju dengan negara yang kurang maju melalui investasi langsung asing, pengurangan batasan perdagangan, reformasi ekonomi, dan imigrasi dengan memegang prinsip saling menguntungkan. Dengan kata lain, Negara-negara di dunia mencoba memenuhi kebutuhan nasionalnya melalui interaksi ekonomi yang terintegrasi di seluruh dunia, dan fenomena globalisasi seketika menjadi rute yang sangat menjanjikan.

14.1 Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa dan Negara Indonesia

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global, sistem politik, ekonomi, sosial-budaya serta hankam yang dinamis, dalam melaksanakan pembangunan dari tahun ke tahun, merasakan dampak dari perubahan-perubahan dunia yang cepat dan mendasar. Hal ini tentu saja membawa implikasi pada perencanaan dan pengelolaan pembangunan nasional secara keseluruhan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, perubahan-perubahan itu sendiri akan berpengaruh pada perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan, para cendekiawan

dari berbagai disiplin ilmu, pelaku ekonomi dalam dunia usaha maupun perumus kebijakan di tingkat nasional. Semua perubahan-perubahan tersebut akan berimplikasi pada hal-hal antara lain sebagai berikut : Menurut (Pasaribu, 2015).

- a) **Perumus kebijakan di tingkat nasional**, bahwa perubahan yang cepat dan kecenderungan tidak menentu serta makin ketatnya persaingan atau kompetisi di berbagai bidang kehidupan, menuntut peningkatan strategi dan langkah-langkah operasional untuk penciptaan iklim bagi dunia usaha, aparat birokrasi, perangkat hukum, infrastruktur, penciptaan sumber daya manusia dan sebagainya yang terus makin meningkat efisiensi dan daya saingnya.
- b) **Pelaku ekonomi**, bahwa daya saing ekonomi nasional mulai meningkat, kemampuan produksi dan ekspor makin membesar. Untuk itu, diperlukan segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar bagi hasil produksi nasional, baik lewat perbaikan sistem perdagangan internasional dalam kerangka multilateral, regional, dan bilateral.
- c) **Pemerintah**, yaitu baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan makin memainkan peran sebagai fasilitator, pemberi dorongan dan bimbingan kepada para cendekiawan, tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu serta dunia usaha untuk terus meningkatkan daya saing dalam skala nasional dan global. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi harus dilanjutkan, tanpa menghilangkan campur tangan yang diperlukan, khususnya yang memberikan arah serta mendorong prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat.
- d) **Bagi dunia usaha**, dituntut untuk lebih luwes, lebih sensitif pada tuntutan pasar dan lebih jeli mempelajari peluang-peluang yang terbuka di pasar serta menerus meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaannya. Khusus pada globalisasi ekonomi, menuntut kelincahan dunia usaha dalam kerja sama antar para pelakunya dan dengan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di pasar dunia.

14.2 Perwujudan Nyata Terjadinya Globalisasi Ekonomi

Ada beberapa perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi menurut (Ayunda, 2020), sebagai berikut :

1. Produksi

Bentuk pertama adalah produksi yang pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya. Di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan ke beberapa negara dengan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti melihat dari faktor upah buruh dalam suatu negara yang sudah dianggap cukup reda atau murah. Sehingga tarif bea masuk ke negara tersebut juga tergolong murah. Bukan hanya itu, hal ini bisa juga dipengaruhi oleh infrastruktur yang sudah disediakan di dalam suatu negara.

2. Pembiayaan

Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi. Di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Tujuan dari pinjaman atau investasi ini adalah untuk dijadikan sebagai modal dalam sebuah usaha dengan harapan akan mendapatkan banyak keuntungan. Saat melakukan investasi atau pinjaman ini bisa dilakukan dengan secara langsung maupun secara portofolio.

3. Tenaga Kerja

Selanjutnya adalah bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Para tenaga kerja ini bekerja di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Karena pendapatan yang di dapatkan di negaranya masih tergolong rendah. Maka dari itu, setiap perusahaan yang ada di negara tersebut memanfaatkan dengan adanya tenaga kerja asing ini.

4. Jaringan Informasi

Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi itu menyebabkan semua informasi

dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Informasi yang didapatkan ini bisa melalui radio, televisi, maupun internet. Di mana internet ini adalah sumber informasi yang sangat cepat. Selain cepat, internet juga sangat mudah pada saat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia.

5. Perdagangan

Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Karena hal tersebut dijadikan sebagai permasalahan dalam proses perdagangan internasional atau perdagangan dengan beberapa negara. Maka dari itu, hambatan yang menjadi kendala sudah bisa dihapuskan atau tidak memiliki tarif dalam suatu negara.

14.3 Dampak Globalisasi Terhadap Ekonomi

Globalisasi ekonomi akan membawa dampak terhadap perkembangan ekonomi, adapun dampak tersebut dapat dikemukakan, Menurut (Murni, 2013) sebagai berikut;

1. Dampak positif globalisasi ekonomi meliputi

a. Produksi global dapat ditingkatkan

Pandangan ini sesuai dengan teori keuntungan Komparatif dari David Ricardo. Spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan.

b. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara

Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

- c. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri
Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri.
- d. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik
Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.
- e. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi
Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut.

2. Dampak Negatif Globalisasi Ekonomi

- a. Menghambat pertumbuhan sektor industri
Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. Dengan demikian perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk menuju sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat.
- b. Memperburuk neraca pembayaran
Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk

kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran.

c. Sektor keuangan semakin tidak stabil

Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

d. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja pertumbuhannya akan semakin lambat dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.

14.4 Analisis Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional

Kebijakan kerja sama ekonomi internasional harus memperhatikan kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Akan banyak muncul konflik namun kawasan Negara Indonesia tidak sering terdengar mendapatkan konflik perbatasan yang serius berupa bentrokan bersenjata dengan Negara-negara tetangga. Akan tetapi, sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Negara tetangga masih dapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum. Bahkan sering terjadi sejumlah insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik dilakukan oleh pihak sipil seperti nelayan dan pelanggaran lintas batas sipil lainnya, sampai kepada aparat pemerintah atau keamanan masing-masing Negara. (Zulkifli,2014).

Seiring dengan proses globalisasi yang semakin meluas termasuk dalam kawasan Asia tenggara maka akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari karena memegang peranan penting hubungan antar negara adalah kepentingan nasional masing-masing Negara. Permasalahan muncul ketika kepentingan-kepentingan nasional Negara-negara tersebut saling berbenturan yang pada akhirnya mempengaruhi pola hubungan antar Negara. Perundingan dan pembahasan masalah perbatasan bisa berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, bisa lima tahun atau sepuluh tahun, sementara tuntunan masyarakat yang hidup dikawasan perbatasan harus secepatnya dipenuhi, karena masyarakat yang menetap di wilayah perbatasan Indonesia pada umumnya hidup dibawah garis kemiskinan karena keterbatasan-keterbatasan dan ketergantungan terhadap lingkungan yang terbatas. Secara keseluruhan Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang didunia yakni 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai dunia.

14.5 Kekuatan/Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi

Globalisasi yang menyeruak dewasa ini dipicu dan dipacu oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi yang diistilahkan dengan Triple "T" Revolution, yaitu perkembangan kemajuan teknologi di sektor telekomunikasi informasi, transportasi dan perdagangan (liberalisasi perdagangan). Ketiga hal tersebut menjadi kekuatan pemicu dan pemacu globalisasi yang kita hadapi sekarang ini. Kekuatan teknologi tersebut telah mengubah masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin terbuka dan oleh nilai-nilai global yang menawarkan berbagai citra ideal yang ditopang oleh komunikasi yang sangat cepat dan kemajuan teknologi yang telah menyatukan kehidupan umat manusia dewasa ini.

Dewasa ini kita mengenal "bazar global" karena dunia sebenarnya telah merupakan pasaran bersama dengan adanya alat-alat komunikasi serta *entertainment global* melalui jaringan TV, internet, film, musik maupun majalah-majalah maka dunia dewasa ini telah merupakan suatu pasar yang besar (*global cultural bazaar*). Dengan mudahnya, transportasi dunia turisme tidak hanya menjadi monopoli negara-negara industri maju. Dewasa ini tidak mengherankan apabila kita menemui turis-turis Indonesia berada di mancanegara. Pembentukan dan penyebaran citra global dapat dilihat dengan nyata yaitu munculnya berbagai pusat perbelanjaan yang mewakili kemajuan bisnis. Di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia misalnya bermunculan pusat-pusat perbelanjaan yang tidak kalah besar dan isinya menyamai pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar lainnya, seperti di New York, London, Tokyo, Hongkong, Singapura dan Bangkok. Bisnis produk pertanian juga meningkat melalui jaringan pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Lihat saja pasar buah-buahan di Indonesia yang di banjiri oleh buah-buahan impor. Globalisasi itu, sebagaimana di utarakan oleh Presiden Soeharto bahwa suka atau tidak suka ia akan ada atau datang dan tidak bisa kita hindari. Globalisasi itu bergerak di tiga arena kehidupan manusia yaitu di arena ekonomi, politik, dan kebudayaan. Di dalam arena ekonomi

proses globalisasi tersebut mempengaruhi pengaturan-pengaturan sosial dalam produksi, pertukaran barang, distribusi dan konsumsi baik barang maupun pelayanan (*service*). Dalam globalisasi politik tampak terlihat berkurangnya peranan pemerintah dan membesarnya peranan masyarakat (swasta). Kita lihat saja munculnya barisan SATPAM sebagai penjaga keamanan di kantor-kantor atau di daerah pemukiman yang eksklusif. Dalam bidang komunikasi mempergunakan ekonomi, peran swasta semakin besar menuju kegiatan internasional atau kegiatan antar pemerintah. Apabila sebelumnya kita mengenal bentuk-bentuk budaya yang terikat pada waktu dan tempat, yang beraneka ragam dengan nilai-nilainya yang spesifik, dengan adanya proses globalisasi ini mengancam keberadaannya. Kontak dengan budaya lain sudah merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dielakan karena hubungan komunikasi yang tidak mengenal batas-batas negara (Hanantijo).

A. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Mengundang investor asing harus terus dilakukan untuk menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh dan membuka lapangan pekerjaan. Harus diakui, pemodal besar bisa mengubah warna ekonomi suatu daerah secara cepat dan instan. Namun, penguatan ekonomi kerakyatan juga wajib dilakukan. Meskipun tidak bisa membawa perubahan secara drastis, tapi penguatan perekonomian bawah bisa meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Ekonomi rakyat umumnya bersifat padat karya. Dengan gelontoran dana yang sama, lapangan kerja yang tercipta lebih besar daripada industri padat modal. Penguatan dunia usaha rakyat juga akan meningkatkan daya beli yang akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan ini jelas akan menjadi pasar potensial bagi investor. Investor akan lebih bergairah untuk menanam modal dan akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut.

B. Peningkatan Laju Ekspor.

Kontribusi Pemerintah untuk Dalam dunia perindustrian, masalah tentang ketersediaan modal yang cukup, teknologi informasi yang memadai, dan tenaga kerja yang terampil di bidangnya serta diimbangi dengan keahlian pengusaha, organisasi dan manajemen perusahaan, pemakaian teknologi maju dan input lainnya akan memberikan andil yang besar dalam mencetak produk dalam negeri bermutu tinggi. Disinilah kerja sama Pemerintah dan pengusaha sangat dibutuhkan untuk menciptakan hasil produksi perusahaan yang bermutu.

C. Pemberdayaan UMKM

UMKM hadir sebagai salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk bangkit dari masa-masa krisis ekonomi. Selain itu, UMKM tumbuh dengan sementara itu pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia. Disinilah dapat dilihat betapa kuatnya pengaruh UMKM di Indonesia, yang jumlahnya sekarang masih terus bertambah. Melalui pasar bebas, UMKM justru tak perlu khawatir akan tergerus oleh serbuan barang impor, karena dengan nilai-nilai lokal yang diusungnya menjadi senjata utama menghadapi barang asing. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM, harus mendorong tumbuhnya sentra-sentra UMKM dan sekaligus mempersiapkan tenaga konsultan yang mengerti tentang bisnis. Terlebih lagi pada era persaingan global seperti sekarang ini, dimana UMKM dituntut harus menguasai.

D. Ketahanan Ekonomi.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong aktif. Harus diusahakan keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu Pemerintah, BUMN, Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

14.6 Faktor pendorong kerja sama antar negara ASEAN

Ada beberapa faktor pendorong kerja sama antara ASEAN menurut (Wulandari, 2021);

1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam

Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerja sama antarnegara. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerja sama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan beras.

2. Kesamaan dan perbedaan wilayah (kondisi geografis)

Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagai contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerja sama melalui organisasi ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- (United research institute on social development, UNRISD)
Multinational Enterprises and the Global Economy. Harlow:
Addison-Wesley. Geography, April, 62(2), pp. 87-92.
- A Samuelson, Paul & William. 1997. *Mikroekonomi*. Jakarta :
Erlangga
- Abdillah, Fahri. 2018 . *Sejarah Kehidupan Ekonomi dan Politik Masa
Reformasi*.
- Abrol, Rizaldi. 2021. *Jenis-Jenis Tenaga Kerja*. Pahamify Blogspot.
- Abror, Muhamad. 2021. *Pengertian Kebijakan Fiskal beserta Fungsi
dan Jenisnya*.
- Adam, Everest E & Ebert, Ronal J. 1970. *Productivity and Quality*.
Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta :
Raja Grafindo Persada.
- Agustina dan Reny. 2014. *Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar
Rupiah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa
Indonesia: Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol 4 (2)*.
<https://mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/view/214/137>
- Ahmad. 2021. *Pengertian Ekonomi Kerakyatan: Ciri, Prinsip dan
Penerapan di Indonesia*
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-kerakyatan/>.
- Alifah, Nisrina Salma. 2019. *Pengertian Kebijakan Moneter,
Fungsi dan Instrumennya*. <https://lifepal.co.id/media/kebijakan-moneter/>
- Amidan, 2005. *Tinjauan Tingginya Angka Pengangguran Dari
Perspektif Hak Asasi Manusia. Makalah Dipaparkan pada
Semiloka "Memetakan akar Masalah dan Solusi Tingginya*

- Angka Pengangguran di Indonesia, pada tanggal 18-19 Juli 2005 di Purwakarta.
- Amir, Machmud. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Penerbit : Erlangga
- Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2015. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian Tahun 2015.
- Ananda,Rizki.2019. *Pengertian dari Kebijakan Moneter dan Contoh Kebijakan Moneter*.
- Anggelineliya. 2019. *Bagaimana penerapan sistem ekonomi di Indonesia*. Diakses pada 17 oktober 2021. Dari: <https://brainly.co.id/tugas/24652201>.
- Anggraini, Saputri. 2019. *Analisis Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Periode 2011-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers
- Artianto, Dandi. 2021. *Penanganan Impor Komoditas Soyabeen Meal Milik PT. FKS Multi Agro Oleh PT. Samudera Perdana Selaras Semarang*. Unimar AMNI.
- Asariansyah, Muhammad Faisal; Choirul,Saleh & Rengu,Stefanus Pani. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan*. Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No.6
- Astuti, Ristina Wahyu. 2018. *Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ayunda, 2020. *Globalisasi Ekonomi : Pengertian, Bentuk dan Pengaruhnya pada Bisnis*. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/globalisasi-ekonomi/>
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2020. Panduang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan

- Pangan (Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA) Provinsi 2020
- Bale, J., 1977. *Industrial Estate Development and Location in Post-war Britain*.
- Bappeda. 2014. *1 Trilyun, Kebutuhan Dana Pembangunan Jalan Kabupaten untuk Capai 100% Kondisi Baik*. Berita Publikasi Bappeda Grobogan.<https://bappeda.grobogan.go.id/2-uncategorised>
- Basri,F & Munandar,H. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional : Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana
- Bennyli.2011. *Sistem Perekonomian*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian.
- Berata, I Komang Oko. 2014. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Raih ASA
- Beva, A. dan Estrin,S.2000. *Determinant of FDI in transition economies*.Working Paper No. 342 Center for New Emerging Market, London Business School, London.
- Boediono. 2001. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Campos, N. & Kinoshita, Yuko. 2003. "Why Does FDI go where it goes?. IMF Working Paper Series, Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Chaerani,Eva Yunadia. 2018. *Kebijakan Fiskal Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.
- CNN Indonesia. 2021. *Investasi asing mengalir lebih deras ketimbang lokal*"<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021/0426135117-92-634842/investasi-asing-mengalir-lebih-deras-ketimbang-lokal/amp>.
- Danendra, A.A.G. 2010. *Kerjasama Pemerintah dan Swasta Pada Sektor Infrastruktur*.
<https://kppu.go.id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur/>
- Dewan Ketahanan Pangan.2015.*Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019*.
- Diarsa, Nayaka Fally. 2019. *Peran Swasta dalam Pembangunan Wilayah*. Universitas Sriwijaya

- Diphayana, Wahono. 2018. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta : Deepublish.
- DSL.2020. *Ketenagakerjaan: Pengertian, Peraturan & Masalahnya*
- Dumairy,1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dunning, J.H. 1997. *Trade, Location of Economic Activity and the Multinational Enterprise: a search for an eclectic approach*. London: Macmillan.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Elena, Maria. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19, Ini Sektor-sektor yang rentan kena PHK*.
- Fa'izah, Addina Zulfah.2021. *Tujuan Investasi Pengertian dan Manfaat Investasi*.
- Faqih, Asrul. 2009. *Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja Dan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah*. Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Farid, Harianto dan Siswanto, Sudomo. 1998. *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*. PT Bursa Efek Jakarta, Jakarta
- Farina, Fenin & Husaini, Achmad. 2017. *Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor Dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika Serikat* . Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 50 No. 6.
- Febrianty, Hastina 2016. *Analisis Perkembangan Impor Beras Di Indonesia*. Ekonomikawan vol 16,no 2.
- Feriyanto, Andri. 2017. *Perdagangan Internasional : Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*. Pustaka Baru Press.
- Fibrianti, Livia. 2021. *Kondisi Pertumbuhan Ekonomi saat Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jakarta.
- Fika, Marisa. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Bawang Putih Di Indonesia Tahun 1980-2012*. Economics Development Analysis Journal, Vol 3 No 2 (2014) <https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3820>
- Gilarso,T.1986. *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar Jilid 1*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

- Gitman, Lawrence and Joehnk. 2005. *Principal of Managerial Finance. 11th edition*. United States; Pearson.
- Gregory, Paul R & Stuart, Robert C. 2013. *The global Economy and its economic systems*. Cengage Learning: South-Western.
- Guru ekonomi.(2021). *Sistem ekonomi*. Diakses pada 30 oktober 2021. Dari: <https://sarjanaekonomi.co.id/sistem-ekonomi/>
- Hadiwinata,Thomas.2021. *Pertumbuhan Investasi Langsung di Indonesia selama kuartal I-2021*. Business Insight.
- Hamzah.1990.*Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hanantijo, Djoko. Strategi SDM Dalam Menghadapi Persaingan Global. Surakarta.
- Hanoatubun, Silpa.2020. Dampak Covid-19 Terhadap perekonomian Indonesia. Journal Of Education, Psychology,and Counseling Vol 2 (1).
- Herlina.2020.*Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Al-MUTHARARAH : Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan.
- Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. 2016. *Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios*. Presented at the 49th Hawaiian International Conference on Systems Science.
- Hia, Yulna Dewita. 2013. *Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran*. *Economica*, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol. 1 No. 2.
<https://kppip.go.id/opini/meluruskan-kembali-makna-percepatan-dalam-penyediaan-infrastruktur/>
- Humas-Sekretariat kabinet RI. 2018. *4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk 87 Juta Pengangguran Terserap Kemiskinan Tinggal 98%*, diakses 15 oktober 2021, dari (<https://setkab.go.id/4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-87-juta-pengangguran-terserap-kemiskinan-tinggal-98-persen/>)
- Hutabarat, Delina.1997. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Idris,Muhammad. 2021. *Investasi Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*.

- Imitihan, Husnul; Wahyunadi & Firmansyah. 2017. *Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi.
- Indonesia-investments.com. 2021. *Keajaiban Orde Baru Suharto di Indonesia*. Diakses pada 9 Oktober 2021, (<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247>)
- Irianto, D. 2017. *Industry 4.0; The Challenges of Tomorrow*. Seminar Nasional Teknik Industri, Batu-Malang.
- Kalvin,Alvian..*Dampak Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Nasional*.
- Kemenkeu,RI.2017. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pacu Pertumbuhan Ekonomi. Berita Publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/percepatan-pembangunan-infrastruktur-pacu-pertumbuhan-ekonomi/>
- Kemenkeu. "Investasi Kuartal II 2021 tumbuh 16,2%", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-investasi-kuartal-ii-2021-tumbuh-16-2/> , diakses pada 29 Juli 2021 pukul 12:54
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3726
- Khor,Martin; Widyanata,AB; Siane,Scholastica.2002. *Globalisasi: Perangkat Negara-Negara Selatan*, Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2002.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia. 2019. *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Menyambut Indonesia Maju 2024*. <https://kppip.go.id/berita/percepatan-pembangunan-infrastruktur-untuk-menyambut-indonesia-maju-2024/>
- Kompas.com. 2020. *Sistem ekonomi: pengertian, tujuan ciri ciri*. Diakses pada 30 oktober 2021. Dari: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/06/140000269/sistem-ekonomi-pengertian-tujuan-ciri-ciri>.

- Kompasiana.2017. 5 Manfaat Investasi Asing Di Indonesia. <https://www.kompasiana.com/igodigital/59c0a2edab12ae0a21588f82/5-manfaat-investasi-asing-di-indonesia>
- Kusumaningrum, Septiana Indriani. 2019. *Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Transaksi Vol.11, No.1 Mei 2019
- Lall, S., 2003. *Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness*, s.l.: G24 Intergovernmental Group on Monetary Affairs and Development.
- Lestari,Reni.2021. *Kuartal III 2021 Investasi Asing Di Sektor Mamin Meroket*. [Bisnis.com](https://bisnis.com)
- LinovHR Admin. 2021. *Sistem ekonomi kerakyatan*. Diakses pada 30 Oktober 2021. Dari: <https://www.linovhr.com/sistem-ekonomi-kerakyatan/>.
- Ma'ruf.2021.*Pengertian Kebijakan Fiskal (Instrumen, Tujuan, Macam-Macamnya)*.
- Mabil. 2017. *Sejarah Dan Sistem Ekonomi Indonesia* diakses 11 Oktober 2021, dari <https://repository.unikom.ac.id/54516/1/SEJARAH%20DAN%20SISTEM%20EKONOMI%20INDONESIA.pdf>
- Machmud, Amir, 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiyatmo. 2010. *Ekonomi*. Penerbit : Yudistira.
- Martalena & Malinda. 2011. *Pengantar Pasar Modal*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.
- Mubyarto.1999. *Reformasi Sistem Ekonomi (dari kapitalisme menuju ekonomi kerakyatan)*. Aditya media: hoboken,NJ.
- Mulyadi. 2011. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyati, Nur Sri. 2020. *Modul Pembelajaran Ekonomi*. Bandung : Kemendikbud -Direktorat SMA.
- Murni, Aspia. 2013. *Ekonomika Makro*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Namira, Yona. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia*. Journal UINJKT.

- Ngatikoh, S & Faqih, A. 2020. *Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 4 (1).
- Nisa, Fadilla Diah.2019. *Analisis Yang Mempengaruhi Pengaruh Ekspor Furniture Rotan Indonesia*.Institut Pertanian Bogor.
- Nisar.2016.*Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Pengangguran*. IAIN Parepare.
- Nopirin. 2010. *Ekonomi Internasional Edisi 3*. Yogyakarta : BPFE
- Novianto, Trias Fajar & Atmanti,Dwi Hastarini.2013 . *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-2011*. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Octafiani,Efie; Murniati,Roslani Eka & Nelsen,Yosua Glen. 2013.*Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi*. Makalah. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Pal, Leslie. A. 1997. *Beyond Policy Analysis*. ITP Nelson A Division of Thompson, Canada.
- Panennungi,Maddaremmeng Andi & Xu,Novia. 2017. *Perekonomian Indonesia Dalam Tujuh Neraca Makroekonomi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pangastuti,Tryan.2021. *Ini Lima Negara Dengan Investasi Terbesar Di Indonesia*. <https://investor.id/business/257161/ini-lima-negara-dengan-investasi-terbesar-di-indonesia>.
- Panjaitan, Hendra Andy Mulia. 2019. *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol 8 (1).
- Persada, RM Ksatria Bhumi. 2017. *Masa Pemerintahan Megawati: Reformasi Pasca IMF*, diakses pada 11 Oktober 2021, dari (<https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-pasca-imf>)
- Pasaribu, Rowland B.F. 2015. *Globalisasi Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 13 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Oktober 2004 Tentang Investasi.

- Prakoso, Jaffry Prabu. 2021. *Bahlil Sebut Investasi Asing Indonesia Mulai Sehat di Saat Negara Lain Masih Lesu*. Bisnis.com
- Prasetyo, Rindang Bangun & Firdaus, Muhammad. 2009. *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Pratama, Akhdi Martin. 2021. *Pengertian Sistem Ekonomi, Jenis, Kelebihan dan Kekurangannya*. Diakses pada 10 Oktober 2021, dari <https://money.kompas.com/read/2021/08/13/114500026/pengertian-sistem-ekonomi-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya?page=all>
- Priharto, Sugi. 2018. *Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Jenis dan Komponennya*.
- Primandari, N R. 2017. *Pengaruh Nilai Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2000-2015*. Jurnal Kolegial Vol 5 (2).
- Primandari, Novega Ratih. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan*.
- Purba, Malem Ateta. 2021. *Analisis Determinan Perkembangan Impor Indonesia*. UNIMED.
- Putra, Alen Pranata. 2018. *Model Public Private Partnership Pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Jawa Timur Dalam Konteks Open Government*. Jurnal. Universitas Airlangga.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratag, Julio P.D, Kapantow, Gene H.M & D, Pakasi, Caroline B.D. *Peranan Sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907-4928, Volume IIX Nomor 2A, Juli 2016.
- Redakasi, OCBC NISP. 2021. *Instrumen Kebijakan Moneter*.
- Ridwan. 2016. *Pembangunan Ekonomi Regional*. Penerbit : Pustaka Puitika, Yogyakarta
- Risa, M. 2018. *Ekspor & Impor*. Yogyakarta: Poliban Press.

- Ritonga, M T & Yoga Firdaus, Yoga. 2007. *Ekonomi Dan Akuntansi*. Penerbit : Phibeta Aneka Gama
- Riyadi, Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rodrik, D., 2004. *Industrial Policy for The Twenty-First Century*. S.L.:Unido.
- Rohaila, Yusof. 2011. *Perkembangan Industri Nasional dan Peran Penanaman Modal*. Jurnal Ekonomi dan pendidikan Vol 8 (1).
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : PT Grasindo Persada.
- Safri, Hendra. 2018. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo : Lembaga Penerbit IAIN Palopo.
- Salimah, Hidayatus. 2019. *Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional Edisi Kelima*. Jakarta : Erlangga.
- Salvatore, Dominick. 2013. *The International Monetary System: Past, Present and Future*
- Sereliciouz. (2020). *Sistem Perekonomian Indonesia, ekonomi kelas 10*. Diakses pada 30 oktober 2021. Dari: <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/sistem-perekonomian-indonesia-ekonomi-kelas-10/>.
- Setiawan, Heri dan Lestaria, Sari. 2011. *Perdagangan Internasional*. Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Shapiro AC. 1992. *Modern Corporate Finance*. United State of Amerika : Prentice Hall.
- Siagian, Sondang P. 1998. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siahaan, Santi R; Purba, Elvis F & Simangunsong, Ridhon MD. 2001. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Universitas HKBP Nomensen
- Sicat, Gerardo P & Arndt, H W. 1991. *Buku ekonomi untuk konteks Indonesia*. Jakarta. LP3ES.

- Sicat, P. Gerardo. 1991. *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Sihabudin. 2015. *Pengaturan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Tata Niaga Impor Pangan*. Arena Hukum Vol 8 (2).
- Sihombing, Meiline; Sihotang, Jusmer; Purba, Martin Luter. 2021. *Analisis Pengaruh Ekspor Migas, Ekspor Non Migas Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2019*. JEB Online Vol. 02 No. 02
- Silaban, Putri Sari & Rejeki, Raysa. 2020. *Pengaruh Inflasi, Ekspor dan Impor PDB Di Indonesia Periode 2015 – 2018*. NIAGAWAN Vol 9 (1)
- Silaban, Putri Sari & Rejeki, Raysa. 2020. *Pengaruh Inflasi, Ekspor dan Impor terhadap PDB Di Indonesia Periode 2015 – 2018*. Jurnal Niagawan Vol 9 (1).
<https://doi.org/10.24114/niaga.v9i1.17656>
- Soyomukti, Nurani. 2008. *Pendidikan Berperspektif Globalisasi*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media Group.
- Starling, Grover. 1988. *Strategies for Policy Making*. The Dorsey Press. Chicago.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukmayani, Ratna, dkk. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Penerbit : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Sukwika, Tatan. 2018. *Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 6 (2).
- Sumanth, Dafid. J., 1984. *Productivity Engineering and Management*. Mc Graw-hill Book Company.
- Suroso, P.C. 1994. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susantono, Bambang & Berawi, Mohammed Ali. 2012. *Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta Di Indonesia*. Jurnal

- transportasi. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/journaltransportasi/article/view/475>
- Susilo, Amir M. 2000. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri Seri Umum No.8*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Sutedi, A. 2014. *Hukum Ekspor & Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tambunan, Tulus. 2010. *Perkembangan Industri Nasional*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI Vol XVIII (1)
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama*. Yogyakarta : Kanisius
- Tania.2020. *Kebijakan Fiskal Sebagai Komponen Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi*.
- Tarigan, F.S.; Hutagalung,Daud; Hermawan,Ferry & Khasani,Riqi Radian. 2017. *Pengaruh Pola Kebijakan Produktivitas Konstruksi Indonesia Terhadap Daya Saing Infrastruktur*. Jurnal Karya Teknik Sipil Vol 6 (4).
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Totoaminoto.2019.Ispeii.<http://www.Ispeii.co.id/2019/05/16/klasifikasi-barang-ekspor/>
- Triastuti, Rini & Wijianto. 2021. *Sejarah Ekonomi Indonesia* diakses 11 oktober 2021, dari (https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/612691/mod_resource/content/1/PDF-Pert%20%20Sejarah%20Ekonomi%20Indonesia.pdf)
- Trilling, B & Fadel, C. 2009. *21st-century skills: learning for life in our times*. US: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Ayat 8.
- Utomo,Wahyu.2018.*Meluruskan Kembali Makna Percepatan dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- Wardhani, Maya Rachmatika & Yuhermansyah,Edy.(2018). *Tindak Pidana Penyeludupan Gula Impor*. Jurnal Justia, Vol 3, No 2

- Wibowo, Rudi. 2004. *Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian*. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia : Universitas Michigan.
- Wijayanto, Hendra & Olde Samsul. 2020. *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia*. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika.
- Wijayanto, Totok. 2020. *Perkembangan Ekonomi dan Politik di Era Gus Dur*. Diakses pada 10 Oktober 2021, dari (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/170000769/perkembangan-ekonomi-dan-politik-di-era-gus-dur?page=all>)
- Winando, Yoga. 2021. *Pengertian, Tujuan dan Instrumen Kebijakan Moneter*.
- Wulandari, Trisna. 2021. *6 Faktor Pendorong Kerja Sama Antarnegara ASEAN dan Penghambatnya*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5681085/6-faktor-pendorong-kerja-sama-antarnegara-asean-dan-penghambatnya-kamu-perlu-tahu>
- Yatmo, Mardi. 2001. *Konsep ekonomi kerakyatan*. *Majalah pp/th edisi 25*. <https://sg.docs.wps.com/l/sIPGZr8xrWuWoiwY.pdf>.
- Yuliadi, Imamudin,. 2008. *Analisis Impor Indonesia*. JESP Vol.9 No.1
- Zon Fadli. 2016. *Memahami gagasan ekonomi kerakyatan Moh. Hatta*. <https://www.ui.ac.id/memahami-gagasan-ekonomi-kerakyatan-bung-hatta/>.
- Zulkarnain. 2006. *Kewirausahaan : Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*. Adicita karya nusa: yogyakarta.
- Zulkifli. 2014. *Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol 3 No 2. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>
<https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>

BIOGRAFI PENULIS



Dr. A. Mahendra, SE., M. Si lahir di Medan 12 Juni 1985. Penulis merupakan anak sulung dari Ayahanda Ambalagen dan Ibunda Tamil Selvi. Saat ini Penulis telah menikah dengan Witya Shalini dengan memiliki dua orang anak yang bernama Virat Mahendra dan Thalia Shalini. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara (2003-2006), pendidikan S2 Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara (2006-2008), kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Universitas Sumatera Utara (2018-2021). Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Katolik Santo Thomas, Dosen Luar Biasa di Universitas Darma Agung dan Politeknik Cendana. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian dan menulis buku.



Ir. T. Parulian, M. Si lahir di Medan 12 Juni 1965. Penulis menyelesaikan program pendidikan S1 Program Studi Teknik Sipil Transportasi di Universitas Sumatera Utara (1984-1990), pendidikan S2 Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara (2001-2003), dan saat ini sedang menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Sumatera Utara. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Medan Area. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, pengabdian dan konsultan dalam manajemen dan pembangunan infrastruktur.



Dr. Dede Ruslan, M.Si., lahir di Bandung pada 1965. Menamatkan pendidikan S-1 di UPI Bandung dhl. IKIP Bandung pada 1989. Meneruskan ke Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Pascasarjana Unsyiah dan mendapatkan gelar M.Si pada 1997.

Melanjutkan ke Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNPAD Bandung dan mendapatkan gelar Dr. pada 2003. Spesialisasi dalam bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi sektor publik, ekonomi moneter, ekonomi industri dan ekonometrika.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Buku Perekonomian Indonesia dirancang dan ditulis untuk memperkenalkan pembaca melihat kondisi Perekonomian Indonesia setelah Indonesia Merdeka dan Pasca Reformasi serta strategi, peran dan kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia.

Buku Perekonomian Indonesia ini diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Perekonomian Indonesia serta dapat menjadi rujukan dalam penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Buku ini juga dapat dipakai secara luas oleh banyak kalangan, para eksekutif, kaum bisnis dan masyarakat pada umumnya yang memang tertarik untuk memahami secara cermat mengenai Perekonomian Indonesia. Detail dari buku ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Gambaran Umum Perekonomian Indonesia
- Bab II Sistem Ekonomi Indonesia
- Bab III Ketenagakerjaan dan Pengangguran Di Indonesia
- Bab IV Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Indonesia
- Bab V Pembangunan Ekonomi Regional
- Bab VI Investasi Di Indonesia
- Bab VII Perdagangan dan Pembayaran
- Bab VIII Ekspor
- Bab IX Impor
- Bab X Kebijakan Industri
- Bab XI Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Bab XII Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
- Bab XIII Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia
- Bab XIV Perekonomian Indonesia Dalam Era Globalisasi



 **Wonocolo Utara V/18 Surabaya**
 **+628977416123**
 **globalaksarapers@gmail.com**



ISBN 978-623-5874-94-4

